



**LAPORAN AKSI PERUBAHAN
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK**

**PENINGKATAN
AKUNTABILITAS TARGET DAN CAPAIAN KINERJA DENGAN
MENGUNAKAN DATA YANG VALID DAN AKTUAL
PADA RENSTRA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN 2025-2029**

Oleh:

MUHAMAD UMAR SAHID, S.St.Pi
NIP. 198612162010011010
NDH: 26

**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS ANGKATAN I
TAHUN 2025**

LEMBAR PERSETUJUAN
LAPORAN IMPLEMENTASI AKSI PERUBAHAN
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

PENINGKATAN
AKUNTABILITAS TARGET DAN CAPAIAN KINERJA DENGAN
MENGGUNAKAN DATA YANG VALID DAN AKTUAL
PADA RENSTRA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN 2025-2029

Oleh:

MUHAMAD UMAR SAHID, S.St.Pi
NIP. 198612162010011010
NDH: 26

Telah disetujui untuk diseminarkan pada:

Hari/Tanggal : **Senin / 14 Juli 2025**
Tempat : **BPSDMD PROVINSI SUMATERA SELATAN**

COACH,

MENTOR,

H.SENTOT SUPRIYADI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 1966092111989011001

VIVIN INDIRA SARI, ST., MT.
Pembina Tk.I / IV.b
NIP. 197904182001122002

Menyetujui :

An. Kepala BPSDM Provinsi Sumatera Selatan
Kepala Bidang Pengembangan kompetensi manajerial,

TRI HARTATI, S.E., M.Si.
Pembina / IV a
NIP. 19721219 2006042006

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN IMPLEMENTASI AKSI PERUBAHAN
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

PENINGKATAN
AKUNTABILITAS TARGET DAN CAPAIAN KINERJA DENGAN
MENGGUNAKAN DATA YANG VALID DAN AKTUAL
PADA RENSTRA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN 2025-2029

Oleh:

MUHAMAD UMAR SAHID, S.St.Pi
NIP. 198612162010011010
NDH: 26

Telah disetujui untuk diseminarkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa / 15 Juli 2025
Tempat : BPSDMD PROVINSI SUMATERA SELATAN

COACH,

NARASUMBER/PENGUJI,

H.SENTOT SUPRIYADI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 1966092111989011001

ISMAIL FAHMI, S.IP., M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 196812151989031002

Mengesahkan :

Kepala BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan,

Prof.Dr.H.M.Edwar Juliartha, S.Sos., M.M
Pembina Utama Madya / IV.d
NIP. 197507071997031003

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Aksi Perubahan ini dengan judul ***“Peningkatan Akuntabilitas Target Dan Capaian Kinerja Dengan Menggunakan Data Yang Valid Dan Aktual Pada Renstra Dinas Kelautan Dan Perikanan 2025-2029”***. Penulisan Laporan Aksi Perubahan ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas yang diselenggarakan BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak yang telah membantu penulis secara langsung maupun tidak langsung, sehingga Aksi Perubahan ini dapat diselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Edwar Juliartha selaku Kepala Badan Pengembang Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan beserta jajarannya yang telah menyelenggarakan Diklat Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP);
2. Bapak Aries Irwan Wahyu, S.STPi., M.Si selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan;
3. Ibu Vivin Indira Sari, ST., MT selaku Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan yang telah bersedia menjadi mentor;
4. Bapak H. Sentot Supriyadi. S.Sos., M.Si membimbing dan mengarahkan dalam pengerjaan laporan aksi perubahan ini;
5. Widyaiswara yang telah membimbing dan memberikan materi Diklat PKP;
6. Rekan-rekan Dinas Kelautan dan Perikanan beserta Tim Efektif pada Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
7. Rekan-rekan peserta Diklat PKP Angkatan.I Provinsi Sumsel tahun 2025;
8. Orang Tua, Istri serta keluarga yang selalu mendoakan, mendukung, dan memotivasi sehingga penulis dapat mengikuti Diklat PKP Angkatan I Provinsi Sumsel tahun 2025 dan menyelesaikan aktualisasi ini dengan baik.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan aktualisasi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun dari pembaca dan pemerhati sangat diharapkan untuk penyempurnaan Aksi Perubahan ini. Semoga Aksi Perubahan ini dapat bermanfaat bagi diri penulis, pembaca, dan semua pihak yang berkepentingan dengan Aksi Perubahan ini.

Palembang, Juli 2025
Muhamad Umar Sahid, S.St.Pi
NDH. 26

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I RANCANGAN AKSI PERUBAHAN	
A. Gambaran Permasalahan	9
B. Tujuan	13
C. Manfaat Aksi Perubahan	14
D. Ruang Lingkup Aksi Perubahan	15
E. Profil Organisasi	17
F. Kinerja Pelayanan	22
G. Peningkatan Kualitas Pelayanan.....	30
BAB II DESKRIPSI PROSES KEPEMIMPINAN	
A. Membangun Integritas Kinerja Pelayanan.....	36
B. Pengelolaan Pelayanan (Pemanfaatan Teknologi Informasi)	37
C. Pengelolaan Tim	38
BAB III DESKRIPSI HASIL KEPEMIMPINAN	
A. Capaian dan Perbaikan Kinerja Pelayanan	40
B. Manfaat Aksi Perubahan	67
C. Implementasi Pengembangan Kompetensi dalam Aksi Perubahn	68
BAB IV KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN	
A. Tindak Lanjut Kegiatan Jangka Pendek	71
B. Target Capaian Jangka Menengah	72
C. Target Capaian Jangka Panjang	37
BAB V KETERKAITAN DENGAN MATA PELATIHAN PILIHAN	
A. Perencanaan Kegiatan Pelayanan Publik	75
B. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Pelayanan Publik	75
C. Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan	76
D. Berpikir Kreatif dalam Pelayanan	76
E. Pelayanan Publik Digital	76
F. Etika dan Integritas Kepemimpinan Pancasila	77
BAB VI DISEMINASI DAN PUBLIKASI AKSI PERUBAHAN	
A. Penerapan Strategi Komunikasi	78
B. Keberhasilan Mendapat Dukungan dan Komitmen Replikasi	83
C. Peta Stakeholder: Sebelum dan Sesudah Aksi Perubahan	95

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. Keterkaitan dengan 7 Visi Gubernur Sumsel 2025–2029	13
Tabel 1.2. Keterkaitan dengan 12 Sasaran/Program Strategis Gubernur	13
Tabel 1.3. Komposisi Pegawai berdasarkan Golongan	20
Tabel 1.4. Komposisi Pegawai menurut Jenis Kelamin	20
Tabel 1.5. Komposisi pegawai menurut tingkat Pendidikan	21
Tabel 1.6. Daftar Inventarisasi Tanah dan Bangunan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan	21
Tabel 1.7. Perbandingan Kondisi Saat Ini dan Kondisi Yang Diharapkan.....	27
Tabel 1.8. Identifikasi Masalah dan Analisis	28
Tabel 1.9. Milestone Kegiatan.....	33
Tabel 1.10. Jadwal / Milestone Kegiatan	35
Tabel 3.1. Pengembangan Kompetensi dalam Aksi Perubahan	70
Tabel 7.1. Aspek Peserta Yang Perlu dikembangkan.....	98
Tabel 7.2. Aspek Peserta Yang Perlu dikembangkan	99
Tabel 7.3. Perbandingan Rencana dan Realisasi.....	102

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan	9
Gambar 1.2. Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan (Dikelompokkan Per Unit Kerja).....	18
Gambar 1.3. Struktur Lengkap Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan	19
Gambar 1.1. Perbedaan Capaian Target Kinerja (Produksi Perikanan Tangkap & Budidaya)	23
Gambar 1.5. Perbedaan Capaian Kinerja (Produksi Perikanan Tangkap & Budidaya)	24
Gambar 1.6. Peremenpan RB No Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.....	25
Gambar 1.7. Kepmen KKP-RI Nomor 36 Tahun 2023 Tentang IKU	26
Gambar 1.8. Diagram Fishbone Untuk Memetakan Penyebab Permasalahan	29
Gambar 3.1. Konsultasi dengan Mentor	41
Gambar 3.2. SK TIM Efektif	43
Gambar 3.3. Rapat Pembentukan TIM Efektif	44
Gambar 3.4. Rapat Pembuatan Format <i>Google form/Spreadsheet</i>	45
Gambar 3.5. Nota Dinas dan lampiran ringkasan isi, Permintaan Penyusunan Indikator Kinerja Bidang teknis dan IBEI	45
Gambar 3.6. Googleform dan Preadsheet telah terisi data IKU dan IKK	46
Gambar 3.7. Rapat dengan Koordinator/Validator data statistik bidang.....	47
Gambar 3.8. Spreadsheet Pengumpul data sebagai Baseline terupdate	49
Gambar 3.9. Rapat dengan Bidang Teknis dan UPTD dalam Penyusunan Renstra DKP 2025-2029.....	50
Gambar 3.10. Penerapan Indikator Kesejahteraan Masyarakat (IKM) ke dalam Penyusunan Dokumen Renstra DKP 2025-2029	51
Gambar 3.11. Rakor Penyusunan Dokumen Renstra 2025-2029	52
Gambar 3.12. Notulen Rakor Penyusunan Dokumen Renstra DKP 2025-2029	54
Gambar 3.13. Dokumentasi serta Notulen dan indikator yang dilakukan sinkronisasi dengan BPS Sumsel untuk Penyusunan Dokumen Renstra DKP 2025-2029	55
Gambar 3.14. Rapat Pemberian arahan kepada Penyuluh Perikanan.....	57

Gambar 3.15. Koordinasi dan desk Penyempurnaan Renstra 2025-2029 di Bappeda Prov Sumsel	61
Gambar 3.16. Notulen desk Penyempurnaan Renstra 2025-2029 di Bappeda Prov Sumsel.....	61
Gambar 3.17. Konsultasi Penyempurnaan Renstra 2025-2029 ke Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Prov Sumsel.....	62
Gambar 3.18. Sosialisasi Renstra 2025-2029 ke Grup Perencanaan.....	64
Gambar 3.19. Sosialisasi Renstra 2025-2029 Melalui Whatsapp	65
Gambar 3.20. Tanya Jawab Seputar Renstra 2025-2029 dengan Kab. Musi Banyuasin	66
Gambar 3.21. Tanya Jawab Seputar Renstra 2025-2029 dengan Kab. OKI ..	66
Gambar 3.22. Tanya Jawab Seputar Renstra 2025-2029 dengan Kab. Musi Rawas	66
Gambar 6.1. Tampilan Google Drive yang di bagikan	80
Gambar 6.2. Tampilan Google Form saat akan dilakukan pengisian.....	81
Gambar 6.3. Video dan Pernyataan Dukungan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov Sumsel	85
Gambar 6.4. Video dan Pernyataan Dukungan Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Prov Sumsel	87
Gambar 6.5. Video dan Pernyataan Dukungan Kabid Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Prov Sumsel.....	87
Gambar 6.6. Video dan Pernyataan Dukungan Kabid PUPMHKP Dinas Kelautan dan Perikanan Prov Sumsel.....	88
Gambar 6.7. Video dan Pernyataan Dukungan Kabid Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Prov Sumsel.....	88
Gambar 6.9. Video dan Pernyataan Dukungan Kabid PRL, PUD dan PSDKP Dinas Kelautan dan Perikanan Prov Sumsel.....	89
Gambar 6.10. Video dan Pernyataan Dukungan Kabid Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan BAPPEDA Prov Sumsel	89
Gambar 6.11. Video dan Pernyataan Dukungan Kepala Dinas Perikanan Kota Prabumulih.....	90
Gambar 6.12. Video dan Pernyataan Dukungan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Banyuasin.....	91
Gambar 6.13. Video dan Pernyataan Dukungan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Muara Enim	91
Gambar 6.14. Video dan Pernyataan Dukungan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagar Alam.....	92
Gambar 6.15. Video dan Pernyataan Dukungan Kepala Perikanan Kabupaten Lahat.....	92

Gambar 6.16. Kabupaten OKI, izin untuk menggunakan Draft Renstra DKP Prov Sumsel untuk bisa di replikasi (Ter-Diseminasikan)	94
Gambar 6.17. Kabupaten MUBA, izin untuk menggunakan IKK pada Draft Renstra DKP Prov Sumsel untuk bisa di replikasi (Ter-Diseminasikan)	94
Gambar 6.18. Peta Stakeholder Sebelum Aksi Perubahan.....	95
Gambar 6.19. Peta Stakeholder Setelah Aksi Perubahan.....	95

BAB I.

RANCANGAN AKSI PERUBAHAN

A. Gambaran Permasalahan

1. Latar Belakang

Provinsi Sumatera Selatan memiliki potensi sektor kelautan dan perikanan yang sangat besar dan strategis. Dengan panjang garis pantai mencapai lebih dari 570 km, luas perairan laut sekitar 800 ribu hektar, dan perairan daratan seluas 2,5 juta hektar (*terluas kedua se-Indonesia, berdasarkan Dokumen Materi Teknis RZWP3K 2020*) provinsi ini menyimpan kekayaan sumber daya alam yang luar biasa. Potensi produksi perikanan budidaya mencapai ±500.000 ton per tahun, sementara perikanan tangkap baik di laut maupun di perairan umum daratan memiliki potensi produksi hingga ±100.000 ton per tahun (*laporan tahunan data statistik 2024*). Hal ini menjadikan sektor kelautan dan perikanan sebagai tulang punggung ekonomi biru daerah yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta ketahanan pangan dan gizi masyarakat.

Namun, besarnya potensi tersebut tidak serta merta menjamin efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan jika tidak diiringi dengan penyusunan target dan capaian yang berbasis data yang valid dan aktual. Dalam konteks tata kelola pemerintahan yang semakin menuntut akuntabilitas dan ketepatan sasaran, maka setiap kebijakan, program, dan kegiatan yang disusun oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sumatera Selatan harus bersandar pada data yang terpercaya serta penggunaan dan pengelompokan indikator yang dapat mengukur dengan tepat tingkat keberhasilan tujuan pembangunan.

Data yang valid dan aktual tidak hanya menjadi dasar untuk merumuskan indikator kinerja yang realistis, tetapi juga menjadi instrumen utama dalam merespons isu-isu strategis di lapangan, seperti: rendahnya pendapatan pelaku usaha perikanan sebagai akibat

dari kontraksi sektor ekonomi lain, belum optimalnya produksi dan pemanfaatan perairan daratan, serta degradasi sumber daya perikanan akibat aktivitas *illegal fishing* dan perubahan iklim. Tanpa data yang tepat, maka program yang dilahirkan cenderung tidak menyentuh kebutuhan riil masyarakat dan berisiko tumpang tindih atau tidak efektif dalam pelaksanaannya.

Saat ini, laporan mengenai capaian target pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Sumatera Selatan masih bergantung pada data yang disajikan oleh Validator Data Statistik Bidang Teknis yang merupakan agregasi dari data yang dikumpulkan oleh petugas pendamping teknis kelautan dan perikanan (PPTKP), penyuluh perikanan dan Validator 17 Kabupaten/Kota. Meskipun data ini memberikan gambaran yang cukup mengenai progres program-program yang telah dilaksanakan, namun masih terdapat keterbatasan yang signifikan dalam hal integrasi dan validitas data. Data yang disajikan oleh PPTKP, penyuluh perikanan dan Validator 17 Kabupaten/Kota umumnya dikumpulkan dan dikelola secara terpisah, tanpa adanya sistem yang dapat menggabungkan dan memverifikasi data tersebut dengan data yang lebih komprehensif dan valid dari sumber lain seperti Badan Pusat Statistik (BPS) sehingga validitas datanya masih mengundang perdebatan.

Keterbatasan ini menyebabkan ketidakterpaduan dalam penyusunan laporan capaian, sehingga ada potensi ketidakakuratan dalam perencanaan dan evaluasi program. Tanpa adanya integrasi antara data yang dikumpulkan oleh PPTKP, penyuluh perikanan, Validator dari Kabupaten/Kota dan data resmi dari BPS, kebijakan yang dihasilkan berisiko tidak sepenuhnya mencerminkan keadaan aktual di lapangan. Hal ini mengurangi efektivitas pengambilan keputusan yang berbasis data yang valid dan terkini. Keterbatasan penggunaan data ini akan semakin mengkhawatirkan dengan adanya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) Nomor 20 Tahun 2023 bahwa Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan aturan terkait dengan

larangan bagi instansi pemerintah untuk melakukan rekrutmen tenaga honorer baru per 1 Januari 2025 dimana sebagian besar Penyuluh Perikanan dan PPTKP berstatus Honorer.

Untuk itu, penting untuk mengintegrasikan data dari berbagai sumber baik PPTKP, penyuluh perikanan dan BPS dalam satu dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang menjadi acuan baku sehingga dapat dijadikan dasar penentuan kebijakan yang lebih tepat sasaran, Penentuan Target Kinerja yang terukur, dan dapat diandalkan dalam perencanaan Program/Kegiatan yang lebih efektif ke depannya.

Selain permasalahan tersebut, indikator kinerja yang selama ini dipakai pada Renstra 2019-2023, serta RKP 2024-2026 (Renstra antara/transisi) yang saat ini tidak berlaku lagi, belum sepenuhnya menjawab keberhasilan dalam mensejahterakan masyarakat pelaku usaha perikanan. Selama ini, Produksi perikanan budidaya dan produksi perikanan tangkap masih menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) DKP Provinsi Sumatera Selatan. Padahal indikator tersebut tidak sepenuhnya menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan karena kesejahteraan masyarakat masih dipengaruhi indikator dari sektor ekonomi lain seperti naik turunnya daya beli masyarakat, harga sembako, harga bahan bakar minyak dan lain-lain.

Kondisi ini memerlukan penetapan indikator yang lebih menggambarkan kesejahteraan seperti Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) karena indikator ini Mengukur daya beli nelayan sebagai pelaku utama di subsektor perikanan tangkap dan budidaya yang membandingkan antara indeks harga yang diterima nelayan dengan indeks harga yang dibayar nelayan/pembudidaya ikan (*Kepmen KP-RI Nomor 36 Tahun 2023*).

Ringkasnya, Permasalahan yang menyebabkan Validitas data dan Akutabilitas kinerja belum optimal adalah sebagai berikut :

- a) Belum optimalnya sistem penyusunan target dan capaian kinerja berbasis data yang valid dan aktual.
- b) Masih kurangnya koordinasi, integrasi dan pembaruan data antar unit kerja / Bidang teknis pengampu data statistik.
- c) Belum tepatnya penyusunan/pengelompokan indikator pembangunan kelautan dan perikanan pada dokumen Renstra 2019-2023 dan juga pada RPD DKP 2024-2026.
- d) Belum terimplementasinya Indikator Kesejahteraan Masyarakat (IKM) seperti NTN dan NTPI secara konsisten serta terfokus dalam dokumen perencanaan (Renstra DKP 2019-2023).
- e) Potensi kehilangan sumber data lapangan akibat kebijakan penghapusan tenaga honorer per Januari 2025.
- f) Penilaian terhadap SAKIP pada Dinas Kelautan Perikanan oleh Inspektorat yang dikoordinasikan dengan Kemendagri dan Kemenpan-RB pada masa Renstra 2019-2023 dalam 5 tahun tersebut belum optimal dan mendapatkan nilai B, sebagai akibat indikator capaian IKU dan IKK yang bias.

Menyadari hal tersebut, aksi perubahan yang berjudul ***“Peningkatan Akuntabilitas Target Dan Capaian Kinerja Dengan Menggunakan Data Yang Valid Dan Aktual Pada Renstra Dinas Kelautan Dan Perikanan 2025-2029”*** ini disusun dalam rangka menghadirkan Indikator Kinerja yang dapat digunakan sebagai pengukur tingkat keberhasilan pembangunan serta data capaian yang validitasnya diakui secara nasional sehingga melahirkan kebijakan yang responsif, program yang adaptif, serta kegiatan yang benar-benar menjawab permasalahan aktual di sektor kelautan dan perikanan daerah yang akan dituangkan dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 – 2029.

Melalui Penyusunan Target indikator Kinerja yang terukur dengan menggunakan data yang valid dan aktual, diharapkan Dinas Kelautan dan Perikanan mampu menjadi institusi yang tangguh, adaptif, dan terdepan dalam mewujudkan pembangunan sektor kelautan dan

perikanan yang berkelanjutan dan tepat sasaran untuk mendukung kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*).

B. Tujuan

Pembagian tujuan dari Aksi Perubahan ini meliputi 3 (tiga), yaitu:

A. Tujuan Jangka Panjang (1-2 tahun)

- ✓ Meningkatnya Penilaian SAKIP DKP Provinsi Sumatera Selatan ke Grade AA
- ✓ Terlaksananya semua Program/Kegiatan yang tertuang pada dokumen RENSTRA DKP 2025–2029 untuk menunjang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) yang mendukung terwujudnya *Good governance*.

B. Tujuan Jangka Menengah (6 Bulan)

- ✓ Dijadikannya NTN dan NTPi sebagai indikator kinerja utama pada Dokumen Renstra 2025-2029.
- ✓ Mulai dilaksanakannya penerapan evaluasi indikator dan target capaian yang telah ditetapkan dalam Renstra 2025-2029 (untuk melihat efektifitas keterukuran indikator terhadap capaian tujuan pembangunan).

C. Tujuan Jangka Pendek (0-3 bulan)

- ✓ Terbentuknya Tim Efektif
- ✓ Tersedianya format standar pengumpulan dan verifikasi data Indikator kinerja pembangunan kelautan dan perikanan menggunakan Google form dan Google Spreadsheet
- ✓ Koordinasi awal dengan bidang teknis/UPTD terkait penyusunan target dan capaian kinerja berbasis data valid.
- ✓ Diperoleh baseline data indikator dan capaian kinerja sektor kelautan dan perikanan yang valid dan bisa dijadikan dasar penyusunan dan penetapan indikator kinerja utama serta indikator kinerja kunci.
- ✓ Tersusunnya target capaian indikator kinerja 5 (Lima) tahun yang akan datang (2025-2029).
- ✓ Terselaksananya sinkronisasi data melalui koordinasi intensif dengan BPS Provinsi Sumatera Selatan
- ✓ Tersusunnya Draft dokumen RENSTRA DKP 2025–2029 Dengan mensinergikan Tujuan pembangunan Pusat, Provinsi dan juga Kab/Kota dan mengimplementasikan Peraturan penyusunan Resntra yang benar.

C. Manfaat Aksi Perubahan

1. Bagi Organisasi (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan)

Aksi perubahan ini memberikan manfaat strategis bagi Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) dalam hal peningkatan kualitas tata kelola perencanaan dan pelaporan kinerja. Dengan mengimplementasikan indikator target dan capaian berbasis data valid dan aktual yang tertuang pada RENSTRA 2025-2029 akan memberi manfaat:

- a) **Menyusun target dan capaian kinerja yang realistis dan terukur**, berdasarkan kebutuhan lapangan dan indikator kinerja utama yang diakui secara nasional (NTN dan NTPi).
- b) **Meningkatkan akuntabilitas perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan**, sehingga mampu menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
- c) **Mewujudkan satu data pembangunan kelautan dan perikanan** yang dapat diakses dan dijadikan dasar dalam dokumen strategis seperti Renstra 2025–2029 dan Renja tahunan.
- d) **Mengurangi risiko kebijakan yang tumpang tindih**, karena penyusunan program akan berbasis pada kondisi nyata dan kebutuhan masyarakat.
- e) **Meningkatkan nilai akuntabilitas capaian kinerja**; Dengan menjadikan NTN dan NTPi sebagai IKU dan dipisahkan dengan Produktifitas akan lebih menggambarkan Tujuan Utama dari Pembangunan Kelautan dan Perikanan.

2. Bagi Stakeholder

Aksi perubahan ini juga membawa manfaat luas bagi para pemangku kepentingan (stakeholder), baik internal maupun eksternal DKP:

- a) **Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota (17 wilayah)**: Memperoleh informasi target capaian dan indikator untuk Menyusun Renstra, Renja dan LAKIP yang lebih menggambarkan Tingkat capaian Pembangunan sektor kelautan dan perikanan di masing-masing Kabupaten/Kota.

- b) **Bagi Penyuluh Perikanan dan PPTKP:** Mendapat wadah untuk menyampaikan data lapangan yang diakui dan digunakan dalam penyusunan kebijakan.
- c) **Bagi Badan Pusat Statistik (BPS):** Terwujudnya sinergi data antara statistik resmi dan data sektoral dari DKP.
- d) **Bagi Bappeda:** Dapat memanfaatkan data DKP yang valid sebagai acuan dalam proses perencanaan daerah.
- e) **Bagi Pelaku Usaha Perikanan:** Program dan bantuan menjadi lebih tepat sasaran karena disusun berdasarkan data kesejahteraan aktual.
- f) **Bagi Masyarakat Umum:** Terbuka akses terhadap data capaian pembangunan kelautan dan perikanan serta meningkatnya kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah.
- g) **Bagi Akademisi dan Peneliti:** Ketersediaan data yang terintegrasi membuka peluang kolaborasi riset dan pengembangan kebijakan berbasis ilmiah.

D. Ruang Lingkup Aksi Perubahan

Aksi perubahan ini berlaku di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sumatera Selatan, khususnya dalam hal penyusunan Program/Kegiatan dan Pelaporan capaian pembangunan sektor Kelautan dan Perikanan.

Ruang lingkup aksi perubahan difokuskan pada upaya Peningkatan Akuntabilitas Target Dan Capaian Kinerja dengan Menggunakan Data yang Valid dan Aktual serta penggunaan dan pengelompokan Indikator Kinerja (IKU dan IKK) yang tepat pada Renstra 2025-2029, yang dilaksanakan selama masa off campus.

Aksi ini dirancang untuk mengintegrasikan sumber-sumber data dari berbagai unit teknis seperti Penyuluh Perikanan, PPTKP, dan data resmi dari BPS, agar dapat menghasilkan target capaian pembangunan yang lebih akurat, terukur, dan lebih menggambarkan *Goals* dari Pembangunan Kelautan dan Perikanan Sumatera Selatan.

Dalam aksi perubahan ini, beberapa hal penting yang menjadi ruang lingkup antara lain mencakup:

1. **Mensinergikan Visi dan Misi serta Sasaran Strategis Pemerintah Daerah (Gubernur)** yang menjadi tugas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan, khususnya dalam hal perencanaan dan evaluasi kinerja sektor kelautan dan perikanan.
2. **Mengimplementasikan Kepmen KP-RI Nomor 36 Tahun 2023** tentang indikator kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan: Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)
3. **Menyusun/Mengelompokan indikator kinerja** pada dokumen Renstra 2025-2029 sesuai dengan Permen **PAN-RB Nomor 89 Tahun 2021** tentang penjenjangan kinerja instansi pemerintah
4. **Penyusunan format standar pengumpulan dan verifikasi data** yang dapat dijadikan *Baseline* data dengan menggunakan **Google form** dan **Google Spreadsheet**. Sehingga mendapatkan data yang Aktual dan Faktual.
5. Mensinkronkan data target dan capaian indikator dengan instansi pemangku pengelola data (BPS Sumsel)

Melalui ruang lingkup ini, aksi perubahan diharapkan mampu melahirkan Dokumen Renstra yang memuat target dan pelaporan kinerja yang terintegrasi, akuntabel, dan berbasis bukti, serta menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan (penyusunan program dan kegiatan) yang lebih tepat sasaran dan akuntabel di sektor kelautan dan perikanan Provinsi Sumatera Selatan.

E. Profil Organisasi

1. Profil dan peran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan dalam tugasnya mendukung kinerja Pemerintah Daerah



Gambar 1.1. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 70 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan serta Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan pasal 48 menyatakan bahwa Tugas Pokok Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan adalah untuk melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang kelautan dan perikanan. Fungsi-fungsi yang diberikan untuk melaksanakan tugas pokok tersebut sebagaimana tercantum pada pasal 49 adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan kegiatan tata usaha, urusan umum, perencanaan, kepegawaian dan keuangan.
- b. Pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan Gubernur.
- c. Pembinaan teknis dan pengendalian pelaksanaannya, pengelolaan kekayaan Provinsi, serta perumusan dan penyiapan kebijaksanaan

umum di bidang kelautan dan perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- d. Pelaksanaan dan pengawasan tugas kelautan dan perikanan untuk menjamin pemanfaatan dan pembangunan ekonomi berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.
- e. Pelaksanaan sebagian tugas penatagunaan, pengembangan, pendayagunaan dan penyerasian pemanfaatan sumber daya hayati perairan, serta perizinan kelautan dan perikanan.
- f. Pelaksanaan pengembangan dan penyerasian institusi masyarakat dan dunia usaha di bidang kelautan dan perikanan.
- g. Pembinaan teknis di bidang kelautan dan perikanan.
- h. Pemberian izin dan pembinaan usaha sesuai dengan tugas pokoknya.
- i. Penyelenggaraan penyuluhan kelautan dan perikanan.
- j. Pengawasan teknis sesuai dengan tugas pokoknya.
- k. Penelitian dalam bidang perikanan spesifik Provinsi sesuai dengan masalah keperluan dan kondisi lingkungan khusus suatu Provinsi.
- l. Pengujian teknologi dalam rangka penerapan teknologi anjuran.
- m. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya.
- n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam pembangunan lima tahun ke depan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mempunyai cita-cita yang harus dilaksanakan secara objektif, realistis dan dapat dibuktikan keberhasilannya dengan capaian indikator yang tepat. Oleh karena itu, Provinsi Sumatera Selatan dengan arahan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih tengah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029, dimana Misi pembangunan Provinsi Sumsel 2025-2029 adalah "SUMSEL MAJU TERUS UNTUK SEMUA". Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi tersebut dijabarkan dalam 7 (Tujuh) Visi dan 12 Sasaran Strategis.

7 Visi yang dimaksud, yaitu:

- a) Mewujudkan masyarakat Sumatera Selatan yang berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif, berakhlak, berkeadilan, dan berkeadaban melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sumber daya manusia yang berdaya saing
- b) Mewujudkan Ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan Masyarakat.
- c) Mewujudkan keterkaitan (nexus) yang kuat antara ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air sebagai upaya mengatasi perubahan iklim.
- d) Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar kabupaten/kota dan pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan.
- e) Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta perlindungan sosial yang terjaga untuk menurunkan angka kemiskinan
- f) Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas
- g) Mewujudkan kehidupan beragama, seni dan budaya dalam masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi dan berorientasi pada kearifan lokal.

Sementara, 12 Program Strategis itu adalah:

- 1) Mewujudkan New Palembang Port Tanjung Carat
- 2) Melanjutkan Program Berkat (Berobat Gratis Ber-KTP)
- 3) Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP)
- 4) Pendidikan yang Berkeadilan
- 5) Infrastruktur Tuntas Merata
- 6) Sumsel Interkoneksi
- 7) 100.000 Sultan Muda Sumsel
- 8) Sumsel Religius, Toleransi dan Berbudaya
- 9) Sumsel Wonderful 2030

- 10) Sumsel Berintegritas dan Melayani
- 11) Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak
- 12) Revitalisasi Pasar Tradisional

Sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang kelautan dan perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sumatera Selatan memegang peranan strategis dalam mendukung terwujudnya visi pembangunan daerah “Sumsel Maju Terus untuk Semua”. Melalui fungsi-fungsi yang diembannya, seperti pembinaan teknis, pengawasan, penyuluhan, hingga pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, DKP Sumsel menjadi ujung tombak dalam peningkatan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal.

Fungsi DKP sangat erat kaitannya dengan misi pembangunan Sumatera Selatan, khususnya dalam mendorong ketahanan pangan dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan, serta penguatan keterkaitan antara ketahanan pangan, energi, dan kedaulatan air. Selain itu, kegiatan seperti pembinaan usaha perikanan, penyuluhan, hingga pengembangan teknologi tepat guna di sektor perikanan juga berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat pesisir dan perairan umum, membuka lapangan kerja baru, serta menciptakan sumber daya manusia yang inovatif dan produktif.

Dengan sinergi yang kuat antara kebijakan teknis DKP dan arah pembangunan daerah, diharapkan Sumatera Selatan mampu menjadi provinsi yang tidak hanya unggul dalam pengelolaan potensi sumber daya alamnya, tetapi juga berdaya saing tinggi di tingkat nasional, bahkan global, dalam sektor kelautan dan perikanan.

Berikut ini adalah hubungan antara 7 Visi Gubernur, 12 Program Strategis, dan Tugas serta Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sumatera Selatan

Tabel 1.1. Keterkaitan dengan 7 Visi Gubernur Sumsel 2025–2029

Visi Gubernur	Relevansi dengan Tugas DKP
Visi 1: Mewujudkan masyarakat berkualitas, sehat, produktif	DKP melalui program perikanan berkontribusi pada peningkatan konsumsi ikan (AKI) → mendukung gizi & kesehatan masyarakat. Data valid diperlukan untuk merancang intervensi tepat sasaran.
Visi 2: Ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal	DKP bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan lokal. IKU seperti NTN/NTPI penting untuk mengukur kesejahteraan nelayan/budidaya secara berkelanjutan.
Visi 3: Ketahanan pangan dan perubahan iklim	Produksi perikanan yang optimal mendukung ketahanan pangan; data capaian akurat membantu mitigasi dampak perubahan iklim berbasis bukti.
Visi 5: Perluasan kesempatan kerja	Sektor kelautan & perikanan membuka lapangan kerja signifikan, terutama di daerah pesisir. Perencanaan kinerja berbasis data memperkuat peluang usaha.
Visi 6: Tata kelola pemerintahan berbasis digital	Aksi perubahan memperkuat tata kelola berbasis digital dalam perencanaan dan evaluasi program DKP secara lebih akuntabel.

Tabel 1.2. Keterkaitan dengan 12 Sasaran/Program Strategis Gubernur

Program Strategis	Kontribusi DKP
Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP)	DKP memiliki peran vital melalui peningkatan produksi dan distribusi ikan konsumsi. Aksi perubahan memastikan data produksi & konsumsi akurat mendukung GSMP.
Sumsel Berintegritas dan Melayani	Penguatan sistem pelaporan dan indikator kinerja mendukung pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.
100.000 Sultan Muda Sumsel	DKP bisa mendorong regenerasi pelaku usaha sektor perikanan dengan menyajikan data peluang usaha berbasis wilayah.
Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Konsumsi ikan sebagai sumber protein berkualitas tinggi berdampak pada gizi anak dan ibu. Aksi perubahan ini menyediakan data AKI yang akurat.

2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tercantum pada Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 70 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan pada Bab III Pasal 3 adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. **Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan**
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Perikanan tangkap, membawahi :
 1. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap
 2. Seksi Pengendalian Penangkapan Ikan
 3. Seksi Pengelolaan Penangkapan Ikan
- d. Bidang Perikanan Budidaya, membawahi :
 1. Seksi Produksi Pengembangan Usaha dan Desiminasi Teknologi Budidaya
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Kawasan Budidaya
 3. Seksi Perbenihan dan Pengendalian Lingkungan Budidaya
- e. Bidang Pengembangan Usaha, Pemasaran, Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, membawahi :
 1. Seksi Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan
 2. Seksi Mutu, Diversifikasi Produk Hasil Kelautan dan Perikanan
 3. Seksi Pengembangan Usaha Hasil Perikanan dan Kelautan
- f. Bidang Pengelolaan Ruang Laut, Perairan Umum Daratan, pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, membawahi :
 1. Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
 2. Seksi Pengelolaan Wilayah Pesisir, Laut, Perairan Umum Daratan dan Pulau-Pulau Kecil
 3. Seksi Pendayagunaan dan Konservasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), yang terdiri dari 3 (dua) UPTD, yaitu :

1. Balai Budidaya Perikanan Air Payau dan Laut, yang berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 23 Tahun 2018 pasal 8 dan pasal 9 mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- Tugas Pokok adalah untuk merencanakan, melaksanakan, membina, mengevaluasi, melaporkan pelaksanaan program yang terkait dengan bidang budidaya perikanan air payau dan laut.

- Fungsi :

- Penyusunan program dan rencana kerja tahunan;
- Penyediaan benih dan calon induk yang bermutu;
- Pengembangan sarana dan prasarana budidaya perikanan air payau dan laut;
- Pelaksanaan pengendalian kesehatan ikan dan mencegah dan kontaminasi penyakit, bahan kimia berbahaya yang bersifat karsinogenik dan toksin;
- Pelaksanaan uji lapang teknologi budidaya air payau dan laut;
- Penyampaian laporan kegiatan UPTD;
- Pembagian tugas kepada Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pelaksanaan serta Fungsional;
- Pengevaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP), yang berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 23 Tahun 2018 pasal 12 mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Tugas Pokok adalah untuk melakukan koordinasi, fasilitasi evaluasi dan pelaporan dalam hal pengujian dan penerapan, bimbingan diversifikasi produk perikanan, sertifikasi produk serta penerapan mutu hasil perikanan.

2. Fungsi :

- Pelaksanaan pengujian dan penerapan mutu, keamanan pangan pangan hasil kelautan dan perikanan serta lembaga sertifikasi produk hasil perikanan;
- Pelaksanaan bimbingan pemenuhan persyaratan SNI;
- Pelaksanaan penerapan mutu sebagai bahan penyiapan rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP);
- Pelaksanaan penyiapan bahan rekomendasi registrasi pelaku usaha bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- Pelaksanaan monitoring hasil perikanan;
- Pengawasan dan pembinaan terkait kepegawaian, ketatausahaan, perencanaan anggaran, keuangan, pengolahan data dan penerbitan sertifikasi;
- Pelaksanaan koordinasi dengan bidang, instansi dan lembaga terkait lainnya di bidang pengujian dan penerapan mutu;
- Pembagian tugas kepada Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pelaksana Fungsional;
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

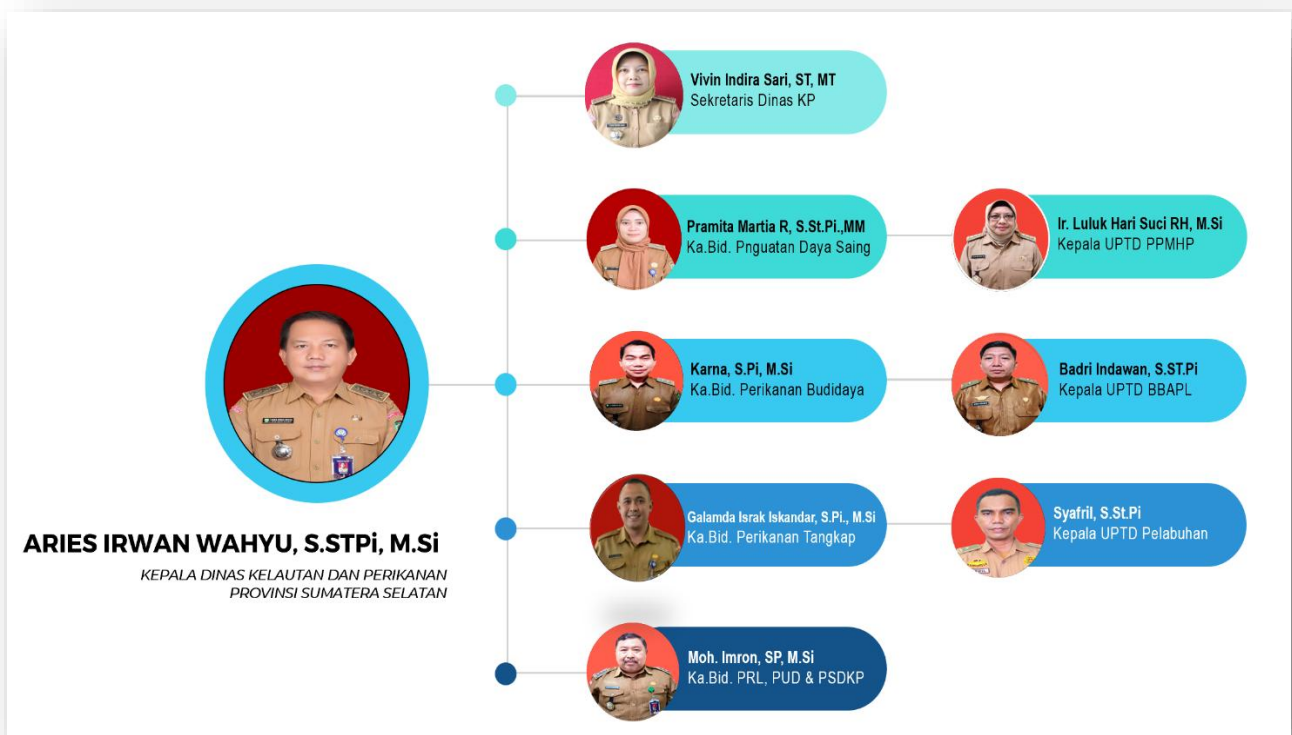
3. Pelabuhan Perikanan Sungsang

- Tugas Pokok adalah untuk melaksanakan, mengkoordinir dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi pelabuhan perikanan sungsang.
- Fungsi :
 - Penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan, dan evaluasi operasional pelabuhan perikanan;
 - Pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan, dan penerbitan surat tanda bukti lapor kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan;
 - Pelaksanaan pemeriksaan bukti pencatatan (log book);

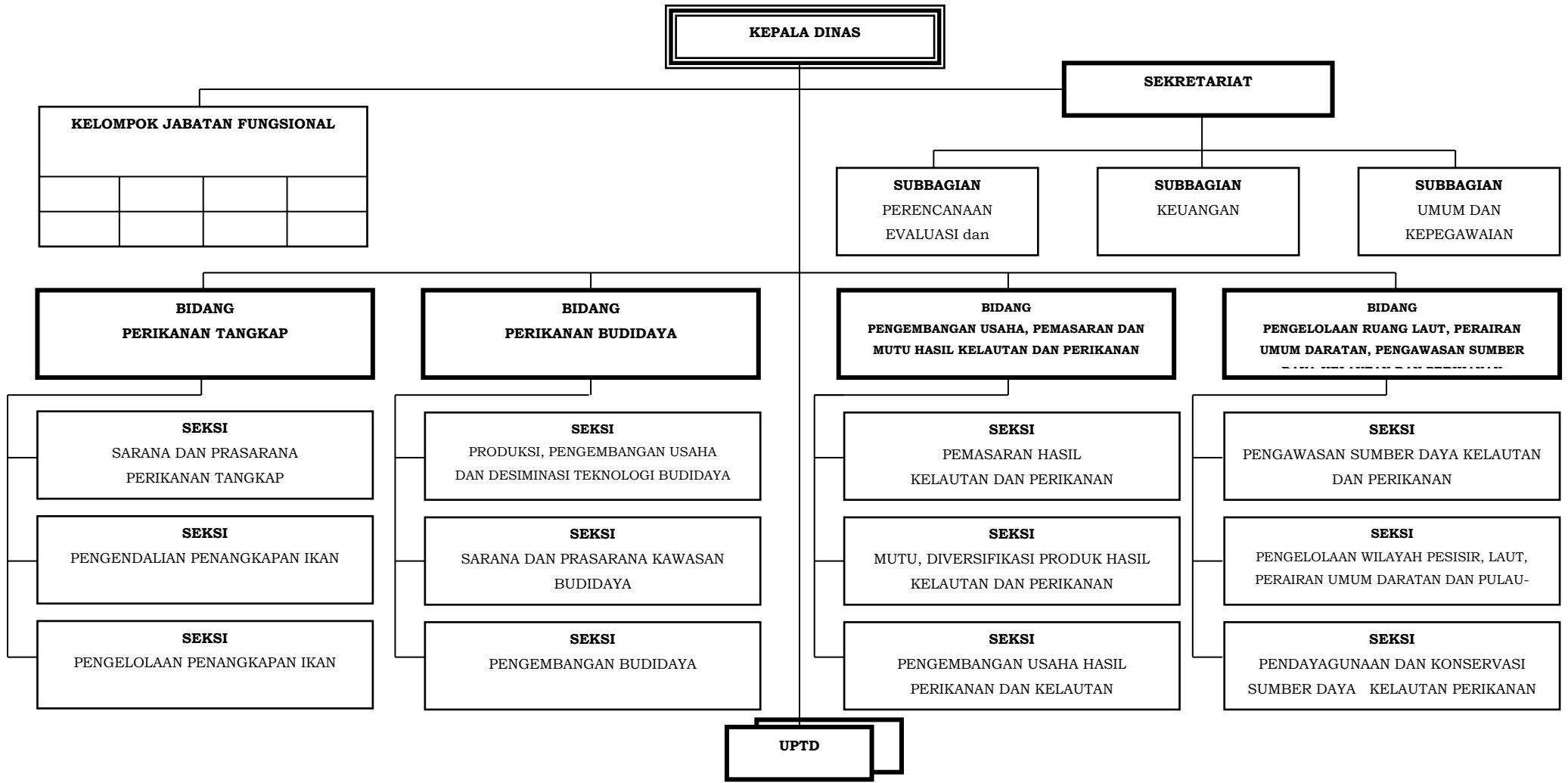
- Pelaksanaan pelayanan penerbitan surat persetujuan berlayar;
 - Pelaksanaan penerbitan sertifikasi hasil tangkapan ikan;
 - Pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar ;
 - Pelaksanaan pepembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pendayagunaan, dan pengawasan serta pengendalian sarana dan prasarana;
 - Pelaksanaan fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantinaan ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu serta pengolahan, pemasaran dan distribusi hasil perikanan;
 - Pelayanan jasa, pemanfaatan lahan dan fasilitasi usaha;
 - Pelaksanaan pengumpulan data, informasi, dan publikasi;
 - Pelaksanaan bimbingan teknis dan penerbitan sertifikat cara penanganan ikan yang baik (CPIB);
 - Pelaksanaan inspeksi pembokaran ikan;
 - Pelaksanaan pengendalian lingkungan di pelabuhan perikanan;
 - Pembagian tugas kepada kepala Subbagian dan Pelaksana serta Fungsional;
 - Pengevaluasian pelaksanaan kegiatan; dan
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional, yang dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 70 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan Bab VI pasal 23 mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan sesuai dengan keahlian yang dimiliki.

Bagan Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan

Nomor: 70 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada Gambar 2.2 dan 3.3 berikut:



Gambar 1.2. Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan (dikelompokkan Per Unit kerja)



Gambar 1.3.
Struktur Lengkap Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Sumatera selatan

3. Sumber Daya Manusia

Jumlah Sumber Daya Manusia yang dimiliki Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan Per 11 April 2025 untuk melaksanakan Tupoksinya sebanyak 108 orang. Gambaran SDM yang dimiliki adalah sebagai berikut:

Gambaran kondisi Sumber Daya Manusia Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.3. Komposisi Pegawai berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah	Persentase (%)
1	I/d	1	0,92
2	I/c	-	-
3	I/b	-	-
4	I/a	-	-
5	II/d	2	1,83
6	II/c	2	1,83
7	II/b	-	-
8	II/a	-	-
9	III/a	3	2,75
10	III/b	19	17,43
11	III/c	20	18,35
12	III/d	24	22,02
13	IV/a	12	11,01
14	IV/b	5	4,59
15	IV/c	2	1,83
16	IV/d	-	-
17	Golongan IX	13	11,93
18	Golongan VII	5	4,59
		108	

Tabel 1.4. Komposisi Pegawai menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki-laki	60	55,05
2	Perempuan	48	44,04
		108	

Tabel 1.5. Komposisi pegawai menurut tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	S2	24	22,22
2	S1	58	5,37
3	D4	6	0,56
4	D3	12	11,11
5	SLTA	7	6,48
6	SD	1	1,67
Total		108	

Tabel 1.6. Daftar Inventarisasi Tanah dan Bangunan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan

NO.	JENIS ASSET	LOKASI	LUAS (M2)		PEMANFAATAN SEKARANG	KET.
			TANAH	BANGUNAN		
1.	Bangunan Gedung Kantor	Jl. Pangeran Ratu Jakabaring	-	216	Kantor	Terdaftar
2.	Rumah dinas	Jl. Veteran, Gg. Permata Merak RT 23 No. 68, Kel. Kuto Batu, Palembang	1.225	209	Rumah dinas	Terdaftar
3.	Kantor UPTD LPPMHP	Jl. Taman Sari KM 6, Palembang	-	622	Gedung Kantor UPTD LPPMHP	Terdaftar
4.	Rumah dinas Kepala UPTD LPPMHP	Jl. Taman Sari KM 6, Palembang	-	356	Gudang/perpustakaan	Terdaftar
5.	Kolam Air Tawar	Di Indralaya Kab. Ogan Ilir	92.005	-	Tanah Kolam	Terdaftar
6.	Kolam Air Tawar	Di Pampangan Kab. Ogan Komering Ilir	400	-	Tanah Kolam	Terdaftar
7.	Kolam Air Tawar	Di Pagar Alam Kab. Pagar Alam	6.877	-	Tanah Kolam	Terdaftar
8.	Kolam Air Tawar	Di Pengadonan Kab.OKU	6.401	-	Tanah Kolam	Terdaftar
9.	Kolam Air Tawar	Di Belitang Kab. OKUT	3.454	-	Tanah Kolam	Terdaftar
10.	Kolam air tawar	Di Muara Beliti Kab. MURA	65.322	-	Tanah Kolam	Terdaftar
11.	Kolam air tawar	Di Tugumulyo Kab MURA	6.044	-	Tanah Kolam	Terdaftar
12.	Tanah Bangunan Gedung	Di Kab Lubuk Linggau	60.447	-	Bangunan Kantor	Terdaftar

F. Kinerja Pelayanan

Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sumatera Selatan memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang kelautan dan perikanan. Sebagai instansi teknis, DKP bertanggung jawab atas berbagai fungsi pelayanan publik yang mencakup pembinaan teknis, pengawasan sumber daya, penyuluhan, perizinan, pengembangan usaha, hingga penyusunan kebijakan untuk pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. Secara umum, kinerja pelayanan public (*public service*) DKP diarahkan untuk:

- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir (Nelayan), Pembudidaya Ikan, dan pelaku usaha pengolahan perikanan,
- Mendorong ketahanan pangan berbasis protein ikan, serta
- Mengembangkan ekonomi daerah dari sektor kelautan dan perikanan yang berdaya saing.

Dalam menjalankan perannya, DKP tidak hanya bertindak sebagai pelaksana teknis, tetapi juga menjadi instrumen penting Pemerintah Provinsi dalam mewujudkan visi **“Sumsel Maju Terus Untuk Semua,”** terutama pada aspek ketahanan ekonomi, ketahanan pangan, dan tata kelola pemerintahan berbasis data valid dan aktual. Namun, dalam menghadapi tantangan modernisasi pemerintahan dan tuntutan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas, maka salah satu area kritis yang perlu diperkuat adalah pada fungsi perencanaan, evaluasi, dan pelaporan dalam menentukan indikator yang tepat sebagai pengukur tingkat keberhasilan.

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan (PEP) memiliki mandat strategis sebagai *otak teknokratis* dalam merancang arah kebijakan dan mengukur efektivitasnya melalui indikator kinerja yang relevan, terukur, dan berbasis data. Dalam praktiknya, kualitas layanan publik DKP sangat

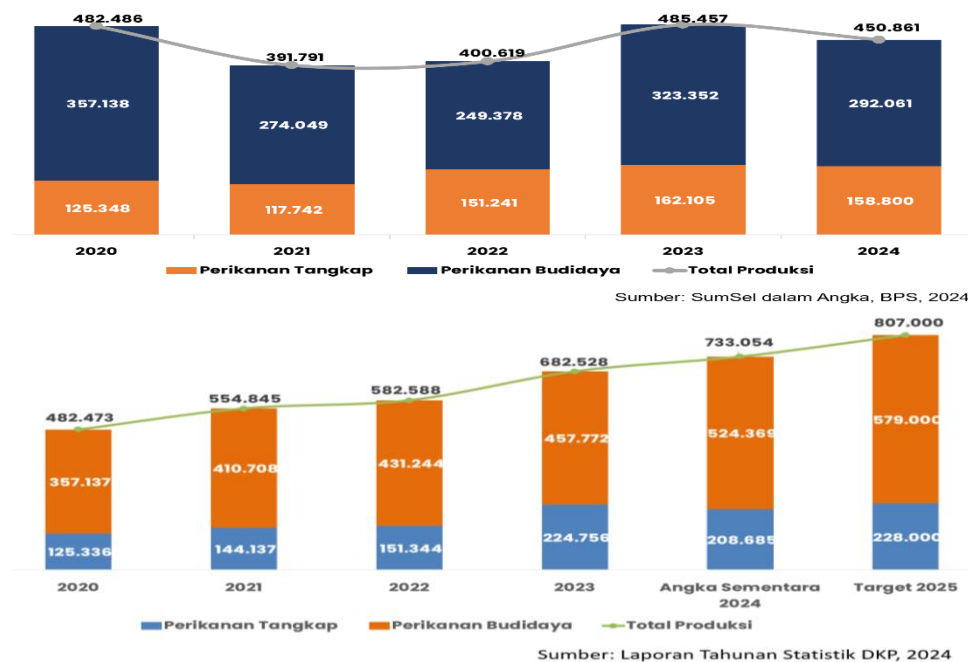
bergantung pada seberapa akurat perencanaan program dan kejelasan indikator kinerja yang digunakan.

G. Analisa Masalah Kinerja Pelayanan

1. Identifikasi Masalah/Isu yang ada saat ini

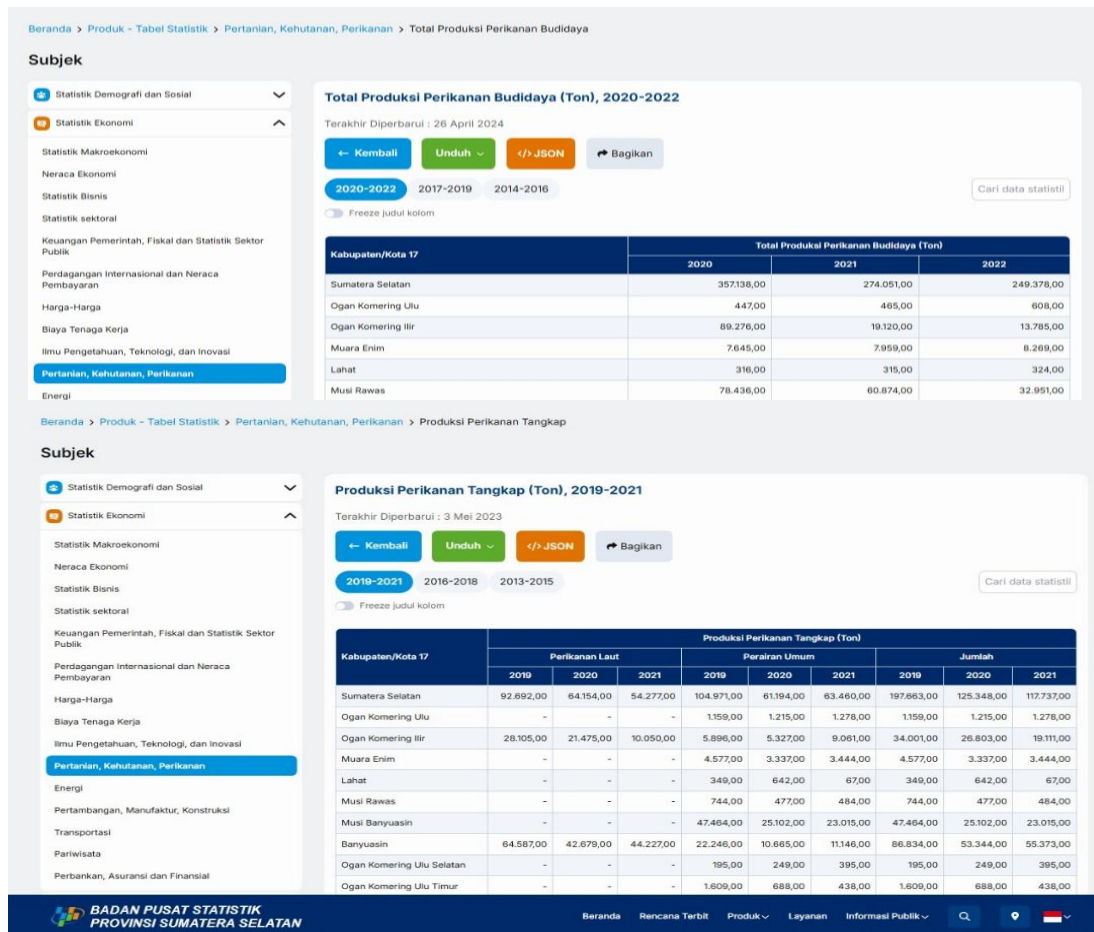
Sebagai Unit Kerja yang mendapatkan mandat strategis sebagai otak teknokratis pada Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sumatera Selatan, **Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan (PEP)** yang menjadi ujung tombak dalam perencanaan program dan pelaporan kinerja. Masalah utama yang selama ini terjadi adalah:

- a) **Belum optimalnya sistem penyusunan target dan capaian kinerja** berbasis data yang valid dan aktual. Hal ini ditandai dengan terjadinya ketidak seragaman capaian target kinerja pada sektor kelautan dan perikanan dalam hal ini produksi perikanan tangkap dan produksi perikanan budidaya sebagai akibat belum adanya Baseline data sebagai acuan, dapat dilihat pada dua tabel berikut ini:



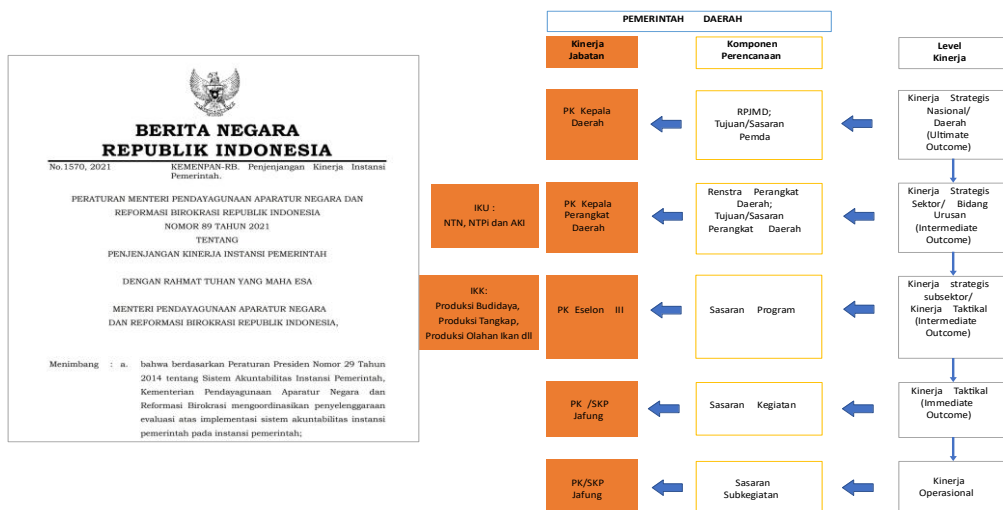
Gambar 1.4. Perbedaan capaian target kinerja (produksi perikanan tangkap dan Budidaya)

b) Masih kurangnya koordinasi, integrasi dan pembaruan data antar unit kerja / Bidang teknis pengampu data statistik. Hal ini menyebabkan akses Masyarakat dan Stakeholder masyarakat mengenai informasi data yang aktual sektor perikanan menjadi terbatas. Berikut adalah sajian data produksi perikanan tangkap dan budidaya oleh pada laman Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan (BPS Sumsel) yang belum *ter-update*. Dapat dilihat pada gambar berikut, Produksi perikanan budidaya baru pembaruan terahir 2022 sedangkan perikanan tangkap terahir update tahun 2021.



Gambar 1.5. Perbedaan capaian kinerja (produksi perikanan tangkap dan Budidaya)

c) **Belum tepatnya penyusunan/pengelompokan indikator** pembangunan kelautan dan perikanan pada dokumen Renstra 2019-2023 dan juga pada RPD DKP 2024-2026. Kedua dokumen tersebut belum mempedomani Permen PAN-RB Nomor 89 Tahun 2021 tentang penjenjangan kinerja instansi pemerintah dimanana seharusnya menyusun indikator kinerja secara berjenjang mulai dari yang paling berpengaruh terhadap capaian tujuan pembangunan (Kepala Dinas) samapi ke struktur dibawahnya secara berjenjang. terjadinya Ketidak sinkronan penyusunan dan pengelompokan ini mengakibatkan keterukuran pembangunan menjadi bias sehingga nilai akuntabilitasnya rendah. Berikut adalah diagram alur fikir akuntabilitas indikator yang dimaksud:



Gambar 1.6. Permenpan RB Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah

d) **Belum terimplementasinya Indikator Kesejahteraan Masyarakat (IKM) seperti NTN dan NTPi secara konsisten serta terfokus** dalam dokumen perencanaan (Renstra DKP 2019-2023) seperti yang tertuang dalam Lampiran Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama. Sebagai instansi yang tugas dan fungsinya mengelola Kelautan dan Perikanan, tentunya harus juga bersinergi

dengan Pemerintah Pusat yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.



SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		PENANGGUNG JAWAB
1.	Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat	1.	Indeks Kesejahteraan Masyarakat (IKM) kelautan dan perikanan	DJPRL, DJPT, DJPE, DJPDSPKP, BRSDMKP
2.	Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan	2.	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	DJPT
		3.	Luas kawasan konservasi	DJPRL

Gambar 1.7. Kepmen KKP-RI Nomor 36 Tahun 2023 tentang IKU

- e) **Potensi kehilangan sumber data lapangan** akibat kebijakan penghapusan tenaga honorer per Januari 2025. Keterbatasan penggunaan data ini akan semakin menghawatirkan dengan adanya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) Nomor 20 Tahun 2023 bahwa Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan aturan terkait dengan larangan bagi instansi pemerintah untuk melakukan rekrutmen tenaga honorer baru per 1 Januari 2025 dimana sebagian besar Penyuluh Perikanan dan PPTKP berstatus Honorer.
- f) **Belum optimalnya Penilaian terhadap SAKIP Dinas Kelautan Perikanan** oleh Inspektorat yang dikoordimasikan dengan Kemendagri dan Kemenpan-RB pada masa Renstra 2019-2023 dalam 5 tahun tersebut mendapatkan nilai B, sebagai akibat indikator capaian IKU dan IKK yang bias.

Kondisi ini menyebabkan keterbatasan dalam:

- Menyusun target kinerja yang tepat sasaran.
- Menghasilkan kebijakan dan program yang berbasis bukti (*evidence-based*).
- Mewujudkan sistem pelayanan publik yang akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan serta kesejahteraan masyarakat nelayan, pembudidaya ikan dan pelaku usaha pengolahan ikan.
- Perencanaan program dan kegiatan tidak sepenuhnya berbasis pada realitas lapangan.
- Evaluasi kinerja menjadi bias dan tidak menunjukkan dampak riil.
- Program bantuan dan intervensi menjadi tidak tepat sasaran.

Permasalahan-permasalahan yang telah diidentifikasi tersebut dapat dilihat secara lebih jelas apabila dibandingkan antara kondisi aktual saat ini dengan kondisi ideal yang diharapkan. Perbandingan ini penting untuk menunjukkan gap yang ada dan menjadi dasar penyusunan arah aksi perubahan yang tepat sasaran dan berbasis bukti.

Tabel 1.7. Perbandingan Kondisi Saat Ini dan Kondisi Yang Diharapkan

No.	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan
1	Data capaian kinerja berasal dari sumber berbeda dan belum terintegrasi	Tersedianya sistem terpadu untuk pengumpulan dan verifikasi data kinerja
2	Indikator lebih menekankan pada volume produksi	Indikator yang menggambarkan kesejahteraan seperti NTN dan NTPi
3	Perencanaan belum didukung baseline data yang akurat	Perencanaan berbasis evidence dengan baseline data valid dan terdokumentasi
4	Kurangnya kolaborasi antara unit teknis dengan BPS atau penyuluh	Adanya koordinasi dan integrasi lintas sektor data yang difasilitasi DKP

2. Penetapan Masalah yang dipilih

Untuk penentuan prioritas penyebab masalah identifikasi masalah dilakukan dengan menggunakan analisa USG Urgency, Seriousness, Growth. USG adalah salah satu alat untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan, dengan metode teknik scoring dengan menentukan skala nilai 1 – 5 atau 1 – 10. Caranya dengan menentukan tingkat urgensi dari penyebab masalah, keseriusan masalah yang dihadapi, serta kemungkinan berkembangnya masalah tersebut semakin besar. Isu prioritas merupakan isu yang memiliki total skor tertinggi. Analisa USG dilakukan dengan menentukan tingkat urgensi, keseriusan, dan perkembangan isu.

Dengan melihat adanya permasalahan tersebut di atas, perlu ditetapkan penyebab masalah prioritas agar penyelesaiannya dapat dilaksanakan secara bertahap dan lebih fokus kepada masalah utama. Untuk menetapkan penyebab masalah prioritas dilakukan melalui analisis USG sebagai berikut:

- 1) U (*Urgency*) yaitu Seberapa mendesak isu tersebut harus dibahas dan dihubungkan dengan waktu yang tersedia serta seberapa keras tekanan waktu tuntut memecahkan masalah yang menyebabkan isu tadi;
- 2) S (*Seriousness*) yaitu Seberapa serius isu tersebut perlu dibahas dan dihubungkan dengan akibat yang timbul dengan penundaan pemecahan masalah yang menimbulkan isu tersebut atau akibat yang menimbulkan masalah lain kalau masalah penyebab isu tidak dipecahkan.
- 3) G (*Growth*) yaitu Seberapa kemungkinan-kemungkinannya isu tersebut menjadi berkembang dikaitkan kemungkinan masalah penyebab isu akan makin memburuk jika dibiarkan.

Tabel 1.8. Identifikasi Masalah dan Analisis

No.	Identifikasi Masalah	U	S	G	Total	Prioritas
1	Belum optimalnya penyusunan target dan capaian kinerja berbasis data valid dan aktual	5	5	5	15	1
2	Ketergantungan pada tenaga honorer sebagai sumber data lapangan	4	4	4	12	4
3	Indikator kesejahteraan belum dimanfaatkan secara sistematis dalam dokumen perencanaan	5	4	5	14	2
4	Belum tersedia sistem digital dan SOP standar pengelolaan data lintas bidang sebagai baseline	4	5	4	13	3

Keterangan:

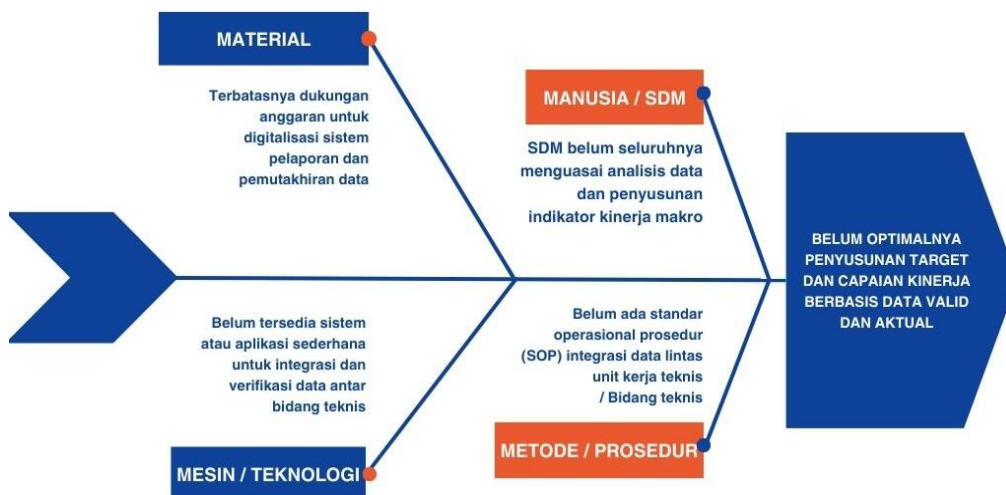
- | | |
|----------------------------|----------------------|
| U = Urgency (Kegawatan) | 1. Kurang bermasalah |
| S = Seriousness (Mendesak) | 2. Agak bermasalah |
| G = Growth (Pertumbuhan) | 3. Cukup bermasalah |
| | 4. Bermasalah |
| | 5. Sangat bermasalah |

Dari hasil identifikasi pokok masalah prioritas melalui metode USG diatas, yang pokok masalah prioritas adalah *Belum optimalnya penyusunan*

target dan capaian kinerja berbasis data valid dan aktual, masalah tersebut akan memberikan dampak negative terhadap kebijakan yang akan diambil dan dapat melahirkan Program/Kegiatan yang kurang tepat sasaran.

3. Penyebab Masalah

Analisis penyebab dilakukan dengan menggunakan pendekatan **Fishbone Diagram (Diagram Tulang Ikan)** sebagai berikut. Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor utama yang menjadi penyebab belum optimalnya penyusunan target dan capaian kinerja yang berbasis data valid dan aktual, dengan mengelompokkan penyebab ke dalam beberapa kategori faktor utama: manusia, metode, mesin dan material.



Gambar 1.8. Diagram Fishbone, untuk memetakan penyebab permasalahan.

Dengan fishbone diatas menjelaskan beberapa penyebab Belum optimalnya sistem penyusunan target dan capaian kinerja berbasis data valid dan aktual.

Kategori	Penyebab
Man	✓ SDM belum seluruhnya menguasai analisis data dan penyusunan indikator kinerja makro
Method	✓ Belum ada standar operasional prosedur (SOP) integrasi data lintas unit kerja teknis / bidang teknis

Kategori	Penyebab
Machine	✓ Belum tersedia sistem atau aplikasi sederhana untuk integrasi dan verifikasi data antar bidang teknis
Material	✓ Terbatasnya dukungan anggaran untuk digitalisasi sistem pelaporan dan pemutakhiran data

Dengan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa aksi perubahan sangat diperlukan untuk:

- Meningkatkan kapabilitas Subbagian PEP dalam menyusun indikator dan capaian kinerja,
- Membangun sistem data kinerja yang terstandarisasi dan terintegrasi,
- Menyesuaikan indikator capaian kinerja dengan indikator makro yang berdampak pada kesejahteraan.

G. Peningkatan Kualitas Pelayanan

1. Terobosan Inovasi

Dalam upaya meningkatkan akuntabilitas target dan capaian kinerja di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan, terobosan utama yang dilakukan adalah penerapan/implementasi indikator kinerja berbasis data yang valid dan aktual. Inovasi ini dilatarbelakangi oleh lemahnya integrasi data sektoral dan belum diimplementasikannya indikator yang lebih menggambarkan kesejahteraan pelaku usaha perikanan [Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)] ke dalam dokumen Renstra 2025 – 2029 serta penyesuaian perhitungan Angka Konsumsi Ikan (AKI) pada Dinas Kelautan dan sesuai dengan susunan IKU pada *Kepmen KKP-RI Nomor 36 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama* dan penerapan indikator kinerja yang lebih menggambarkan dukungan terhadap Visi dan Misi Gubernur/Wakil Gubernur terpilih seperti yang tertuang dalam Rancanag Awal RPJMD Sumatera Selatan tahun 2025-2029.

Upaya **Peningkatan Akuntabilitas Penyusunan Target dan Capaian Kinerja Berbasis Data Valid dan Aktual pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan** yang akan dilaksanakan secara sistematis dan bertahap sesuai dengan perencanaan yang telah dirancang. Pelaksanaan dimulai dengan tahap persiapan berupa konsultasi dan koordinasi lintas unit kerja, dilanjutkan dengan pembentukan Tim Efektif sebagai motor pelaksana kegiatan. Tahap berikutnya adalah penyusunan *baseline* data IKU dan IKK dari semua pemangku kepentingan guna menentukan target indikator yang akan ditetapkan.

Secara ringkas, terobosan/inovasi ini bertujuan untuk:

- 1) **Menerapkan indikator kinerja yang lebih representatif terhadap kesejahteraan masyarakat** kelautan dan perikanan pada Renstra baru 2025-2029 yang sesuai dengan :
 - *Kepmen KKP-RI Nomor 36 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama*
 - *Permen PAN-RB Nomor 89 Tahun 2021 tentang penjenjangan kinerja instansi pemerintah*
- 2) Memanfaatkan **Teknologi informasi** sederhana :
 - **Google Spreadsheet**
 - **Google form**dalam pengumpulan data sektoral bidang teknis sehingga penyusunan *baseline* data lebih efektif dan efisien.
- 3) Menyediakan ***baseline data digital***, yang mudah diakses dan lebih cepat dalam pengumpulan dan pencarian dibanding data konvensional berbasis *Non-Paperless*.
- 4) **Meningkatkan akuntabilitas pelaporan dan perencanaan** kinerja melalui sistem integrasi data aktual dan faktual.

Aksi perubahan ini mengusung beberapa terobosan strategis yang difokuskan pada peningkatan akuntabilitas target dan capaian kinerja di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sumatera Selatan. Salah satu terobosan utama adalah penggunaan data valid dan aktual dalam perencanaan dan pelaporan kinerja.

Pada tahap awal, terobosan ini bertujuan untuk memperbaiki kualitas data yang digunakan dalam evaluasi kinerja dan mendukung perencanaan berbasis bukti. Hal ini akan memungkinkan perencanaan yang lebih akurat serta meminimalisir risiko program yang tidak tepat sasaran. Salah satu langkah konkret adalah penyusunan format standar pengumpulan dan verifikasi data, yang dapat meningkatkan validitas data yang digunakan untuk evaluasi capaian target.

2. Kegiatan dan Milestone

Milestone dan kegiatan merupakan elem penting dalam aksi yang membantu untuk merencanakan, melaksanakan, dan memantau kemajuan Tahapan proyek perubahan yang dimaksud, adalah tahapan - tahapan yang direncanakan dapat dicapai dalam waktu yang singkat dan dapat dikerjakan oleh satu orang atau tim kecil dengan waktu 2 (dua) bulan.

Kegiatan milestone sangat berguna dalam aksi perubahan karena dapat memiliki tujuandan hasil yang jelas, memiliki waktu yang terukur.

Adapun tujuan dari Aksi Perubahan ini meliputi 3 (tiga) tujuan, yaitu:

1) Tujuan Jangka Pendek

- ✓ Konsultasi mentor dan melaporkan rencana implementasi pelaksanaan aksi perubahan yaitu Sekretaris DKP Sumsel.
- ✓ Pembentukan Tim Efektif
- ✓ Menyusunan format standar pengumpulan dan verifikasi data Indikator kinerja pembangunan kelautan dan perikanan 2025-2029 denga *Google Spreadsheet* dan *Google form*.
- ✓ Koordinasi dengan bidang teknis/UPTD terkait penyusunan target dan capaian kinerja, sehingga mendapat *baseline* data indikator dan capaian kinerja sektor kelautan dan perikanan yang valid dan bisa dijadikan dasar penyusunan dan penetapan indikator kinerja utama serta indikator kinerja kunci.
- ✓ Rapat Penyusunan target capaian indikator kinerja 5 (Lima) tahun yang akan datang (Renstra 2025-2029).
- ✓ Penyusunan Dokumen Renstra 2025-2029
- ✓ Koordinasi Draft Renstra dengan Bappeda, BPS Sumsel dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait
- ✓ Penyampaian Draft Dokument Renstra ke 17 Kab/Kota
- ✓ Ctak Dokumen Draft Renstra DKP Sumsel 2025-2029

2) Tujuan Jangka Menengah

- ✓ Penyusunan Draft laporan capaian target kinerja (LAKIP) berbasis data valid dan aktual secara berkelanjutan di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan.
- ✓ Penyusunan Rencana Program/Kegiatan TA. 2026 yang disesuaikan dengan hasil evaluasi indikator kinerja serta didasarkan pada Renstra 2025-2029.

3) Tujuan Jangka Panjang

- ✓ Penyusunan Laporan evaluasi penerapan RENSTRA DKP 2025–2029 dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SKIP) yang mendukung terwujudnya *Good governance*.
- ✓ Tercapainya Penilaian Predikat A pada SAKIP DKP Sumsel.

Tabel 1.9. Milestone Kegiatan

No	Milestone	Kegiatan	Waktu	Output
A. Jangka Pendek (2 Bulan)				
1	Konsultasi mentor dan melaporkan rencana implementasi pelaksanaan aksi perubahan	<ul style="list-style-type: none"> ○ Menjelaskan aksi perubahan ○ Meminta saran dan arahan 	9 Mei 2025	Foto Dokumentasi
2	Pembentukan Tim Efektif	Membuat penetapan SK Tim Efektif <ul style="list-style-type: none"> • Koordinator Statistik Perikanan Provinsi • Koordinator Validator data Bidang teknis • Koordinator Perencanaan • Koordinator Monev DKP • Koordinator Penyuluh PPTKP • Staf Subbag PEP 	14-15 Mei 2025	SK Tim Efektif dan Dokumentasi
3	Penyusunan Format Pengumpulan & Verifikasi Data (Baseline data) serta indikator IBEI	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan format standar pengumpulan dan verifikasi data kinerja dengan Tim Efektif • Pengumpulan data Indikator Ekonomi Biru (IBEI) sebagai komponen Penyusunan Renstra 2025-2029 	16 – 21 Mei 2025	<ul style="list-style-type: none"> ○ Data IKU-IKK (<i>Google Spreadsheet / Google form</i>) ○ Data IBEI
4	Koordinasi dengan Bidang Teknis/UPTD BPS Sumsel	<ul style="list-style-type: none"> ○ Rapat koordinasi penyusunan target dan capaian kinerja berbasis data valid Bidang Teknis dan UPTD (Validator Bidang) ○ Koordinasi penyusunan target dan capaian kinerja berbasis data valid dengan BPS Sumsel 	22 – 30 Mei 2025	Dokumen Indikator Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan
5	Pengumpulan Data Capaian Kinerja dan Penyusunan Target Capaian Kinerja 2025-2029	<ul style="list-style-type: none"> ○ Mengumpulkan data indikator kinerja yang valid dan dapat dijadikan dasar penyusunan target dengan 	2 – 5 Juni 2025	Dokumen Data Capaian Kinerja Dan Dokumen Target Capaian Kinerja 2025-2029

No	Milestone	Kegiatan	Waktu	Output
		<ul style="list-style-type: none"> o Menyusun target capaian kinerja 5 tahun yang akan datang berdasarkan data yang dikumpulkan. 		
6	Penyusunan Renstra 2025-2029	<ul style="list-style-type: none"> o Rapat Finalisasi Penyusunan dokumen Renstra 2025-2029 yang mencakup target dan capaian kinerja berdasarkan data yang valid dan terintegrasi. o Penyusunan dokumen Renstra 2025-2029 o Koordinasi dengan Bappeda tentang Draft dokumen Renstra 2025-2029 o Penyempurnaan Draft dokumen Renstra 2025-2029 o Penyampaian dokumen Renstra 2025-2029 ke Dinas Perikanan Kab/Kota o Cetak dokumen Renstra 2025-2029 	9 Juni – 4 Juli 2025	Dokumen Renstra 2025-2029
B. Jangka Menengah (6 Bulan)				
1	Penyusunan Program/Kegiatan 2026	Rapat Penyusunan dan Evaluasi Program/Kegiatan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Renstra 2025–2029.	Minggu IV Agustus 2025	Dokumen Renja 2026
2	Implementasi Evaluasi Indikator & Target	Implementasi evaluasi indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra 2025–2029.	Minggu IV Desember 2025 – Minggu I Januari 2026	Laporan Evaluasi Indikator (Lakip)
C. Jangka Panjang (1–2 Tahun)				
1	Pengajuan Penilaian Dokumen LAKIP DKP Sumsel dengan nilai Optimal	Meningkatkan pelaporan yang berbasis data valid dan aktual untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan kinerja sektor kelautan dan perikanan.	Desember - Januari 2025	Dokumen Laporan Akuntabilitas, Sistem Pelaporan
2	Penyusunan Laporan evaluasi penerapan RENSTRA DKP	Penyusunan dan penyesuaian hasil evaluasi data ke dalam dokumen Rencana Strategis 2025–2029.	2026-2027	Dokumen Renstra 2025-2029, penyesuaian/Perbaikan

Tabel 1.10. Jadwal / Milestone Kegiatan

No	Milestone / Kegiatan	MEI/ MINGGU KE/ Tanggal					JUNI/ MINGGU KE/Tanggal										JULI/ MINGGU KE-																						
		2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4																						
		9	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27	28	2	3	4	5	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	1	2	3	4		
1	Konsultasi mentor dan melaporkan rencana																																						
	- Menjelaskan rancangan aksi perubahan	■																																					
	- Meminta saran dan arahan	■	■																																				
	- Meminta saran dan arahan atas Perkembangan Aksi Perubahan	■	■			■					■												■													■			
2	Pembentukan Tim Efektif																																						
	- Membuat penetapan SK Tim Efektif		■	■																																			
	•Koordinator Statistik Perikanan Provinsi •Koordinator Validator data Bidang teknis •Koordinator Perencanaan •Koordinator Monev DKP •Koordinator Penyuluh PPTKP •Staf Subbag PEP		■	■																																			
3	Penyusunan Format Pengumpulan & Verifikasi Data																																						
	- Penyusunan format standar pengumpulan dan verifikasi data kinerja dengan Tim Efektif (Google Spreadsheet / Google form)		■	■	■	■	■																																
4	Koordinasi dengan Bidang Teknis/UPTD																																						
	- Rapat koordinasi penyusunan target dan capaian kinerja berbasis data valid dengan Bidang teknis dan UPTD (validator Bidang)							■	■	■	■																												
	- Rapat koordinasi penyusunan target dan capaian kinerja berbasis data valid dengan Bappeda Sumsel							■					■																									■	
	- Rapat koordinasi penyusunan target dan capaian kinerja berbasis data valid dengan BPS Sumsel																																					■	
5	Pengumpulan Data Capaian Kinerja dan Penyusunan																																						
	- Mengumpulkan data indikator kinerja yang valid dan dapat dijadikan dasar penyusunan target.												■	■	■																								
	- Menyusun target capaian kinerja 5 tahun yang akan datang berdasarkan data yang dikumpulkan.																																						
6	Penyusunan Renstra 2025-2029																																						
	- Rapat Penyusunan Rancangan Awal Dokumen Renstra 2025-2029 yang mencakup target dan capaian kinerja berdasarkan data yang valid dan terintegrasi																																						
	- Penyusunan Rancangan Awal Dokumen Renstra 2025-2029																																						
	- Koordinasi dengan Bappeda tentang draft dokumen Renstra 2025-2029																																						
	- Penyempurnaan Draft Dokumen Renstra 2025-2029																																						
	- Penyampaian Draft Dokumen Renstra 2025-2029 ke Kab/Kota																																						
	- Cetak Dokumen Renstra 2025-2029																																						

BAB II.

DESKRIPSI PROSES KEPEMIMPINAN

A. Membangun Integritas Kinerja Pelayanan

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan memiliki fungsi utama dalam mengoordinasikan penyusunan rencana strategis, rencana kerja tahunan, serta pelaporan kinerja berdasarkan data yang valid dan objektif. Dalam konteks tersebut, integritas dipahami sebagai pondasi utama dalam seluruh proses perencanaan dan evaluasi kebijakan.

Untuk membangun integritas dalam kinerja pelayanan publik, langkah-langkah konkret yang dilakukan antara lain:

- 1) **Mendorong transparansi dalam setiap tahapan perencanaan**, mulai dari pengumpulan data hingga pelaporan capaian kinerja.
- 2) **Menolak manipulasi data capaian**, yang hanya bertujuan memperoleh penilaian administratif tanpa mencerminkan kondisi riil masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan.
- 3) **Menggunakan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan**, yang diperoleh dari penyuluh, PPTKP, serta data resmi dari BPS.
- 4) **Mengintegrasikan indikator kesejahteraan** seperti Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai Tukar Petani Ikan (NTPI) serta penyesuaian Angka Konsumsi Ikan (AKI) ke dalam sistem perencanaan dan pelaporan kinerja.
- 5) **Melibatkan multipihak dalam proses penyusunan dan verifikasi capaian kinerja**, untuk menciptakan akuntabilitas yang berlapis dan memperkuat kepercayaan antarunit kerja.

Aksi perubahan ini menjadi sarana strategis untuk memperbaiki kebiasaan penyusunan target dan capaian yang sebelumnya masih bersifat normatif dan cenderung administratif. Dengan mengadopsi indikator yang terukur dan

berdampak langsung terhadap kesejahteraan pelaku usaha perikanan, integritas kinerja pelayanan dapat dibuktikan secara nyata.

Integrasi indikator tersebut secara khusus dituangkan ke dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029. Hal ini memperkuat posisi DKP sebagai institusi publik yang memiliki akuntabilitas tinggi dalam proses perencanaan dan pelaporan, serta menunjukkan kontribusi konkret terhadap pembangunan daerah dan nasional yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat pesisir dan pelaku usaha kelautan dan perikanan.

B. Pengelolaan Pelayanan (Pemanfaatan Teknologi Informasi)

Dalam era digital yang dinamis dan menuntut percepatan pelayanan publik, pemanfaatan teknologi informasi menjadi elemen krusial dalam memperkuat peran Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) sebagai pusat kendali data dan indikator kinerja di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan. Teknologi tidak hanya menjadi alat bantu, tetapi sebagai sistem pendukung utama dalam menyusun kebijakan berbasis bukti yang terverifikasi.

➤ Digitalisasi format pengumpulan dan verifikasi data

Saya merancang format digital pengumpulan data capaian kinerja menggunakan *Google Form* dan *Spreadsheet* yang dikoordinatori oleh Validator Statistik Bidang teknis dan dapat diakses oleh seluruh validator di 17 Kabupaten/Kota. Langkah ini meminimalisir kehilangan data dan mempermudah pencarian dibandingkan dengan pengumpulan data manual serta yang paling penting adalah mempercepat proses agregasi data.

- **Pemanfaatan Cloud System (Google Drive) untuk Sistem dokumentasi berbasis digital sederhana.**

Seluruh dokumen perencanaan yang bukan Rahasia Negara, Capaian Indikator Pembangunan Perikanan, Berita Acara Rapat Koordinasi Program/Kegiatan dan bahan rapat diunggah dalam satu sistem penyimpanan bersama (Google Drive) yang dikelola oleh Subbag PEP. Hal ini mempermudah dalam pencarian dokumen serta akses informasi yang real-time antar bidang. Praktik ini memperkuat nilai akuntabilitas dan efisiensi dalam manajemen pelayanan publik

- **Koordinasi melalui media digital (WhatsApp Group)**

Dalam rangka mengatasi keterbatasan akses karena aspek geografis, saya memanfaatkan grup WhatsApp yang beranggotakan Pejabat Pengampu Perencana Program Seluruh Kab/Kota untuk koordinasi dan Penyampaian Draft Renstra yang cepat..

C. Pengelolaan Tim

Sebagai Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan (PEP), saya menyadari bahwa keberhasilan aksi perubahan tidak hanya ditentukan oleh inovasi teknis dan sistem digitalisasi, tetapi juga oleh **pengelolaan tim kerja yang solid dan kolaboratif**. Dalam konteks ini, kepemimpinan saya menekankan pada pembentukan **Tim Efektif** yang mampu bergerak lintas unit kerja, menyatukan keahlian, dan bekerja secara terstruktur untuk menyusun indikator kinerja yang akuntabel.

- **Pembentukan Tim Efektif**

Saya memprakarsai pembentukan Tim Efektif yang terdiri dari perwakilan Bidang Teknis, Penyuluh, Validator Data, dan Staf Subbag PEP. Pemilihan anggota tim didasarkan pada kompetensi teknis, integritas, dan kesiapan untuk bekerja dalam suasana kolaboratif.

- **Identifikasi peran dan pembagian tugas berdasarkan keahlian**

Saya melakukan pemetaan potensi setiap anggota dan mendistribusikan tugas sesuai kompetensi. Misalnya: anggota dari bidang perikanan tangkap bertugas mengelola data produksi; dari perikanan budidaya mengelola indikator NTPi; dan dari pengembangan usaha fokus pada data AKI. Subbag PEP sendiri menjadi pengolah akhir data dan pengendali kualitas.

- **Pendekatan kepemimpinan partisipatif dan coaching**

Dalam setiap koordinasi dan evaluasi, saya menerapkan pendekatan coaching—mendorong anggota tim untuk aktif memberikan ide, menyampaikan kendala, serta menyusun solusi bersama. Setiap keberhasilan tim merupakan hasil dialog dan pembelajaran bersama, bukan instruksi satu arah.

- **Motivasi dan penguatan peran anggota tim**

Saya memberikan kesempatan kepada setiap anggota tim untuk tampil sebagai narasumber dalam forum internal, menyampaikan hasil kerja, dan berdiskusi langsung dengan stakeholder. Hal ini meningkatkan kepercayaan diri, rasa kepemilikan, serta menguatkan integritas individu.

- **Evaluasi kinerja tim secara periodik**

Setiap minggu dilakukan evaluasi kerja melalui rapat daring/luring, membahas progres pengumpulan data, kendala lapangan, dan penyesuaian indikator. Laporan hasil kerja masing-masing bidang dikompilasi dan dianalisis secara terbuka.

- **Pengelolaan konflik secara adaptif**

Dalam menghadapi perbedaan pendapat, saya mendorong penyelesaian dengan pendekatan rasional, dialogis, dan berdasarkan data. Konflik yang muncul dijadikan sebagai momentum untuk refleksi dan penyempurnaan strategi.

BAB III.

DESKRIPSI HASIL KEPEMIMPINAN

A. Capaian dan Perbaikan Kinerja Pelayanan

Implementasi aksi perubahan yang berjudul "Peningkatan Akuntabilitas Target dan Capaian Kinerja dengan Menggunakan Data yang Valid dan Aktual" telah menunjukkan hasil konkret yang signifikan terhadap perbaikan tata kelola perencanaan dan pelaporan di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan. Sebagai Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP), saya memimpin langsung seluruh proses dari hulu ke hilir—dimulai dari pembentukan tim, penyusunan format, verifikasi data, hingga finalisasi indikator dan target capaian.

Capaian utama yang telah terlaksana, antara lain:

- 1. Melapor dan berkonsultasi dengan Mentor.** Tahapan kegiatan (milestone) jangka pendek pada Aksi Perubahan yang pertama di mulai dengan membangun kesepahaman dengan stekholder internal yaitu dengan Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan, sekaligus sebagai mentor, konsultasi ini dilakukan beberapa kali pada awal bulan Mei tahun 2025. Konsultasi ini dilakukan dalam rangka memastikan bahwa judul aksi perubahan yang diambil benar-benar mencerminkan substansi dan tujuan utama yang ingin dicapai, maka diperlukan proses validasi dan penyelarasan konsep. Oleh karena itu, dilakukan konsultasi dan diskusi langsung dengan Mentor pembimbing sebagaimana terlihat pada dokumentasi kegiatan. Melalui konsultasi ini, diperoleh masukan bahwa judul aksi perubahan tidak sekadar menjadi identitas formal, tetapi harus secara langsung menggambarkan isi, ruang lingkup, serta arah capaian yang dituju dalam pelaksanaan aksi perubahan tersebut. Proses ini bertujuan agar seluruh tahapan aksi dapat berjalan lebih terarah, sistematis, dan akuntabel sesuai dengan prinsip penyusunan aksi perubahan yang efektif.



Gambar 3.1. Konsultasi dengan Mentor

2. **Pembentukan Tim Efektif.** Dalam rangka mendukung kelancaran dan efektivitas pelaksanaan aksi perubahan ini, telah dibentuk Tim Efektif yang bertugas melaksanakan berbagai tahapan dan kegiatan aksi perubahan secara terkoordinasi dan bertanggung jawab.

Tim Efektif ini terdiri dari beberapa unsur dan memiliki tugas serta fungsi sebagai berikut:

a) Koordinator Data dan Informasi

- Bertanggung jawab mengelola dan mengkoordinasikan pengumpulan, verifikasi, serta validasi data sektor kelautan dan perikanan dari seluruh unit kerja dan kabupaten/kota.
- Menyusun format standar pengumpulan data serta memastikan kesesuaian data dengan sumber resmi seperti BPS dan PPTKP.
- Menyediakan data baseline dan data series untuk mendukung penyusunan dokumen Renstra DKP Provinsi Sumatera Selatan 2025–2029.

b) Koordinator Perencanaan

- Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan strategis berbasis data valid, termasuk penyusunan indikator capaian kinerja utama seperti NTN, NTPI, dan AKI.
- Menyusun rencana kerja tahunan, program, dan kegiatan yang sejalan dengan capaian kinerja yang telah ditetapkan.
- Mengintegrasikan masukan dan kebutuhan dari bidang teknis serta unit pelayanan lainnya di DKP Provinsi Sumatera Selatan.

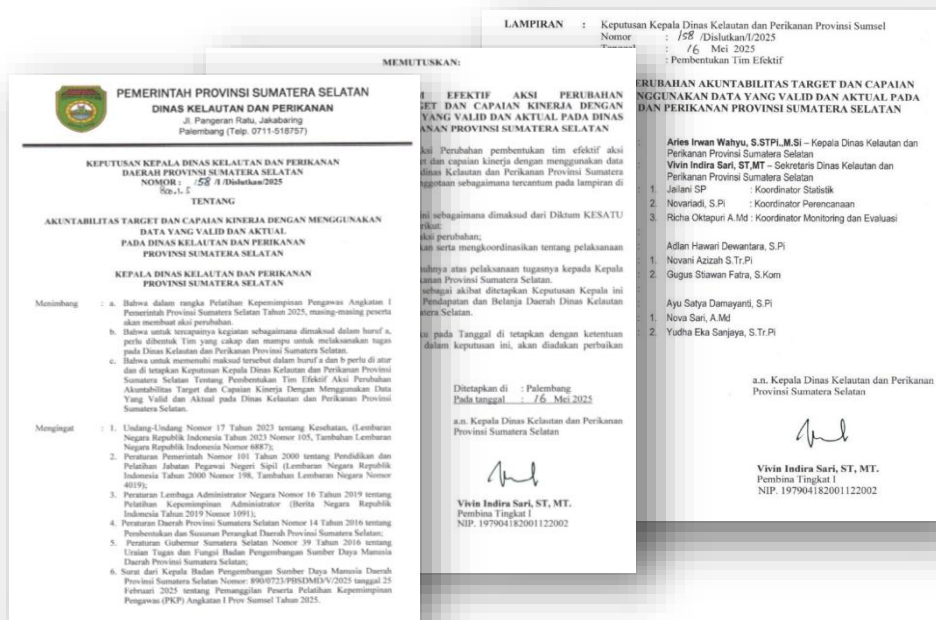
c) Koordinator Monitoring dan Evaluasi

- Melaksanakan fungsi pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengumpulan data dan penyusunan dokumen perencanaan.
- Menyusun laporan evaluasi kinerja secara berkala untuk memastikan bahwa hasil aksi perubahan berjalan sesuai dengan tujuan dan target yang telah ditetapkan.
- Melakukan tindak lanjut terhadap hasil monitoring dan evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan.

d) Anggota Tim Efektif

- o Berasal dari unsur Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) serta dari Bidang Teknis di DKP Provinsi Sumatera Selatan.
- o Melaksanakan tugas operasional pengumpulan data, penginputan, validasi, serta pendukung teknis dalam penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan.
- o Berpartisipasi aktif dalam rapat koordinasi, diskusi teknis, dan sosialisasi internal terkait pelaksanaan aksi perubahan.

Pembentukan Tim Efektif ini bertujuan menciptakan tata kelola yang sistematis, memastikan keterlibatan lintas unit kerja, serta menjaga akuntabilitas dan validitas data sebagai dasar perencanaan dan evaluasi kinerja di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan.



Gambar 3.2. SK TIM Efektif



Gambar 3.3. Rapat Pembentukan TIM Efektif

- 3. Rapat Penyusunan Format Pengumpulan & Verifikasi Data (Baseline data) serta indikator IBEI.** Rapat ini dihadiri oleh Tim Efektif yang terdiri dari Koordinator Data dan Informasi, Koordinator Perencanaan, Koordinator Monitoring dan Evaluasi, serta perwakilan validator dari bidang teknis di lingkungan DKP Provinsi Sumatera Selatan. Penyusunan format standar pengumpulan data capaian kinerja menggunakan Google Form yang terhubung langsung dengan Google Spreadsheet, sehingga memungkinkan penginputan data secara real time dan terintegrasi dari berbagai sumber. Melalui penggunaan format digital ini, diharapkan terjadi percepatan dan efisiensi dalam proses pengumpulan data, sekaligus meningkatkan akurasi dan validitas data yang akan digunakan sebagai baseline dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) DKP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029.



Gambar 3.4. Rapat Pembuatan Format *Google form/Spreadsheet*

**PERMINTAAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**
Jl. Pangeran Ratu - Jakabaring Telp.0711-518757 Fax.0711-518757
PALEMBANG

NOTA DINAS

Dari : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan
Kepada Yth. : Sekretaris, Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Kepala Bidang Perikanan Budidaya, Kepala Bidang PUPMHPK dan Kepala Bidang PRL, PUD & PSDKP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan

Nomor : 500.5/2731/Dislutan/2025
Tanggal : 16 Mei 2025
Perihal : Permintaan Data terkait 44 Indikator Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)

ISI

Menindaklanjuti Surat dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Nomor : 697/D.07/PP.02.01/06/2025 tanggal 13 Mei 2025 hal permintaan Data terkait 44 Indikator Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI), untuk Renstra DKP TA. 2025-2029, kami mohon kepada Saudara/i untuk :

- Menyampaikan Data terkait 44 Indikator Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI) terlampir. Data yang diminta mencakup periode Tahun 2022 s/d TW II Tahun 2025;
- Template dan Panduan dalam pengisian dapat diunduh di link : https://link.bappenas.go.id/UsulanIndikatorIBEI2024_Daerah
- Dokumen excel yang sudah diisi tersebut mohon untuk dapat disampaikan ke subbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Kelautan dan Perikanan paling lambat Jum'at, 20 Mei 2025;
- Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi subbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Kelautan dan Perikanan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**AN. KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**
Sekretaris,

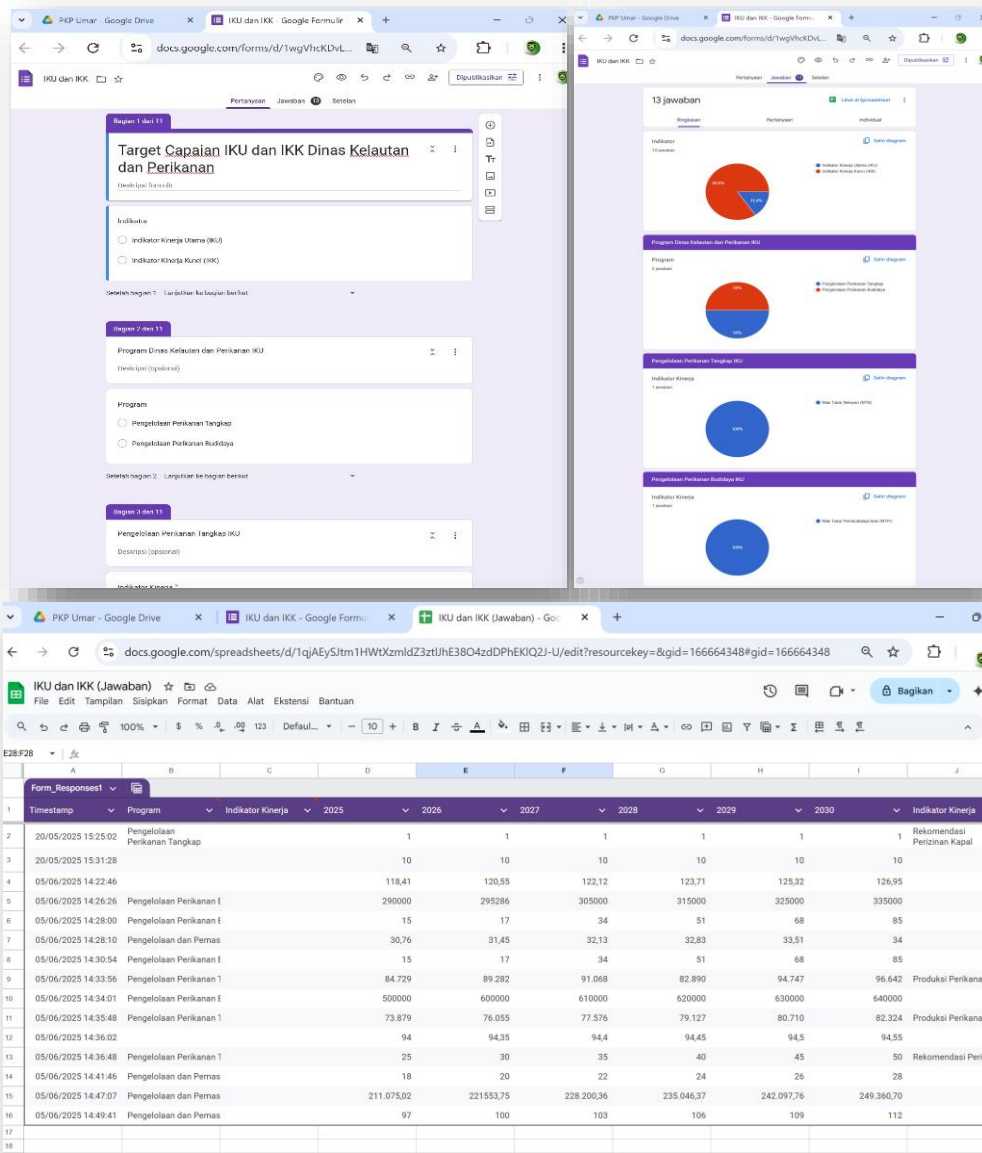
(Signature)

**VIVIN INDIRA SARI, S.T., M.T.
PEMBINA TINGKAT I / IV b
NIP. 197904182001122001**

Satuan	Target Capaian Indikator Besaran Sempai Tahun 2030						GPD Penanggung Jawab			
	2026	Satuan	2027	Satuan	2028	Satuan		2029	Satuan	2030
1.38	%	1.66	%	1.99	%	2.38	%	2.86	%	
45.474	ton	47.748	ton	50.136	ton	52.642	ton	55.274	ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
489.213	ton	484.708	ton	500.721	ton	517.398	ton	534.493	ton	
303.908	ton	316.052	ton	328.705	ton	341.853	ton	355.627	ton	
185.337	ton	168.644	ton	172.017	ton	175.457	ton	178.968	ton	
60.051	unit	69.396	unit	69.743	unit	70.091	unit	70.442	unit	
748	ton	754	ton	768	ton	785	ton	800	ton	Dinas Kelautan dan Perikanan / Dinas Perdagangan
3	unit	4	unit	4	unit	4	unit	4	unit	
10	%	15	%	15	%	20	%	25	%	
186.885	orang	187.140	orang	187.395	orang	187.650	orang	187.910	orang	Dinas Kelautan dan Perikanan
52.877		51.132		51.387		51.642		51.897		
136.008		136.008		136.008		136.008		136.008		
4.225	orang	4.225	orang	4.225	orang	4.225	orang	4.225	orang	

Gambar 3.5. Nota Dinas dan lampiran ringkasan isi, Permintaan Penyusunan Indikator Kinerja Bidang teknis dan IBEI

4. **Tersusunnya format digital pengumpulan dan verifikasi data.** Formulir Google dan spreadsheet berbasis cloud digunakan untuk pengumpulan data sektoral dari 17 Kabupaten/Kota.



Gambar 3.6. Googleform dan Preadsheet telah terisi data IKU dan IKK

Selain validator bidang teknis, penyuluh perikanan yang bertugas di lapangan juga diberikan akses terhadap Google Form dan Google Spreadsheet yang telah disusun. Dengan demikian, penyuluh dapat turut serta dalam melakukan input dan verifikasi awal data dari lapangan, khususnya terkait data produksi dan kondisi kesejahteraan nelayan dan petani ikan di wilayah binaan masing-masing.

5. Rapat dengan Koordinator dan Validator Statistik Bidang Teknis.

Validator Statistik ini merupakan dari perwakilan bidang teknis (budidaya, tangkap dan pengolahan) serta validator data Provinsi.



Gambar 3.7. Rapat dengan Koordinator/Validator data statistik bidang

Dalam rapat ini ditegaskan bahwa Koordinator dan Validator Statistik tersebut adalah petugas yang memiliki tanggung jawab langsung terhadap pengelolaan dan keakuratan data sektoral di bidang masing-masing. Validator Statistik bertugas memverifikasi, mengoreksi, dan memastikan data yang dikumpulkan dari lapangan, baik dari internal provinsi maupun dari kabupaten/kota, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Adapun inti pembahasan dalam rapat tersebut meliputi:

- Penegasan Peran dan Tanggung Jawab Validator Statistik

Validator Statistik dari tiap bidang bertanggung jawab menjaga validitas data sektoral di bidangnya, termasuk memverifikasi data yang diinput oleh penyuluh perikanan dari 17 kabupaten/kota di Sumatera Selatan.

- Pelatihan Penggunaan Form Digital

Untuk mendukung proses pengumpulan data yang lebih cepat dan efisien, dalam rapat ini Validator Statistik dilatih menggunakan form digital berbasis Google Form dan Google Spreadsheet yang telah disiapkan oleh Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan (PEP).

Form digital ini akan menjadi instrumen utama dalam proses pengumpulan data capaian produksi perikanan budidaya, perikanan tangkap, serta pengolahan hasil perikanan.

- Akses dan Pemanfaatan oleh Penyuluh

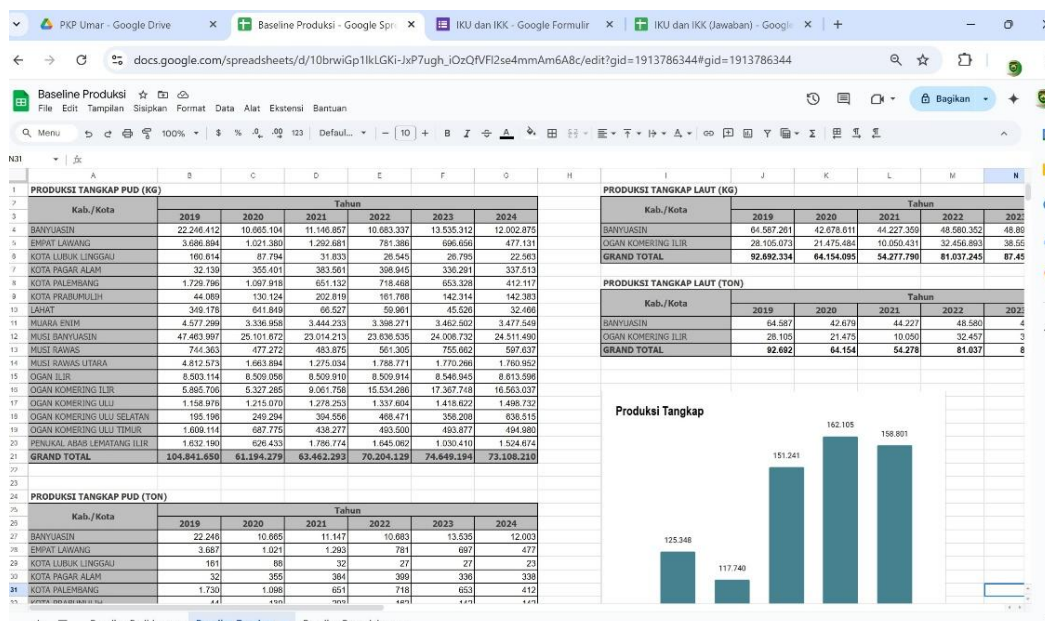
Form digital yang telah disusun tidak hanya digunakan oleh Validator Statistik di tingkat provinsi, tetapi juga akan digunakan dan diakses langsung oleh penyuluh perikanan di 17 kabupaten/kota. Penyuluh akan mengisi data sesuai wilayah tugas mereka, sementara Validator Statistik bertugas melakukan verifikasi dan pengesahan data tersebut sebelum dikonsolidasikan di tingkat provinsi.

- Penguatan Komitmen Keseragaman Data

Melalui rapat ini, disepakati bersama bahwa dengan adanya form digital yang seragam dan mekanisme verifikasi berjenjang oleh Validator Statistik, diharapkan tidak ada lagi perbedaan penyajian data antar bidang maupun antar daerah, sehingga baseline data yang digunakan dalam dokumen perencanaan seperti Renstra 2025–2029 benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Rapat ditutup dengan simulasi pengisian form digital dan Foto dukungan terhadap Aksi Perubahan yang sedang dilakukan.

6. Penyusunan baseline capaian indikator kinerja. Data Produksi Budidaya, Produksi Tangkap, NTN, NTPi, dan AKI berhasil dirangkum dan digunakan sebagai dasar penyusunan target RENSTRA 2025–2029.



Gambar 3.8. Spreadsheet Pengumpul data sebagai Baseline terupdate

7. Rapat Penyusunan Draft Renstra DKP 2025-2029 dengan Bidang Teknis sebagai upaya Pengelompokan indikator kinerja yang lebih relevan dan penentuan target kinerja sektoral. Indikator tidak hanya berbasis volume produksi, tetapi juga kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan serta Pengolah/Pemasar. Kemudian dibahas juga mengenai tatanaskah Dokumen Renstra 2025-2029.

Rapat ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan mengintegrasikan data sektoral yang berasal dari masing-masing bidang teknis, yaitu Bidang Perikanan Budidaya, Bidang Perikanan Tangkap, dan Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, serta dari UPTD terkait yang beroperasi di lapangan.


Adapun hal-hal utama yang dibahas dalam rapat meliputi:

- ✓ **Penyelarasan Data Baseline dan Target Capaian Kinerja**
Setiap bidang teknis dan UPTD memaparkan data realisasi capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya serta usulan target lima tahun ke depan. Proses ini dilakukan dengan berbasis data valid yang telah diverifikasi melalui sistem pengumpulan data digital, sehingga baseline yang digunakan dalam dokumen Renstra DKP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029 benar-benar mencerminkan kondisi aktual.
- ✓ **Integrasi Indikator Nasional dan Daerah**, Dalam rapat ini juga disepakati bahwa indikator capaian kinerja yang digunakan harus mengacu pada indikator utama nasional seperti Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai Tukar Petani Ikan (NTPi) sebagai indikator Kesejahteraan, serta Angka Konsumsi Ikan (AKI) sebagai pengukur laju pertumbuhan sektor perikanan, yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Seluruh bidang teknis dan UPTD diminta memastikan bahwa pengumpulan dan penyajian data di masing-masing unit telah sesuai dengan standar tersebut.



Gambar 3.9. Rapat dengan Bidang Teknis dan UPTD dalam Penyusunan Renstra DKP 2025-2029

✓ Penerapan Indikator Kesejahteraan Masyarakat (IKM) ke dalam Penyusunan Dokumen Renstra DKP 2025-2029.




KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2023
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pengukuran dan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2023
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNG JAWAB
1. Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat	1. Indeks Kesejahteraan Masyarakat (IKM) kelautan dan perikanan	DJPRL, DJPT, DJPB, DJPDSPKP, BRSDMKP
2. Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan	2. Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	DJPT
	3. Luas kawasan konservasi	DJPRL



Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN				
			2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Ikan	Meningkatnya nilai tukar pelaku utama kelautan dan perikanan	Nilai Tukar Nelayan/NTN	117,50	117,87	118,18	118,45	118,92
		Nilai Tukar Pembudidaya Ikan/ NTPi	94,32	94,47	94,51	94,64	94,80

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama PD

INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN				
		2025	2026	2027	2028	2029
Nelayan/NTN	Nilai	117,50	117,87	118,18	118,45	118,92
Pembudidaya Ikan (NTPi)	Nilai	94,32	94,47	94,51	94,64	94,80

Gambar 3.10. Penerapan Indikator Kesejahteraan Masyarakat (IKM) ke dalam Penyusunan Dokumen Renstra DKP 2025-2029

Implementasi Indikator Kesejahteraan Masyarakat (IKM) yakni NTN dan NTPI sebagai Indikator Kinerja Utama dalam dokumen perencanaan Renstra DKP 2025-2029 merupakan amanah dari Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama, selain itu penerapan ini juga senada dengan Permen PAN-RB Nomor 89 Tahun 2021 tentang penjenjangan kinerja instansi pemerintah yang mana telah menempatkan Indikator Kesejahteraan menjadi Tujuan Utama Organisasi Pemerintah.

8. Rapat Koordinasi RENSTRA PD 2025–2029 dengan Bappeda dan OPD terkait di sektor pertanian.



Gambar 3.11. Rakor Penyusunan Dokumen Renstra 2025-2029

Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029 yang lebih terintegrasi dan akuntabel, telah dilaksanakan rapat koordinasi yang dipimpin oleh Bappeda Provinsi Sumatera Selatan melalui Bidang Perekonomian, bersama perangkat daerah sektor pertanian termasuk di dalamnya perikanan. Rapat ini dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan, serta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan, dengan agenda utama membahas penetapan dan penyelarasan indikator kinerja utama (IKU) masing-masing perangkat daerah.

Adapun pokok pembahasan yang disepakati dalam rapat tersebut adalah:

1. Penetapan dan Penyelarasan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Masing-masing perangkat daerah memaparkan indikator kinerja utama yang menjadi tolok ukur keberhasilan program dan kegiatan di sektor masing-masing. Untuk sektor perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan bahwa indikator kinerja utama yang telah ditetapkan mengacu pada standar Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, yaitu:

- Nilai Tukar Nelayan (NTN)
- Nilai Tukar Petani Ikan (NTPI)
- Angka Konsumsi Ikan (AKI)

Bappeda menegaskan bahwa indikator tersebut wajib dicantumkan dalam Renstra DKP dan diselaraskan dengan dokumen perencanaan daerah lainnya.

2. Kepatuhan terhadap Sistematisa dan Ketentuan Penyusunan Renstra

Bappeda mengingatkan bahwa dalam menyusun Renstra 2025–2029, seluruh perangkat daerah wajib mematuhi sistematisa yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan Permendagri maupun pedoman dari Bappeda Provinsi Sumatera Selatan. Selain itu, perangkat daerah juga wajib memperhatikan dan mengikuti aturan tambahan yang ditetapkan oleh instansi vertikal masing-masing sektor, misalnya petunjuk teknis penyusunan Renstra dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

9. Koordinasi penyusunan target dan capaian kinerja berbasis data valid dengan BPS Sumsel.



NOTULEN RAPAT KOORDINASI

Hari/Tanggal : Jum'at / 20 Mei 2025
Tempat : Ruang Rapat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi

Agenda:

Koordinasi dan Sinkronisasi Data Sektor Kelautan dan Perikanan untuk Penyusunan Renstra DKP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029

Peserta Rapat:

- Kepala Sub. Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan beserta Tim Pengelola Statistik DKP
- Pejabat Fungsional Statistik BPS Provinsi Sumatera Selatan beserta Tim Teknis

Hasil Pembahasan:

1. Telah dikordinasikan dan disepakati bahwa baseline data sektor kelautan dan perikanan yang terkumpul pada Google Spreadsheet dan Google form serta digunakan dalam draft Renstra DKP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 telah sinkron dan selaras dengan data resmi BPS Provinsi Sumatera Selatan.
2. Data indikator Angka Konsumsi Ikan (AKI) telah disesuaikan dengan metodologi perhitungan terbaru dari BPS sehingga angka yang tercantum dalam Renstra DKP 2025-2029 telah mengacu pada standar yang berlaku.
3. Nilai NTN (Nilai Tukar Nelayan) dan NTPi (Nilai Tukar Petani Ikan) telah dilakukan sinkronisasi baik untuk data historis 5 (lima) tahun terakhir maupun untuk target capaian 5 (lima) tahun mendatang. Tidak terdapat lagi perbedaan data antara DKP Provinsi Sumatera Selatan dengan BPS Provinsi Sumatera Selatan terkait dua indikator tersebut.
4. BPS Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan komitmen untuk melakukan pembaruan (update) data yang disajikan pada website resmi BPS Sumatera Selatan secara bertahap agar selaras dengan data yang terdapat dalam Buku Sumatera Selatan Dalam Angka, sehingga memudahkan Masyarakat dalam mendapatkan data dan menentukan kebijakan berusaha di sektor kelautan dan perikanan.

Penutup:

Rapat diakhiri dengan kesepakatan untuk terus menjaga komunikasi dan koordinasi antara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan dan BPS Provinsi Sumatera Selatan guna mendukung perencanaan dan evaluasi pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang akuntabel dan berbasis data yang valid.

Notulen oleh:

Nama : Jailani, S.Pi
Jabatan : Fungsional Muda APHP/Koordinator Statistik DKP

Peserta Rapat :

No	Nama	Jabatan	Paraf/Tanda Tangan
1	M Umar Sahid, S.St.Pi	Kasubbag P.E.P DKP Sumsel	<i>[Signature]</i>
2	Iffah Atqa, S.ST., M.Si	Statistisi Ahli Madya BPS Sumsel	<i>[Signature]</i>
3	Jailani, S.Pi	Koordinator Statistik	<i>[Signature]</i>
4	<i>[Signature]</i>	Validator Bid. Budidaya	<i>[Signature]</i>
5	Jura Ictrah G. Sanga	Validator Per. Tangkap	<i>[Signature]</i>
6	NOVA RIADY	KOORDINATOR PERALAKHAN	<i>[Signature]</i>
7			

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci

INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Tangkap	Ton	162.017	165.337	168.644	172.017	175.457	178.966
Budidaya	Ton	285.750	295.286	305.000	315.000	325.000	335.000
Produksi Kelautan	Ton	220.335	221.553	228.200	235.046	242.097	249.360
Produksi Perikanan	Kg/Kapita/Thn	30,76	31,45	32,13	32,83	33,51	34
Produktivitas Perikanan	Persen (%)	1,15	1,38	1,66	1,99	2,38	2,86
Luas Perikanan	Hektar (Ha)	976,03	976,03	976,03	976,03	976,03	976,03
Produktivitas Pemanfaatan	Pelaku Usaha	25	30	35	40	45	50
Produktivitas Perikanan	Ekor	590.000	600.000	610.000	620.000	630.000	640.000
Produktivitas Perikanan	Sertifikat	97	100	103	106	109	112

Gambar 3.13. Dokumentasi serta Notulen dan indikator yang dilakukan sinkronisasi dengan BPS Sumsel untuk Penyusunan Dokumen Renstra DKP 2025-2029

Dalam menyusun indikator kinerja utama sektor kelautan dan perikanan yang lebih akuntabel dan realistis, telah dilaksanakan rapat koordinasi pembahasan indikator kinerja antara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Selatan. Koordinasi ini membahas secara khusus angka-angka indikator kinerja utama sektor kelautan dan perikanan, yang meliputi Nilai Tukar Nelayan (NTN), Nilai Tukar Petani Ikan (NTPI), dan Angka Konsumsi Ikan (AKI), yang akan dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029.

Dalam rapat tersebut, BPS Sumsel menyampaikan bahwa seluruh angka indikator yang dituangkan dalam draft Renstra telah melalui tahapan penelaahan dan kajian teknis secara mendalam. Penelaahan ini dilakukan dengan mempertimbangkan tidak hanya data sektoral yang bersumber dari Dinas Kelautan dan Perikanan, tetapi juga faktor-faktor ekonomi lainnya yang berada di luar kewenangan langsung DKP, seperti:

- Pergerakan harga bahan baku dan hasil perikanan di tingkat pasar nasional dan regional.
- Fluktuasi biaya produksi, termasuk biaya BBM, pakan ikan, dan sarana produksi lainnya.
- Kebijakan fiskal dan perdagangan yang mempengaruhi ekspor-impor produk perikanan.
- Kondisi ketenagakerjaan sektor kelautan dan perikanan serta kebijakan upah minimum provinsi.
- Faktor eksternal lain yang berkaitan dengan inflasi dan daya beli masyarakat.

BPS Sumsel menjelaskan bahwa proses penetapan angka indikator dilakukan dengan metode triangulasi data dari berbagai sumber, termasuk Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), data sektoral dari Dinas Kelautan dan Perikanan, serta sumber data lain yang relevan.

Melalui rapat ini, disepakati bahwa indikator kinerja utama sektor kelautan dan perikanan dalam Renstra DKP Provinsi Sumatera Selatan 2025–2029 telah dinyatakan valid, selaras, dan dapat digunakan sebagai acuan bersama. BPS

Sumsel juga memberikan komitmen untuk terus mendampingi DKP dalam proses monitoring dan evaluasi capaian indikator selama periode Renstra berlangsung, guna memastikan bahwa target yang telah ditetapkan tetap relevan dengan dinamika ekonomi makro dan sektor perikanan di Provinsi Sumatera Selatan.

10. Rapat Dengan PPPTKP (Penyuluh Perikanan) sebagai salah satu komponen penting dalam pendataan produksi perikanan di 17 Kabupaten/Kota. Pemahaman akan pentingnya implementasi target dan capaian indikator Renstra 2025-2029 merupakan hal yang penting mereka pahami agar mendapatkan data yang valid dan aktual.



Gambar 3.14. Rapat Pemberian arahan kepada Penyuluh Perikanan

Sebagai salah satu upaya memperkuat sistem pengumpulan data sektor kelautan dan perikanan yang akuntabel dan berbasis kondisi riil di lapangan,

telah dilaksanakan rapat pemberian pengarahan kepada penyuluh perikanan se-Provinsi Sumatera Selatan. Rapat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan penegasan kembali mengenai peran strategis penyuluh perikanan sebagai ujung tombak dalam pencatatan dan pelaporan data produksi sektor kelautan dan perikanan di wilayah tugas masing-masing.

Dalam arahan yang disampaikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan, ditekankan bahwa:

- ❖ **Penyuluh perikanan memiliki fungsi penting tidak hanya sebagai pendamping masyarakat pelaku usaha perikanan, tetapi juga sebagai petugas pencatat dan pelapor data produksi sektor kelautan dan perikanan.**

Data yang harus dicatat dari 17 Kabupaten/Kota meliputi:

- Produksi perikanan tangkap,
- Produksi perikanan budidaya,
- Produk hasil olahan ikan.

- ❖ **Akurasi dan Validitas Data Menjadi Prioritas**

Data yang dikumpulkan oleh penyuluh akan digunakan sebagai dasar penyusunan perencanaan, pengambilan kebijakan, serta pelaporan capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan. Oleh karena itu, penyuluh diminta untuk mencatat dan melaporkan data yang benar-benar faktual, sesuai dengan kondisi riil di lapangan, tanpa ada pengurangan maupun penambahan yang tidak sesuai fakta.

- ❖ **Perlunya Pembekalan dan Pendampingan Teknis**

Untuk mendukung peran ini, penyuluh perikanan diberikan pembekalan dan pendampingan teknis terkait cara pengumpulan, pencatatan, serta penginputan data melalui format digital yang telah disiapkan, seperti Google Form dan Google Spreadsheet. Hal ini bertujuan agar seluruh data yang masuk ke provinsi sudah melalui proses verifikasi awal dari tingkat kabupaten/kota.

❖ **Sinergi dan Tanggung Jawab Bersama**

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan mengajak seluruh penyuluh perikanan untuk membangun komitmen bersama dalam menjaga integritas data yang dikumpulkan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap kualitas data sektor kelautan dan perikanan di Sumatera Selatan.

Rapat ditutup dengan sesi diskusi teknis serta simulasi pengisian format digital, agar penyuluh perikanan benar-benar memahami prosedur dan tata cara pelaporan yang telah ditetapkan. Melalui proses ini diharapkan sistem pengumpulan data sektor kelautan dan perikanan di Sumatera Selatan menjadi lebih tertib, valid, dan dapat digunakan sebagai referensi dalam penyusunan program yang tepat sasaran.

11. Koordinasi dan desk Penyempurnaan Renstra 2025-2029 ke Bappeda Provinsi Sumatera Selatan.

Rapat Koordinasi dan Desk Penyempurnaan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 di Bappeda Provinsi Sumatera Selatan. Rapat ini dihadiri oleh seluruh perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, termasuk Dinas Kelautan dan Perikanan, dengan agenda utama membahas penyempurnaan dokumen Renstra agar selaras dengan visi dan misi Gubernur Sumatera Selatan dalam membangun daerah.

Dalam rapat tersebut, Bappeda Provinsi Sumatera Selatan secara tegas memberikan arahan dan himbauan kepada seluruh perangkat daerah agar seluruh indikator kinerja yang disusun dalam Renstra tidak berdiri sendiri secara sektoral, melainkan wajib bersinergi dan mendukung secara langsung pencapaian tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan.

Selain membahas indikator kinerja utama, rapat koordinasi dan desk juga membahas hal-hal berikut:

- a) Penajaman kembali program dan kegiatan yang dituangkan dalam Renstra masing-masing perangkat daerah, agar benar-benar relevan dengan prioritas pembangunan daerah serta tidak tumpang tindih antar perangkat daerah.
- b) Evaluasi dan penyesuaian besaran anggaran pada program dan kegiatan yang direncanakan, dengan memperhatikan keterbatasan fiskal daerah dan kebutuhan strategis pembangunan daerah.
- c) Sinkronisasi antara indikator kinerja, program, kegiatan, dan anggaran agar seluruh komponen dalam dokumen Renstra saling mendukung, serta memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan.
- d) Khusus untuk Dinas Kelautan dan Perikanan, kembali ditegaskan bahwa indikator kinerja utama seperti Nilai Tukar Nelayan (NTN), Nilai Tukar Petani Ikan (NTPI), dan Angka Konsumsi Ikan (AKI) harus tetap menjadi indikator prioritas yang ditetapkan secara realistis, akuntabel, dan selaras dengan kebijakan nasional dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.

Rapat ditutup dengan kesepakatan bahwa seluruh perangkat daerah akan menyempurnakan dokumen Renstra 2025–2029 paling lambat sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, serta tetap membuka ruang konsultasi dan asistensi lanjutan jika diperlukan.



Gambar 3.15. Koordinasi dan desk Penyempurnaan Renstra 2025-2029 di Bappeda Prov Sumsel

BERITA ACARA
KESEPAKATAN HASIL PEMBAHASAN PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2025-2029

Pada hari ini, *Jum'at tanggal Dua Puluh tiga bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Lima*, telah diselenggarakan Pembahasan Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, yang dihadiri pihak terkait sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Berita Acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

1. Pemaparan materi dari Bappeda mengenai Substansi Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta rapat pembahasan Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang telah dirangkum menjadi hasil diskusi sebagaimana notulen pada Lampiran III.

MENYEPAKATI

KESATU : Menyepakati program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja dan anggaran dalam Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

KEDUA : Menyepakati berita acara ini beserta lampirannya (Lampiran I, II, dan III), yang merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara kesepakatan ini;

KETIGA : Berita acara hasil pembahasan ini beserta lampirannya menjadi bahan pemutakhiran Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Demikian berita acara ini dibuat sebagai bahan Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Palembang, 23 Mei 2025

Perangkat Daerah : *[Signature]* Pimpinan Rapat
 Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan Kepala Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan

Vivita Indira Sari, ST., MT **Hari Wibawa, S.P., M.M.**
 Pembina Tk. I (IV/b) *[Signature]* **Asminda (IV/a)**
 NIP. 197904182001122002 NIP. 197303172007011021

Lampiran I
DAFTAR HADIR PESERTA PEMBAHASAN PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
 Provinsi : Sumatera Selatan
 Tanggal : Mei 2025
 Tempat : Ruang Rapat Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan

No	Nama	Lembaga/ Instansi	Jabatan	Tanda Tangan
1	<i>[Signature]</i>	DKP SS	Subbidang 3	<i>[Signature]</i>
2	<i>[Signature]</i>	DKP Prov. SS	Kurangnya RP	<i>[Signature]</i>
3	<i>[Signature]</i>	DKP Prov. SS	STP RP	<i>[Signature]</i>
4	<i>[Signature]</i>	DKP Prov. S	SDP RP	<i>[Signature]</i>

Gambar 3.16. Notulen desk Penyempurnaan Renstra 2025-2029 di Bappeda Prov Sumsel



Gambar 3.17. Konsultasi Penyempurnaan Renstra 2025-2029 ke Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Prov Sumsel

Sebelum disampaikan dan disosialisasikan kepada 17 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan, Draft Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029 yang telah melalui proses penyempurnaan terlebih dahulu dikonsultasikan secara resmi kepada Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, khususnya kepada Bidang Perekonomian.

Konsultasi ini dilakukan sebagai langkah untuk memastikan bahwa seluruh aspek yang termuat dalam dokumen Renstra, mulai dari tujuan, sasaran, indikator kinerja utama, program dan kegiatan, hingga besaran anggaran, telah selaras dan mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur Sumatera Selatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Melalui konsultasi ini, Bidang Perekonomian Bappeda Provinsi Sumatera Selatan memberikan masukan dan arahan terkait:

- Penyesuaian indikator kinerja utama sektor kelautan dan perikanan agar tidak hanya mencerminkan kebutuhan sektoral, tetapi juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan.

- Koreksi dan penajaman kembali program dan kegiatan yang direncanakan, agar efektif, efisien, serta sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.
- Penyesuaian besaran anggaran program/kegiatan dengan memperhatikan kebijakan fiskal daerah dan prinsip pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel.

Dengan adanya proses konsultasi ini, diharapkan dokumen Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029 yang nantinya akan disampaikan kepada 17 kabupaten/kota telah benar-benar matang, sistematis, dan memiliki keselarasan serta sinergi dengan seluruh dokumen perencanaan daerah lainnya. Hal ini menjadi bagian dari upaya menciptakan perencanaan pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang lebih terukur, akuntabel, dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat di Sumatera Selatan.

12. Penyampaian dan upaya mensosialisasikan Draft Dokumen Renstra 2025-2029 ke 17 Kab/Kota.

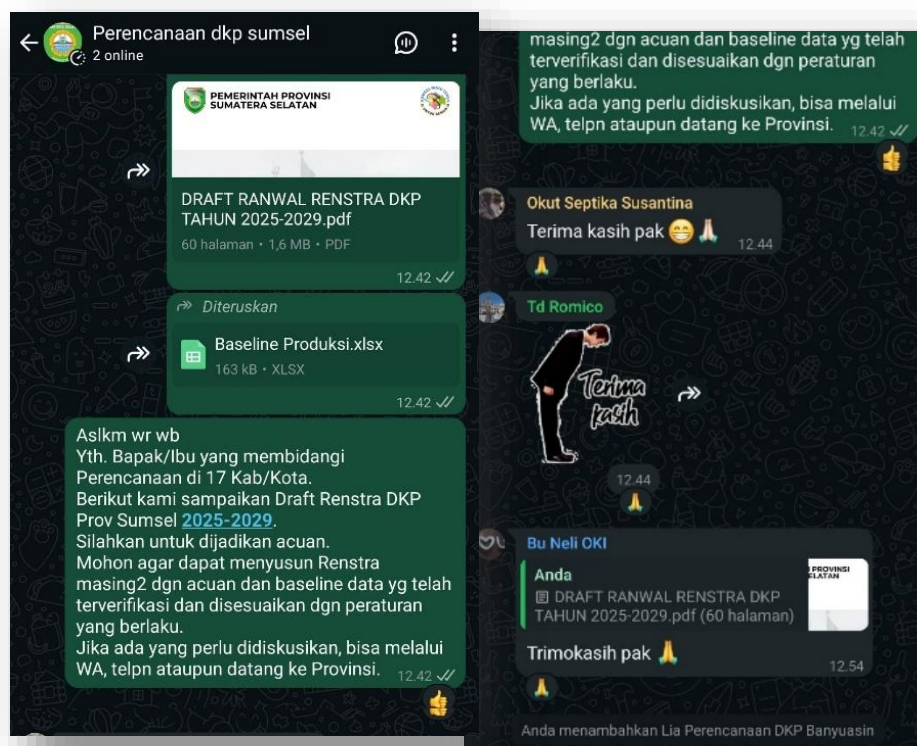
Sebagai bagian dari upaya memastikan keselarasan dan sinergi perencanaan pembangunan sektor kelautan dan perikanan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan kegiatan penyampaian dan sosialisasi Draft Dokumen Rencana Strategis (Renstra) DKP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029 kepada 17 kabupaten/kota se-Sumatera Selatan.

Penyampaian dan sosialisasi ini bertujuan agar kabupaten/kota dapat menjadikan Renstra DKP Provinsi Sumatera Selatan sebagai panduan dan acuan dalam menyusun Renstra masing-masing perangkat daerah yang saat ini juga sedang dalam proses penyusunan. Dengan mengacu pada Renstra Provinsi, diharapkan indikator kinerja, program, dan kegiatan di tingkat kabupaten/kota dapat saling mendukung dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah.

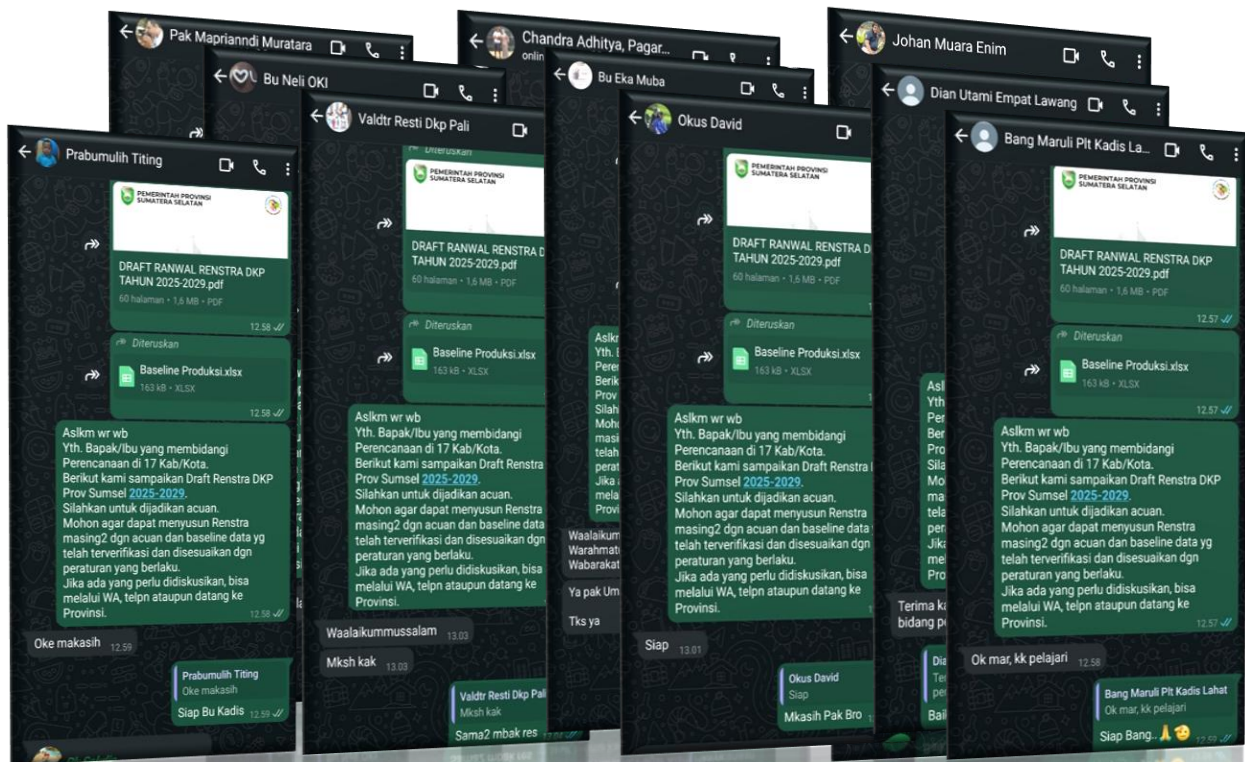
Adapun upaya sosialisasi dan penyampaian Draft Renstra tersebut dilakukan melalui dua cara utama:

a. Melalui Media Online

DKP Provinsi Sumatera Selatan memanfaatkan media komunikasi online berupa grup WhatsApp yang telah terbangun antara DKP Provinsi dengan perencana dan pengampu Renstra di 17 kabupaten/kota. Melalui grup tersebut, Draft Dokumen Renstra DKP Provinsi Sumsel Tahun 2025–2029 disampaikan lengkap dengan baseline data online yang telah disusun dan dapat dijadikan sebagai referensi atau panduan oleh kabupaten/kota. Selain melalui grup WhatsApp, dokumen dan informasi terkait juga disampaikan melalui pesan pribadi kepada para pengampu Renstra di masing-masing kabupaten/kota. Dalam banyak kasus, komunikasi tersebut dilanjutkan dengan diskusi dan konfirmasi melalui sambungan telepon untuk memastikan bahwa isi dan substansi Renstra Provinsi benar-benar dipahami dan dijadikan rujukan oleh kabupaten/kota.



Gambar 3.18. Sosialisasi Renstra 2025-2029 ke Grup Perencanaan



Gambar 3.19. Sosialisasi Renstra 2025-2029 Melalui Whatsapp

b. Melalui Pertemuan Langsung

Selain melalui media online, beberapa kabupaten/kota berkesempatan melakukan koordinasi secara langsung dengan DKP Provinsi Sumatera Selatan. Kabupaten/kota tersebut antara lain Ogan Komering Ilir, Musi Banyuasin, Musi Rawas, Kota Lubuk Linggau, Kota Prabumulih, dan Kabupaten Lahat. Dalam pertemuan langsung tersebut, dilakukan diskusi lebih mendalam mengenai isi Draft Renstra, termasuk penjelasan terkait indikator kinerja utama, program, kegiatan, serta baseline data yang telah disepakati dan diselaraskan dengan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan dan BPS Sumsel.

Melalui kombinasi sosialisasi secara online dan tatap muka ini, diharapkan seluruh kabupaten/kota dapat memahami dan mengadopsi substansi dari Renstra DKP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029, sehingga tercipta keselarasan dokumen perencanaan antara provinsi dan kabupaten/kota yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan secara terukur dan akuntabel.



Gambar 3.20. Tanya Jawab Seputar Renstra 2025-2029 dengan Kab. Musi Banyuasin



Gambar 3.21. Tanya Jawab Seputar Renstra 2025-2029 dengan Kab. OKI



Gambar 3.22. Tanya Jawab Seputar Renstra 2025-2029 dengan Kab. Musi Rawas

B. Manfaat Aksi Perubahan

Aksi ini membawa manfaat langsung yang dapat dirasakan oleh berbagai pihak:

1. Bagi Organisasi (DKP Provinsi Sumatera Selatan):

- Menyediakan indikator kinerja yang terukur, valid, dan mudah diakses.
- Meningkatkan akuntabilitas dan kecepatan dalam perencanaan serta pelaporan kinerja.
- Mewujudkan sistem “Satu Data Perikanan” sebagai basis perencanaan strategis.
- Mengurangi duplikasi program/kegiatan yang sebelumnya tumpang tindih.

2. Bagi Stakeholder:

- **Pemerintah Kabupaten/Kota:** Mendapatkan referensi capaian kinerja sektoral untuk penyusunan dokumen perencanaan daerah.
- **Penyuluh dan PPTKP:** Data yang dikumpulkan diakui dalam dokumen resmi dan mendukung kredibilitas peran mereka.
- **BPS dan Bappeda:** Menjadi mitra data strategis dengan akses terhadap indikator yang tervalidasi.
- **Pelaku usaha perikanan:** Kebijakan dan program lebih tepat sasaran karena berbasis data kesejahteraan (NTN dan NTPi).
- **Akademisi dan masyarakat:** Data terbuka untuk riset, evaluasi, dan pemantauan publik.

3. Penghematan dan Efisiensi Anggaran:

Penghematan dan efisiensi anggaran dalam aksi perubahan ini tidak hanya dilihat dari aspek administratif seperti pengurangan biaya perjalanan dinas atau dokumen fisik, namun lebih ditekankan pada peningkatan efektivitas program dan kegiatan yang akan direncanakan dalam dokumen RENSTRA 2025–2029. Dengan tersedianya data indikator kinerja yang valid dan aktual, maka setiap program dan kegiatan dapat dirancang secara lebih tepat sasaran,

menghindari pengeluaran anggaran yang mubazir, serta meningkatkan daya guna dan hasil guna dari setiap rupiah yang dikeluarkan.

Penyusunan target capaian berbasis data juga memastikan bahwa intervensi kebijakan dilakukan secara objektif sesuai kondisi lapangan. Hal ini berdampak pada penurunan risiko kegagalan program dan peningkatan dampak nyata terhadap kesejahteraan pelaku usaha perikanan. Selain itu, penyelarasan antara kebutuhan di daerah dengan arah kebijakan pusat memperkuat sinergi anggaran lintas sektor dan meminimalisir pemborosan sumber daya.

C. Implementasi Pengembangan Kompetensi dalam Aksi Perubahan

Hasil pembelajaran dari pelatihan PKP saya aplikasikan secara langsung dalam berbagai aspek pelaksanaan aksi perubahan:

1. **Kepemimpinan Kolaboratif dan Partisipatif:** Saya menggerakkan tim lintas bidang untuk berkolaborasi dalam menyusun data capaian kinerja. Melalui pendekatan coaching dan diskusi terbuka, anggota tim aktif menyampaikan pandangan dan solusi.
2. **Pemanfaatan Teknologi Digital:** Saya mengembangkan sistem berbasis *Google Form*, *Google Spreadsheet*, dan *Google Drive*. Semua proses terdokumentasi secara digital dan transparan.
3. **Manajemen Kinerja dan Evaluasi:** Target capaian disusun berdasarkan baseline data aktual dan tervalidasi. Evaluasi dilakukan mingguan bersama Tim Efektif.
4. **Coaching dan Pemberdayaan Tim:** Saya memberikan pelatihan internal kepada anggota tim dalam hal input data digital, penyusunan indikator, dan pemahaman prinsip outcome-based performance.
5. **Penguatan Integritas dan Transparansi:** Seluruh hasil kegiatan dilaporkan secara terbuka, baik dalam rapat internal DKP maupun forum eksternal (Bappeda, BPS).

Dengan demikian, aksi perubahan ini tidak hanya meningkatkan kinerja teknis unit kerja, tetapi juga memperkuat kapasitas kepemimpinan yang adaptif, integratif, dan berorientasi hasil.

Implementasi kompetensi selama pelaksanaan aksi perubahan ini dapat dijabarkan dalam tiga kategori utama:

➤ **Kompetensi Teknis:**

- Kemampuan dalam menyusun indikator kinerja berbasis data yang terverifikasi.
- Penggunaan perangkat digital seperti Google Form, Spreadsheet, dan dashboard untuk pengumpulan dan pelaporan data.
- Penyusunan dokumen perencanaan strategis (RENSTRA) secara sistematis dan sesuai regulasi.

➤ **Kompetensi Manajerial:**

- Kepemimpinan dalam membentuk dan mengelola Tim Efektif lintas bidang.
- Koordinasi lintas unit secara daring dan luring untuk mendukung pengambilan keputusan.
- Penyusunan strategi monitoring dan evaluasi capaian kinerja organisasi secara berkala.

➤ **Kompetensi Sosial Kultural:**

- Membangun komunikasi dan hubungan kerja yang harmonis dengan seluruh stakeholder (Kab/Kota, Bappeda, BPS).
- Mendorong partisipasi aktif dan rasa memiliki dari anggota tim.
- Menyampaikan hasil kerja secara terbuka dan akuntabel dalam forum formal dan informal.

Gabungan ketiga kompetensi ini memperkuat pelaksanaan fungsi strategis Subbagian PEP sekaligus mempercepat pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan berintegritas.

Tabel 3.1. Pengembangan Kompetensi dalam Aksi Perubahan

No	Kompetensi	Indikator Pengembangan	Implementasi dalam Aksi
1	Teknis	Mampu menyusun indikator berbasis data dan mengolah dokumen strategis	Menyusun indikator capaian RENSTRA berbasis data sektoral dan validasi kabupaten/kota
		Penggunaan alat digital dalam kerja administratif	Mengembangkan sistem Google Form dan Spreadsheet untuk input data capaian dan target 5 tahunan
2	Manajerial	Mampu memimpin tim dan mengoordinasikan lintas unit kerja	Membentuk dan memimpin Tim Efektif serta memfasilitasi koordinasi rutin
		Menyusun strategi monitoring dan evaluasi kinerja	Melaksanakan evaluasi mingguan dan penyusunan pelaporan rutin berbasis digital
3	Sosial Kultural	Mampu membangun komunikasi lintas stakeholder	Menjalin koordinasi aktif dengan Bappeda, BPS, Kabupaten/Kota, dan penyuluh
		Mendorong partisipasi dan rasa memiliki dalam tim	Menerapkan metode coaching dan melibatkan semua anggota dalam perencanaan dan pelaporan

BAB IV. KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN

Keberlanjutan aksi perubahan merupakan bagian penting dari proses pelaksanaan perubahan yang berorientasi pada hasil. Untuk menjamin bahwa seluruh tahapan aksi dapat memberikan manfaat yang berkesinambungan, maka perlu dirancang rencana tindak lanjut yang sistematis dan terukur. Keberlanjutan ini mencakup tindak lanjut kegiatan dalam jangka pendek, serta penetapan target capaian untuk jangka menengah dan jangka panjang.

A. Tindak Lanjut Kegiatan Jangka Pendek (2 Bulan)

Berikut ini adalah beberapa kegiatan yang akan dilakukan dalam jangka pendek untuk menjaga kesinambungan dari pelaksanaan aksi perubahan:

- **Sosialisasi hasil aksi perubahan** kepada seluruh bidang teknis di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan. Tujuannya adalah agar seluruh pegawai memahami hasil, manfaat, dan arah kebijakan yang telah dirumuskan melalui aksi perubahan ini.
- **Finalisasi dan pengarsipan dokumen aksi**, meliputi format data indikator, Surat Keputusan Tim Efektif, hasil baseline capaian kinerja, serta hasil koordinasi lintas unit. Dokumen-dokumen ini diarsipkan secara digital dan terintegrasi dalam sistem Google Drive untuk memastikan kemudahan akses dan keamanan informasi.
- **Uji coba pengumpulan data lanjutan** menggunakan format Google Form oleh validator di 17 Kabupaten/Kota. Uji coba ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem pelaporan berbasis digital dapat berjalan secara konsisten dan akurat.
- **Pelatihan internal lanjutan bagi tim pengelola data** guna memperkuat kapasitas teknis dalam mengelola pelaporan digital. Pelatihan ini mencakup penggunaan spreadsheet online, penyusunan grafik capaian, serta teknik validasi sederhana untuk mencegah data ganda.

Seluruh kegiatan jangka pendek ini difokuskan untuk memperkuat pondasi implementasi sistem baru yang telah dikembangkan dalam aksi perubahan, serta

memastikan keterlibatan aktif seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan kinerja organisasi.

B. Target Capaian Jangka Menengah (6 Bulan)

Capaian jangka menengah dirancang untuk memperkuat sistem yang telah dibangun dan mulai mengintegrasikannya ke dalam dokumen dan proses perencanaan resmi organisasi. Adapun target yang ingin dicapai meliputi:

- **Integrasi indikator aksi ke dalam dokumen RENSTRA DKP 2025–2029.** Indikator yang telah disusun melalui aksi perubahan akan dijadikan acuan utama dalam perencanaan strategis DKP Provinsi Sumatera Selatan.
- **Penerapan pelaporan digital sektoral.** Setiap bidang akan menerapkan sistem pelaporan kinerja menggunakan formulir dan spreadsheet digital secara berkala, yang terhubung langsung dengan database pusat pengelolaan data kinerja.
- **Pemutakhiran data sektoral secara berkala.** Pemutakhiran ini dilakukan melalui kerja sama lintas instansi, seperti BPS dan Bappeda, untuk menjamin akurasi dan sinkronisasi data sektoral dengan data makro pembangunan daerah.
- **Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) berbasis hasil aksi.** Data dan indikator yang telah divalidasi akan digunakan dalam penyusunan LAKIP tahunan, dengan penekanan pada hasil (outcome) yang menggambarkan dampak nyata kebijakan.

Langkah-langkah tersebut akan membentuk pola kerja baru yang berbasis data dan mendukung peningkatan nilai akuntabilitas melalui evaluasi SAKIP yang lebih terstruktur dan terukur.

C. Target Capaian Jangka Panjang (1-5 Tahun)

Capaian Jangka panjang ini merupakan fase pelaksanaan Dokumen Renstra selama 5 (lima) tahun yang memastikan Perubahan-perubahan nya

terimplementasi pada Program/Kegiatan yang dilaksanakan Bidang Teknis dan UPTD. Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

- **Terimplementasinya penerapan IKU dan IKK yang tepat** sebagai pengukur kinerja dan tingkat keberhasilan pembangunan kelautan dan perikanan (Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan) dalam Renstra 2025-2029.
- **Terimplementasinya penyusunan laporan capaian target kinerja berbasis data valid dan aktual secara berkelanjutan** di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan.
- **Tersusun nya Rencana Program/Kegiatan yang disesuaikan** dengan hasil evaluasi indikator kinerja.
- **Dilaksanakannya dokumen RENSTRA DKP 2025–2029** yang menunjang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SKIP) yang mendukung terwujudnya *Good governance*.

BAB V.

KETERKAITAN DENGAN MATA PELATIHAN PILIHAN

Sebagai bagian dari Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP), peserta dibekali dengan sejumlah modul pelatihan yang dirancang untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan, manajerial, dan teknis aparatur pemerintah. Setiap modul pelatihan memiliki keterkaitan erat dengan tantangan yang dihadapi oleh peserta di unit kerjanya masing-masing.

Aksi perubahan yang penulis susun bertujuan untuk mengatasi lemahnya akuntabilitas penyusunan target dan capaian kinerja, yang selama ini masih banyak bergantung pada data tidak aktual dan belum tervalidasi. Tugas ini merupakan bagian integral dari fungsi Subbag Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan—sebuah unit kerja strategis yang menjadi motor penggerak perencanaan pembangunan berbasis data di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan. Implementasi dari aksi ini tidak hanya terbatas pada perbaikan prosedural dalam pengumpulan data dan penyusunan indikator, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam penyusunan dokumen perencanaan strategis jangka menengah, yakni Rencana Strategis (Renstra) DKP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029. Data yang valid dan indikator berbasis kesejahteraan yang diperoleh melalui aksi perubahan akan diintegrasikan ke dalam target kinerja dalam Renstra tersebut, sehingga menjamin keselarasan antara dokumen perencanaan dengan kondisi dan kebutuhan riil di lapangan.

Melalui serangkaian pembelajaran di PKP, penulis memperoleh wawasan, metode, dan keterampilan baru dari berbagai modul yang tidak hanya relevan secara tematik, tetapi juga kontekstual terhadap pelaksanaan aksi perubahan. Pemanfaatan modul-modul ini menjadi penguat dalam membangun kerangka kerja penyusunan kinerja yang akuntabel, partisipatif, dan berbasis bukti.

Berikut pemaparan keterkaitan antara modul pelatihan dan pelaksanaan aksi perubahan:

A. Perencanaan Kegiatan Pelayanan Publik

Modul ini memberikan pemahaman tentang bagaimana menyusun kegiatan pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta berdasarkan data dan kondisi riil lapangan.

Pemanfaatan:

Sebagai Subbag Perencanaan, modul ini memperkuat pemahaman dalam menyusun program dan kegiatan yang berorientasi pada hasil (outcome) bukan sekadar output. Dalam aksi perubahan, pengetahuan dari modul ini digunakan untuk:

- Menyusun indikator kinerja berbasis kesejahteraan (NTN dan NTPi),
- Menyelaraskan antara target kinerja dengan kebutuhan lapangan dan data statistik sektoral.

B. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Pelayanan Publik

Modul ini memuat teknik penyusunan RKA yang berbasis kinerja serta integrasi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan.

Pemanfaatan:

Dalam konteks aksi perubahan, penyusunan target kinerja tidak terlepas dari alokasi anggaran. Modul ini membantu menyusun rencana kerja dan anggaran yang realistis dan terukur berdasarkan data aktual di lapangan. Indikator yang disempurnakan akan menjadi dasar dalam alokasi anggaran kegiatan strategis ke depan.

C. Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan

Modul ini mengajarkan pentingnya monitoring dan evaluasi (monev) serta pengendalian kinerja melalui metode PDCA (Plan, Do, Check, Action).

Pemanfaatan:

Dalam aksi perubahan, modul ini digunakan untuk merancang sistem kontrol pelaksanaan penyusunan target capaian agar:

- Terdapat mekanisme validasi data,
- Ada sistem evaluasi efektivitas indikator,
- Proses monev berkontribusi pada perbaikan berkelanjutan.

D. Berpikir Kreatif dalam Pelayanan

Modul ini mengasah kemampuan peserta dalam menemukan solusi inovatif atas masalah pelayanan publik melalui pendekatan kreatif dan out of the box.

Pemanfaatan:

Aksi perubahan ini lahir dari kesadaran bahwa indikator kinerja yang selama ini digunakan belum merepresentasikan realitas. Modul ini menginspirasi pemanfaatan indikator berbasis kesejahteraan (NTN dan NTPi) yang belum lazim digunakan dalam dokumen perencanaan. Hasilnya adalah solusi baru berupa model integrasi data berbasis lapangan.

E. Pelayanan Publik Digital

Modul ini menekankan pentingnya transformasi digital dalam pelayanan publik berbasis data dan teknologi informasi.

Pemanfaatan:

Mengingat substansi aksi perubahan adalah pengumpulan dan pengolahan data dari berbagai sumber, pemahaman dari modul ini diterapkan dalam:

- Perencanaan integrasi data capaian kinerja ke dalam sistem digital sederhana, yakni Googleform dan Spreadsheet

- Data yang telah terinput pada Googleform dan Spreadsheet digunakan sebagai salah satu dasar Pemetaan target indicator kinerja pada masing-masing bidang teknis.

F. Etika dan Integritas Kepemimpinan Pancasila

Modul ini menekankan pentingnya nilai-nilai etika, integritas, dan tanggung jawab ASN dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan publik.

Pemanfaatan:

Aksi perubahan ini membawa misi akuntabilitas dan transparansi. Nilai integritas dari modul ini memperkuat komitmen penulis dan tim untuk:

- Menyajikan data kinerja secara jujur dan dapat dipertanggungjawabkan,
- Menjadi pengawal pelaporan yang tidak dimanipulasi demi pencitraan semu.

Melalui integrasi pembelajaran dari berbagai modul pelatihan, pelaksanaan aksi perubahan ini tidak hanya didukung secara teoritis, tetapi juga dibekali dengan keterampilan praktis dan landasan etis yang kokoh. Dari sudut pandang Subbag Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan, seluruh modul memberikan kontribusi strategis dalam membentuk sistem perencanaan kinerja yang akurat, akuntabel, dan inovatif, yang menjadi fondasi perumusan kebijakan sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Sumatera Selatan ke depan.

BAB VI.

DISEMINASI DAN PUBLIKASI AKSI PERUBAHAN

Sebagai bagian dari strategi keberlanjutan aksi perubahan "Peningkatan Akuntabilitas Target Dan Capaian Kinerja Dengan Menggunakan Data Yang Valid Dan Aktual Pada Renstra Dinas Kelautan Dan Perikanan 2025-2029 Provinsi Sumatera Selatan", kegiatan diseminasi dan publikasi menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa inovasi yang telah dilakukan tidak berhenti sebagai praktik terbatas, tetapi dapat diketahui, didukung, dan direplikasi oleh berbagai pihak. Diseminasi ini juga menjadi bagian dari tahapan strategis untuk memastikan bahwa substansi aksi perubahan benar-benar terinternalisasi ke dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) DKP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029. Dengan kata lain, hasil dari aksi perubahan ini bukan hanya digunakan untuk perbaikan teknis jangka pendek, tetapi menjadi acuan resmi dalam perumusan indikator kinerja utama (IKU), indikator kinerja kunci (IKK), serta program prioritas pembangunan kelautan dan perikanan lima tahun ke depan. Oleh karena itu, publikasi dan komunikasi secara masif kepada para pemangku kepentingan, termasuk Bappeda Provinsi, unit teknis, dan mitra data seperti BPS, merupakan langkah penting agar integrasi ke dalam Renstra bersifat sistemik dan mendapat dukungan penuh lintas sektor.

A. Penerapan Strategi Komunikasi

Dalam rangka menyukseskan pelaksanaan dan keberlanjutan aksi perubahan "Peningkatan Akuntabilitas Target Dan Capaian Kinerja Dengan Menggunakan Data Yang Valid Dan Aktual Pada Renstra Dinas Kelautan Dan Perikanan 2025-2029 Provinsi Sumatera Selatan", strategi komunikasi menjadi elemen vital yang dijalankan secara terstruktur dan terencana. Strategi ini ditujukan untuk membangun pemahaman bersama, memperoleh dukungan, dan memastikan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan dalam proses perubahan.

Secara khusus, strategi komunikasi dirancang untuk menjamin bahwa hasil aksi perubahan tidak hanya diketahui oleh internal organisasi, tetapi juga menjadi bagian dari dokumen perencanaan resmi yaitu Rencana Strategis (Renstra) DKP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029. Hal ini menjadi penting karena Renstra merupakan dokumen yang menetapkan arah pembangunan, indikator kinerja utama, dan target pembangunan sektor kelautan dan perikanan dalam lima tahun ke depan.

Dalam proses komunikasi ini, dilakukan pendekatan top-down dan bottom-up secara simultan, melibatkan pimpinan, unit teknis, serta stakeholder lintas sektor. Komunikasi tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga persuasif dan partisipatif, agar seluruh pihak memahami pentingnya perubahan indikator dan metode pelaporan kinerja berbasis data valid.

Langkah-langkah konkret dalam penerapan strategi komunikasi antara lain:

Untuk memperluas pemahaman, membangun dukungan, serta menyampaikan substansi aksi perubahan kepada berbagai pemangku kepentingan, strategi komunikasi yang diterapkan antara lain:

1. **Rapat Tim Efektif dan Koordinasi dengan Bidang/Instansi Teknis Pengampu**

Penyampaian hasil penyusunan aksi perubahan pada Renstra DKP 2025-2029 dilakukan melalui pertemuan secara langsung dengan Bidang Teknis di DKP Sumsel, PPTKP/Penyuluh Perikanan, Bappeda, serta BPS Provinsi. Selain itu, Beberapa Kabupaten/Kota pun telah melakukan koordinasi secara langsung ke DKP Provinsi guna mengkonsultasikan Renstra yang sedang mereka susun. Kegiatan ini menjadi sarana komunikasi awal sekaligus advokasi untuk menguatkan arah pelaksanaan perubahan.

2. **Sosialisasi Internal DKP Provinsi Sumatera Selatan**

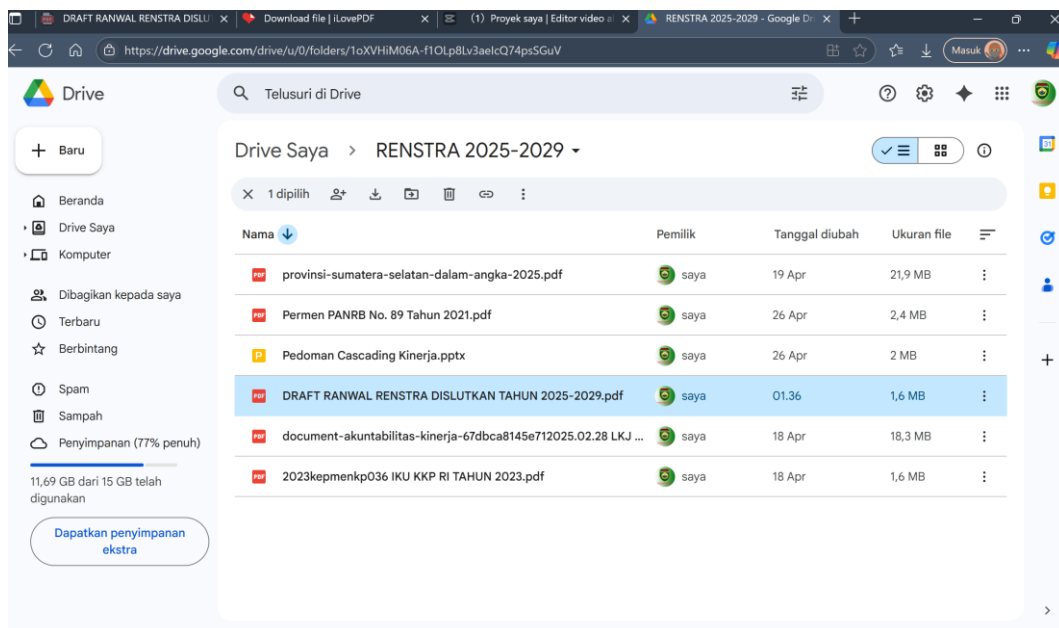
Hasil dan rancangan indikator baru disampaikan dalam forum koordinasi internal kepada Kepala Bidang dan Sekaligus meminta dukungan karena

data yang terkumpul merupakan agregasi dari struktur dibawahnya. Tujuannya adalah membangun pemahaman bersama dan menyelaraskan arah perencanaan berbasis data valid ke dalam siklus kerja reguler instansi.

3. Strategi komunikasi berbasis Media Digital

Seluruh Dokumen yang akan dijadikan panduan oleh Kabupaten/Kota dalam menyusun Renstra mereka diunggah pada Google Drive Perencanaan DKP Provinsi dan dapat diakses oleh semua pihak terkait melalui link :

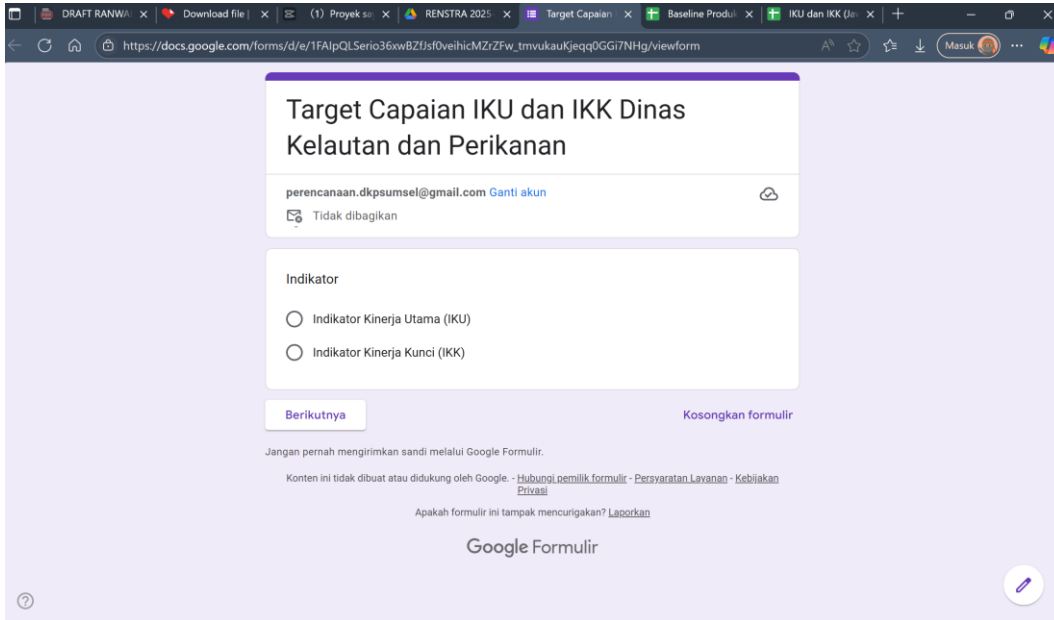
https://drive.google.com/drive/folders/1oXVHiM06A-f1OLp8Lv3aelcQ74psSGuV?usp=drive_link



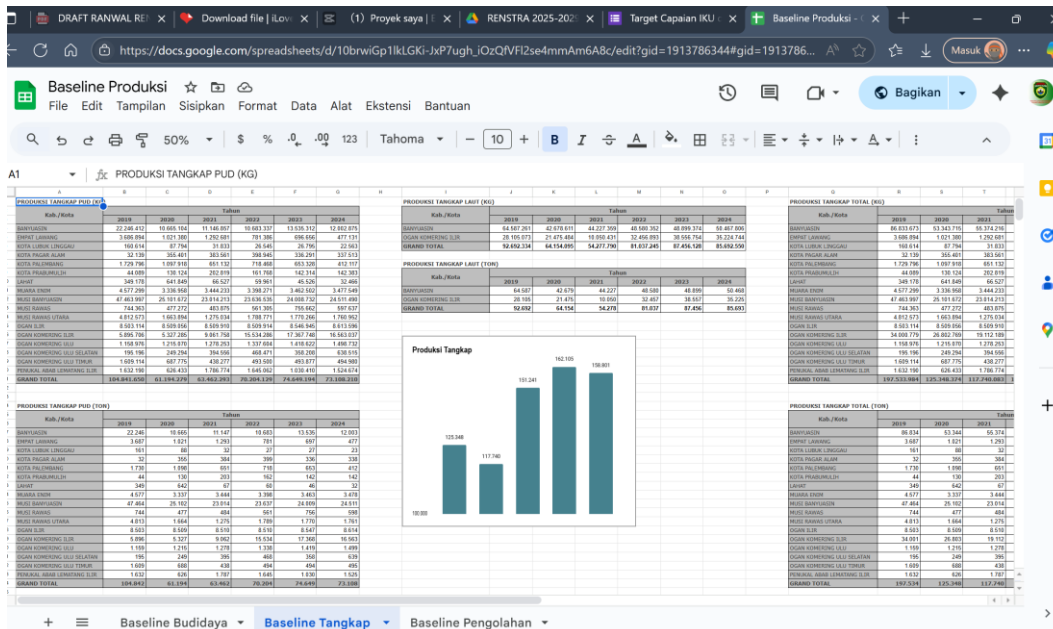
Gambar 6.1. Tampilan Google Drive yang di bagikan

Sedangkan dalam penginputan Baseline data indikator, disediakan *Google Form* dengan link : <https://forms.gle/mDPsDLyzufoWogof9> yang langsung terekap pada *google spreadsheet* dengan link : <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qjAEySJtm1HWtXzmlDZ3ztlJhE38O4zdDPhEKIQ2J-U/edit?usp=sharing>

https://docs.google.com/spreadsheets/d/10brwiGp1kLgKi-JxP7ugh_iOzQfVFI2se4mmAm6A8c/edit?usp=sharing



Gambar 6.2. Tampilan Google Form saat akan dilakukan pengisian



Gambar 6.2. Tampilan Google Spreadsheets yang telah menjadi baseline data digital

Penggunaan Google Form dalam aksi perubahan ini bertujuan untuk menggantikan metode pengumpulan data secara konvensional yang selama ini dilakukan secara manual melalui formulir cetak atau laporan berbasis dokumen fisik. Dengan sistem ini, data yang diinput oleh penyuluh perikanan dan validator dari bidang teknis di kabupaten/kota langsung terkirim dan teragregasi secara otomatis ke dalam Google Spreadsheet milik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan.

Keuntungan utama dari penerapan sistem ini adalah:

- **Transformasi Informasi Data yang Lebih Cepat**

Setiap data yang diinput melalui Google Form dapat langsung dilihat dan dimonitor secara real-time oleh tim perencana dan evaluator di provinsi. Hal ini memungkinkan proses validasi dan pengolahan data dilakukan dengan lebih cepat dibandingkan dengan cara konvensional yang membutuhkan waktu pengumpulan, rekap, dan input ulang secara manual.

- **Kemudahan Akses dan Pencarian Data**

Dengan sistem yang terintegrasi di Google Spreadsheet, seluruh data tersimpan dalam satu basis data yang tersusun rapi, dapat difilter, dicari, dan diolah kapan pun dibutuhkan. Hal ini memudahkan tim Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dalam menyusun laporan, analisis kinerja, maupun saat memerlukan data untuk pengambilan keputusan strategis.

- **Efisiensi dan Transparansi**

Sistem ini mengurangi potensi kesalahan input berulang, duplikasi data, serta meminimalkan keterlambatan dalam pelaporan. Selain itu, data yang sudah masuk dapat dipantau oleh seluruh anggota tim efektif yang diberi akses, sehingga proses pengumpulan dan verifikasi data menjadi lebih transparan dan akuntabel.

Melalui penerapan Google Form dan Google Spreadsheet ini, aksi perubahan tidak hanya membawa perbaikan pada sisi substantif penyusunan indikator dan capaian kinerja, tetapi juga mendorong transformasi digital dalam sistem kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan ke arah yang lebih modern dan efisien.

Nantinya hasil aksi perubahan diarsipkan dalam bentuk yang lebih menarik, yakni dengan format Majalah cetak yang lebih ringkas dan menarik. Sedangkan Laporan Utama disajikan dalam bentuk digital serta disampaikan ke LAN RI Melalui BPSDMD Prov Sumsel yang akan diketahui oleh mentor, coach, dan pimpinan instansi untuk memperkuat legitimasi dan publikasi kelembagaan.

B. Keberhasilan Mendapat Dukungan dan Komitmen Replikasi

Keberhasilan aksi perubahan "Peningkatan Akuntabilitas Target Dan Capaian Kinerja Dengan Menggunakan Data Yang Valid Dan Aktual Pada Renstra Dinas Kelautan Dan Perikanan 2025-2029 Provinsi Sumatera Selatan" tidak hanya ditunjukkan dari implementasinya dalam jangka pendek, tetapi juga melalui dukungan kelembagaan yang kuat dan peluang replikasi yang terbuka. Hal ini tercermin dari komitmen berbagai pihak untuk menjadikan aksi perubahan sebagai model kerja yang terintegrasi dalam kebijakan dan perencanaan strategis.

Secara khusus, dukungan tersebut terlihat dari proses penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) DKP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029, di mana hasil dari aksi perubahan telah diakomodasi sebagai bagian dari penyempurnaan indikator kinerja. Dengan menggunakan data yang valid dan berbasis lapangan, indikator-indikator seperti Nilai Tukar Nelayan (NTN), Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi), dan Angka Konsumsi Ikan (AKI) dimasukkan sebagai pengganti indikator yang sebelumnya hanya fokus pada volume produksi. Pendekatan ini dinilai lebih representatif terhadap kesejahteraan pelaku utama sektor kelautan dan perikanan.

Langkah ini diperkuat dengan dukungan penuh dari pimpinan instansi yang secara terbuka menyatakan komitmennya untuk menjadikan indikator hasil aksi perubahan sebagai rujukan resmi dalam pengukuran kinerja strategis DKP. Unit teknis di bidang perikanan budidaya, tangkap, serta penyuluhan juga menyampaikan kesediaan untuk mendukung pengumpulan data lapangan secara berkala dan memastikan keabsahan data melalui proses verifikasi internal.

Lebih lanjut, hasil aksi perubahan telah didiseminasikan dalam berbagai forum lintas sektor seperti Forum Perangkat Daerah (FPD) dan forum koordinasi pembangunan, yang memungkinkan terbentuknya pemahaman bersama lintas OPD dan kabupaten/kota. Bahkan, sejumlah perwakilan kabupaten/kota menyatakan ketertarikan untuk mereplikasi pendekatan ini dalam perencanaan daerah mereka, khususnya dalam penyusunan Renstra perangkat daerah dan penyempurnaan dokumen LAKIP.

Dengan demikian, keberhasilan aksi perubahan ini tidak hanya terletak pada efektivitas teknis, tetapi juga pada keberhasilannya memperoleh legitimasi, dukungan politis, dan potensi skalabilitas ke berbagai level pemerintahan. Aksi perubahan ini kini berdiri sebagai model praktik baik yang siap diadopsi lebih luas guna meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kualitas perencanaan kinerja di sektor kelautan dan perikanan.

Hasil diseminasi menunjukkan respon positif dari berbagai pihak terhadap substansi dan manfaat aksi perubahan. Beberapa bentuk keberhasilan dalam membangun dukungan dan potensi replikasi antara lain:

1. Dukungan Pimpinan Instansi

Kepala Dinas menyatakan komitmen untuk mengadopsi indikator hasil aksi ke dalam dokumen Renstra DKP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029 sebagai indikator resmi kinerja strategis dinas.



Gambar 6.3. Video dan Pernyataan Dukungan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov Sumsel

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan secara tegas menyampaikan komitmen dan dukungannya terhadap implementasi seluruh aturan dan ketentuan yang berlaku, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dalam rangka mewujudkan program dan kegiatan yang tepat sasaran, efektif, serta akuntabel.

Dukungan tersebut diwujudkan dengan memastikan bahwa seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan program kegiatan di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan mengikuti pedoman yang telah ditetapkan, termasuk ketentuan sistematika penyusunan dokumen perencanaan sesuai dengan Permendagri, arahan dari Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, serta petunjuk teknis dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan juga menegaskan bahwa upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi menjadi prioritas dalam tata kelola organisasi, agar setiap program dan kegiatan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya pelaku utama sektor kelautan dan perikanan.

Dengan konsistensi dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut, diharapkan pada masa mendatang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan dapat meraih predikat istimewa “A” dalam penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang mencerminkan bahwa organisasi telah dikelola secara efektif, efisien, dan berorientasi hasil sesuai dengan visi dan misi pembangunan daerah.

2. Komitmen dan dukungan Bidang Teknis dan instansi terkait.

PPTKP,

Sebagai bagian dari upaya memastikan keberhasilan pelaksanaan aksi perubahan dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029, komitmen dan dukungan dari seluruh pihak terkait menjadi faktor yang sangat penting. Dukungan tersebut datang dari berbagai unsur, antara lain:

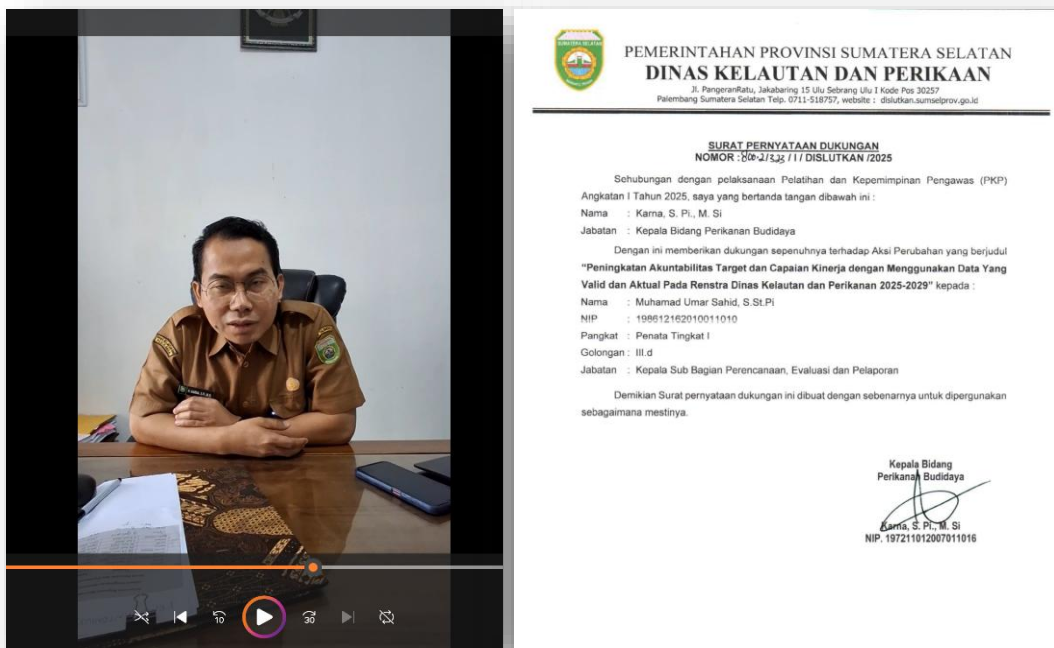
➤ Kepala Bidang Teknis di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan

Sebagai penanggung jawab langsung atas data sektoral perikanan tangkap, perikanan budidaya, serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, Kepala Bidang Teknis menyatakan komitmennya untuk mendukung penyediaan data yang valid dan faktual. Dalam porsi kewenangannya, Kepala Bidang Teknis memastikan bahwa seluruh unit di bawah koordinasi bidang masing-masing melaksanakan pengumpulan data, verifikasi, dan penginputan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Berikut adalah dukungan Kepala Bidang Teknis di DKP Sumsel:



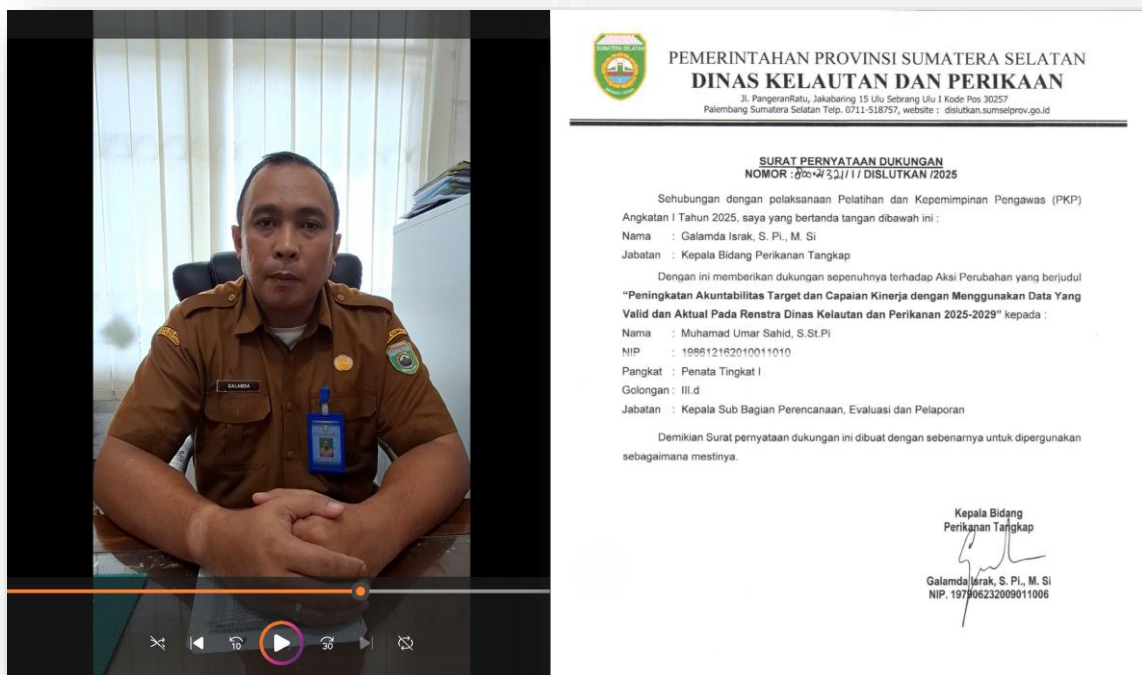
Gambar 6.4. Video dan Pernyataan Dukungan Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Prov Sumsel



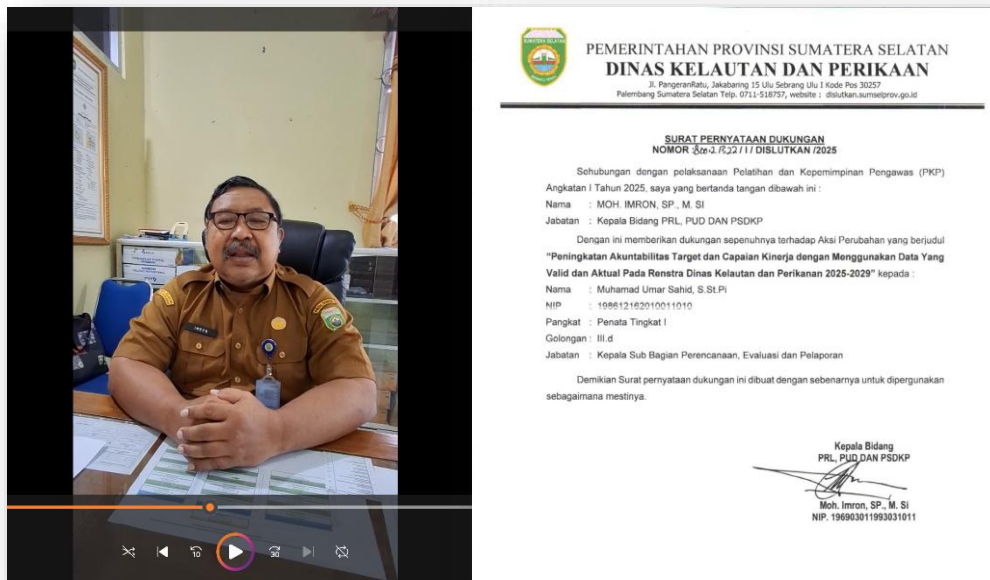
Gambar 6.5. Video dan Pernyataan Dukungan Kabid Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Prov Sumsel



Gambar 6.7. Video dan Pernyataan Dukungan Kabid PUPMHKP Dinas Kelautan dan Perikanan Prov Sumsel



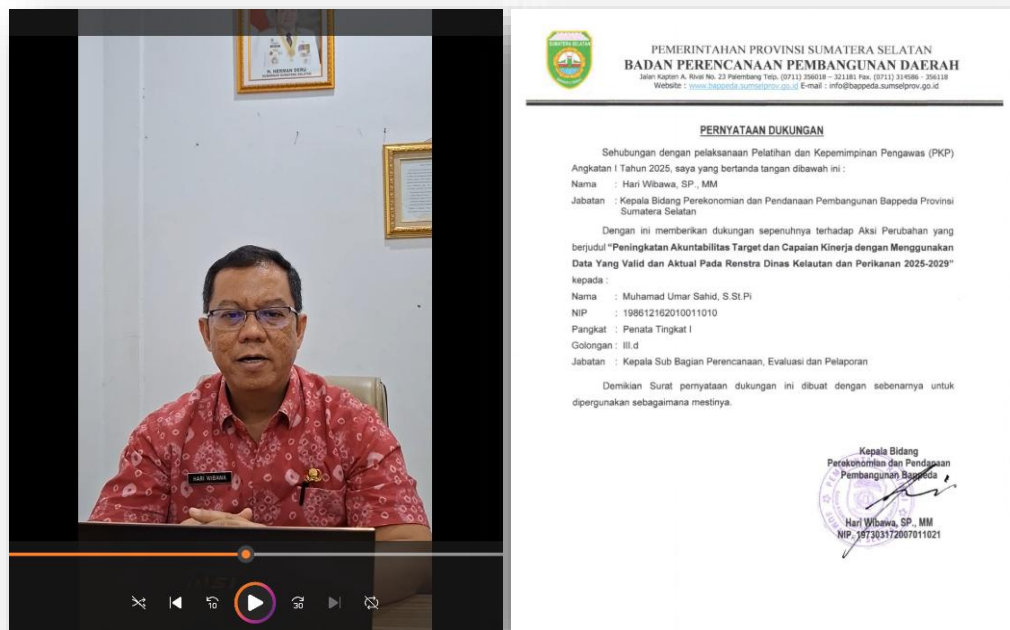
Gambar 6.8. Video dan Pernyataan Dukungan Kabid Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Prov Sumsel



Gambar 6.9. Video dan Pernyataan Dukungan Kabid PRL, PUD dan PSDKP Dinas Kelautan dan Perikanan Prov Sumsel

➤ Bappeda Provinsi Sumatera Selatan (Bidang Perekonomian)

Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengoordinasikan perencanaan pembangunan daerah, Bappeda Provinsi Sumatera Selatan melalui Bidang Perekonomian memberikan dukungan penuh terhadap penyusunan Renstra DKP Provinsi Sumsel yang selaras dengan visi dan misi Gubernur. Dalam porsi tugasnya, Bappeda melakukan asistensi, pengawalan terhadap sistematika dan substansi dokumen Renstra, serta memastikan bahwa seluruh indikator kinerja, program, kegiatan, dan anggaran.



Gambar 6.10. Video dan Pernyataan Dukungan Kabid Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan BAPPEDA Prov Sumsel

➤ **Kepala Dinas Perikanan di Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan**

Sebagai pelaksana teknis di tingkat daerah, Kepala Dinas Perikanan di kabupaten/kota memiliki kewenangan dalam pengelolaan program dan kegiatan sektor kelautan dan perikanan di wilayah masing-masing.

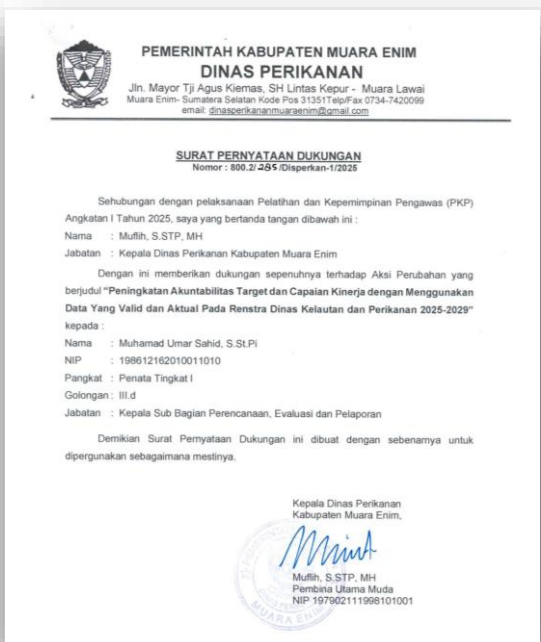
Melalui sinergi dan dukungan dari seluruh pihak sesuai dengan porsi kewenangan masing-masing, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan optimis bahwa dokumen Renstra 2025–2029 yang disusun akan lebih akuntabel, tepat sasaran, dan mampu menjadi panduan utama dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan di Sumatera Selatan.



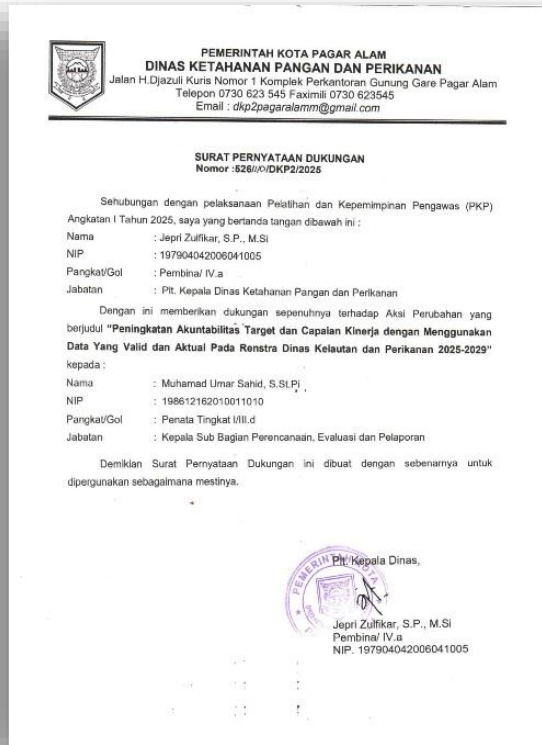
Gambar 6.11. Video dan Pernyataan Dukungan Kepala Dinas Perikanan Kota Prabumulih



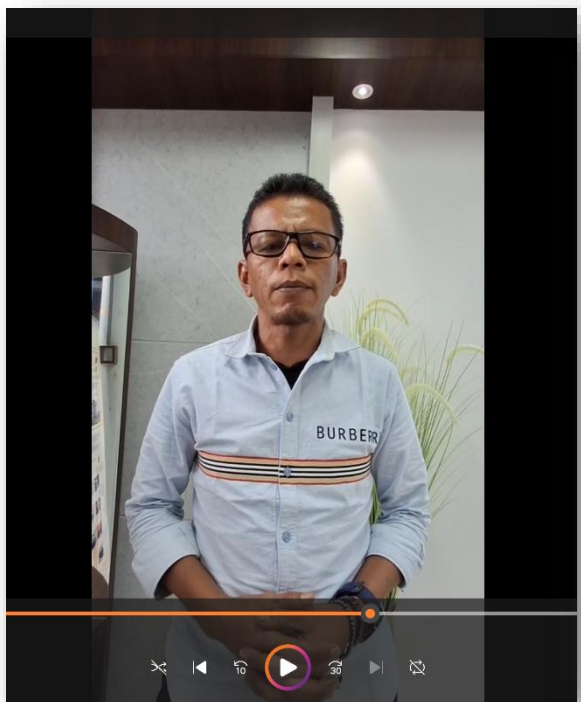
Gambar 6.12. Video dan Pernyataan Dukungan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Banyuasin



Gambar 6.13. Video dan Pernyataan Dukungan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Muara Enim



Gambar 6.14. Video dan Pernyataan Dukungan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagar Alam



Gambar 6.15. Video dan Pernyataan Dukungan Kepala Perikanan Kabupaten Lahat

3. **Potensi Replikasi Lintas Daerah.**

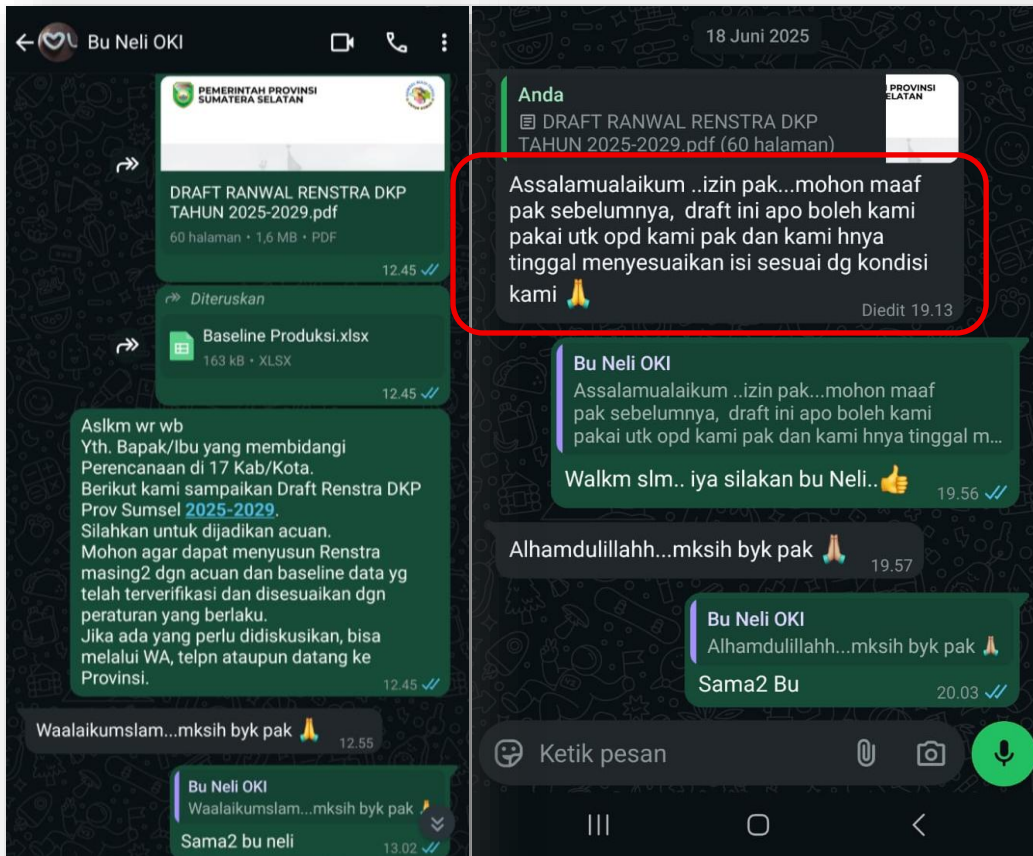
Melalui proses penyampaian dan sosialisasi Draft Dokumen Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029 yang dilakukan secara bertahap melalui media online seperti grup WhatsApp dan pesan pribadi, telah muncul respons positif dari beberapa kabupaten/kota di Sumatera Selatan.

Beberapa kabupaten/kota, setelah menerima informasi dan dokumen yang disampaikan, menyatakan ketertarikan untuk mengadopsi pendekatan serupa dalam penyusunan Renstra di daerah masing-masing. Hal ini mencakup tidak hanya isi substansi dokumen, tetapi juga metode pengumpulan data capaian kinerja yang berbasis digital menggunakan *Google Form* dan *Google Spreadsheet*, serta prinsip penyelarasan indikator kinerja utama dengan visi dan misi kepala daerah setempat.

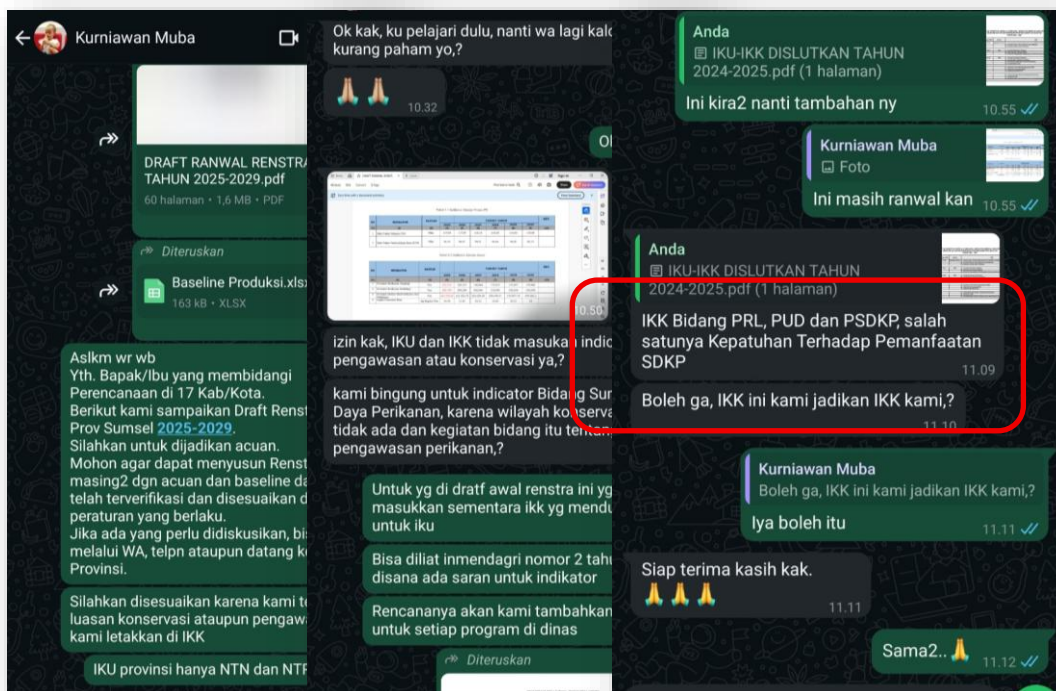
Melalui penerapan strategi komunikasi yang tepat dan diseminasi informasi secara berjenjang, aksi perubahan yang dilaksanakan oleh DKP Provinsi Sumatera Selatan terbukti tidak hanya berdampak secara internal dalam organisasi, tetapi juga membuka peluang untuk direplikasi dan diadopsi secara lebih luas oleh unit kerja lain di sektor kelautan dan perikanan di tingkat kabupaten/kota.

Dengan adanya potensi replikasi ini, diharapkan akan terbentuk keseragaman sistem perencanaan dan pelaporan kinerja di seluruh wilayah Sumatera Selatan, yang pada akhirnya mendukung terwujudnya perencanaan pembangunan kelautan dan perikanan yang lebih efektif, efisien, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan.

Berikut adalah Beberapa Kabupaten/Kota yang melaporkan bahwa akan melakukan replikasi / adopsi terhadap Renstra DKP Prov Sumsel diantaranya adalah Kabupaten OKI dan MUBA :

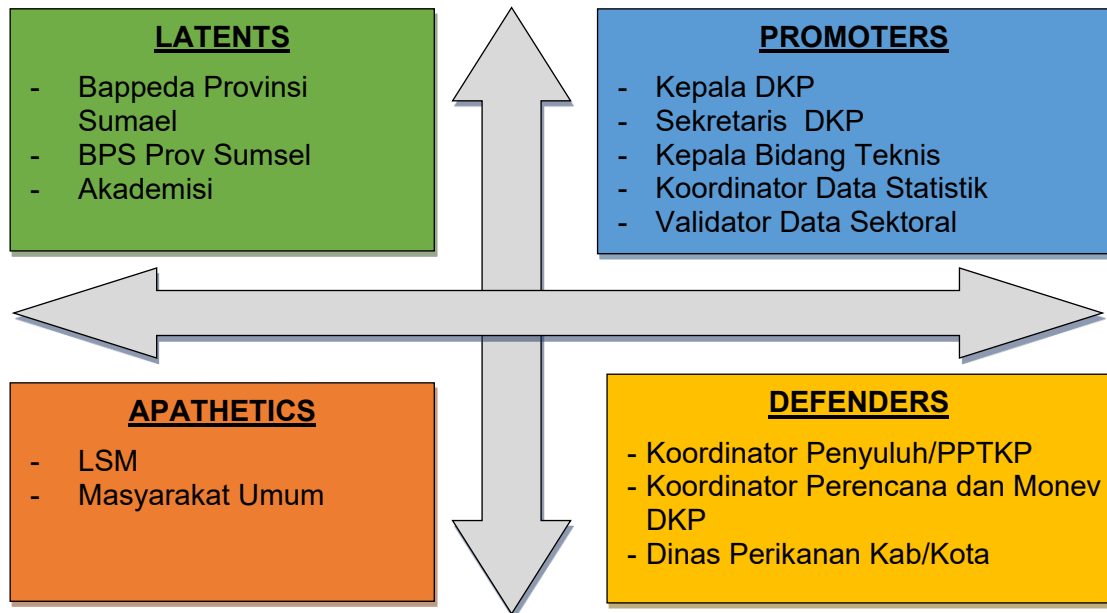


Gambar 6.16. Kabupaten OKI, izin untuk menggunakan Draft Renstra DKP Prov Sumsel untuk bisa di replikasi (Ter-Diseminasikan)

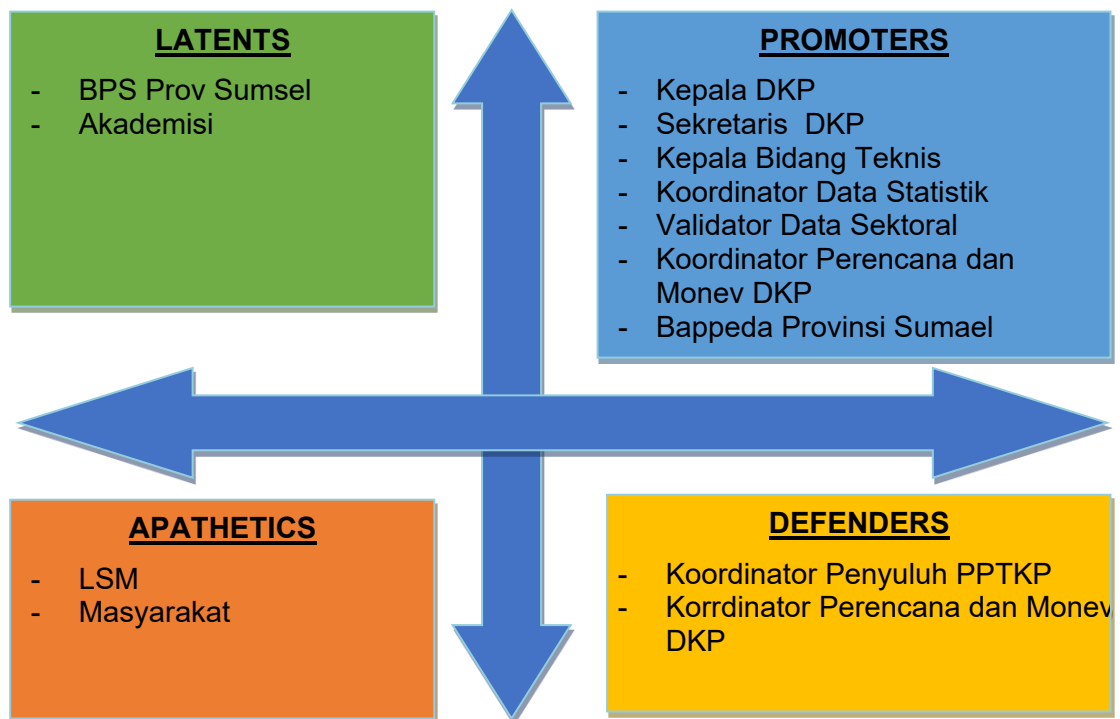


Gambar 6.17. Kabupaten MUBA, izin untuk menggunakan IKK pada Draft Renstra DKP Prov Sumsel untuk bisa di replikasi (Ter-Diseminasikan)

C. Peta Stakeholder: Sebelum dan Sesudah Aksi Perubahan



Gambar 6.18. Peta Stakeholder Sebelum Aksi Perubahan



Gambar 6.19. Peta Stakeholder Setelah Aksi Perubahan

Sebelum Aksi Perubahan

1. Promoters (Penggerak Utama)

Kepala DKP, Sekretaris DKP, Kepala Bidang Teknis, Koordinator Data Statistik, Validator Data. Mereka merupakan pelaku struktural internal yang secara langsung bertanggung jawab atas perencanaan, pelaporan, dan pengelolaan data. Dukungan mereka sangat kuat sejak awal.

2. Defenders (Pendukung Teknis)

Koordinator Penyuluh/PPTKP, Koordinator Perencana dan Monev DKP, Dinas Perikanan Kab/Kota. Mereka memahami isu data dan pelaporan tetapi belum cukup diberdayakan secara sistematis dalam pengambilan keputusan.

3. Latents (Berpotensi Mendukung)

Bappeda Provinsi, BPS Provinsi, Akademisi. Meski memiliki pengaruh dan otoritas dalam perencanaan makro dan statistik resmi, mereka belum dilibatkan secara intensif oleh DKP dalam sistem perencanaan data sektoral.

4. Apathetics (Pasif)

LSM dan Masyarakat Umum. Keterlibatan publik belum menjadi prioritas dalam proses teknokratis penyusunan Renstra dan pelaporan kinerja.

Setelah Aksi Perubahan

1. Promoters

Kepala DKP, Sekretaris DKP, Kepala Bidang Teknis, Koordinator Statistik, Validator Data, **Koordinator Perencana dan Monev, Bappeda Provinsi Sumsel.**

Perubahan Utama:

Bappeda dan Koordinator Perencana dan Monev naik ke Promoters. Hal ini disebabkan peran mereka menjadi strategis dalam:

- Menyelaraskan dokumen perencanaan lintas sektor.
- Melakukan verifikasi dan integrasi indikator capaian dengan RPJMD provinsi.
- Terlibat aktif dalam rapat koordinasi teknis dan penyusunan RENSTRA 2025–2029.

Mereka mulai tidak hanya menjadi pengguna data, tetapi ikut mengawal validitas dan sinkronisasi indikator.

2. Defenders

Koordinator Penyuluh/PPTKP, Dinas Perikanan Kab/Kota. Peran penyuluh dan Dinas Kab/Kota tetap penting dalam mendampingi proses verifikasi lapangan, namun fokus mereka lebih pada operasionalisasi dan pelaporan teknis rutin.

3. Latents

BPS Sumsel, Akademisi. BPS tetap menjadi sumber data statistik resmi, namun belum ada mekanisme kolaborasi aktif seperti MoU formal atau sinkronisasi sistem data. Akademisi masih dalam tahap potensial kolaborasi riset dan uji validitas.

BAB VII.

PENGEMBANGAN POTENSI DIRI

A. Pemetaan Sikap, Perilaku Kepemimpinan dan Strategi Pengembangan

Dalam pelaksanaan aksi perubahan ini, pengembangan potensi diri diarahkan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas sebagai pejabat struktural yang memiliki tanggung jawab dalam menyusun perencanaan dan pelaporan kinerja di lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan hasil rekap penilaian gabungan antara peserta dan mentor, maka terdapat beberapa aspek dari peserta yang dianggap perlu untuk dilakukan rencana pengembangan potensi diri, agar kedepan diharapkan bahwa peserta dapat memaksimalkan potensi diri yang ada dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang di Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan.

Aspek tersebut terdiri dari beberapa komponen dan sub komponen antara lain sebagai berikut :

Tabel 7.1. Aspek Peserta Yang Perlu dikembangkan

No	Komponen	Sub Komponen	Nilai Rata-Rata
1	Integritas	Kejujuran	8.00
2	Kerja Sama	Fleksibilitas	8.00
		Komintmen dalam Tim	8.00
3	Mengelola Perubahan	Orientasi pada hasil	8.00

Berdasarkan hasil pemetaan awal pada saat penyusunan Rancangan Aksi Perubahan, saya mengidentifikasi beberapa kompetensi utama yang perlu diperkuat, yaitu:

Tabel 7.2. Aspek Peserta Yang Perlu dikembangkan

No.	Komponen / Sub-Komponen	Tujuan Pengembangan	Strategi Pengembangan	Ukuran Keberhasilan
1	Integritas a. Tanggung Jawab b. Kedisiplinan c. Kejujuran	Meningkatkan konsistensi antara ucapan dan tindakan melalui kinerja yang tepat waktu dan akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun jadwal kerja dan jurnal pribadi mingguan • Melaksanakan kegiatan sesuai rencana • Menyampaikan laporan secara terbuka kepada atasan/tim • Mengakui kekeliruan dan melakukan perbaikan • Menunjukkan keteladanan dalam menyelesaikan tugas 	<ul style="list-style-type: none"> • Tugas diselesaikan tepat waktu • Laporan progres terdokumentasi baik • Kepercayaan tim meningkat
2	Kerja Sama a. Fleksibilitas b. Komitmen dalam Tim	Mengembangkan kemampuan kolaboratif yang adaptif serta menjaga kebersamaan dalam tim kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Aktif berpartisipasi dalam rapat koordinasi • Menerima perbedaan pendapat dengan positif • Menyesuaikan gaya komunikasi • Hadir penuh dalam kegiatan dan mendukung rekan kerja • Mendorong solusi bersama dalam situasi sulit 	<ul style="list-style-type: none"> • Kolaborasi tim berjalan efektif • Tidak terjadi konflik serius • Partisipasi tim tetap konsisten
3	Mengelola Perubahan Orientasi pada Hasil	Memastikan kegiatan berorientasi pada hasil nyata dan terukur	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun indikator keberhasilan yang spesifik dan terukur 	<ul style="list-style-type: none"> • Output dan outcome tercapai • Evaluasi menunjukkan kepuasan peserta/stakeholder

No.	Komponen / Sub-Komponen	Tujuan Pengembangan	Strategi Pengembangan	Ukuran Keberhasilan
			<ul style="list-style-type: none"> • Menyelaraskan kegiatan dengan hasil yang diharapkan • Menggunakan data evaluasi untuk tindak lanjut Menyusun laporan hasil secara sistematis 	<ul style="list-style-type: none"> • Ada tindak lanjut

B. Proses dan Progress/Hasil Pelaksanaan Strategi

Dalam pelaksanaan aksi perubahan, strategi pengembangan potensi diri diimplementasikan secara nyata dalam berbagai bentuk kegiatan. Berikut ini uraian proses dan hasil yang dicapai:

1. Integritas dan Kepemimpinan yang Akuntabel

Saya memimpin tim secara terbuka dan partisipatif. Setiap keputusan didiskusikan bersama, dan pelaporan dilakukan secara berkala kepada atasan. Hasilnya, tim menunjukkan loyalitas tinggi dan mampu menyelesaikan seluruh tugas sesuai jadwal.

2. Kemampuan Pengambilan Keputusan yang Tanggap

Ketika pelaksanaan pelatihan menghadapi hambatan logistik dan cuaca, saya dengan cepat menyusun opsi alternatif dan melakukan komunikasi dengan stakeholder untuk penyesuaian. Ini membuktikan bahwa respons cepat dan tepat sangat krusial dalam kondisi dinamis.

3. Penguatan Kerjasama Tim

Saya berinisiatif membentuk tim kecil berdasarkan bidang tugas, yang terdiri dari perencana kegiatan, dokumentator, fasilitator teknis, dan koordinator peserta. Dengan sistem ini, efektivitas kerja meningkat dan peran setiap anggota lebih jelas.

4. Komunikasi yang Efektif dan Persuasif

Saya memanfaatkan pelatihan komunikasi untuk menyampaikan ide dan meyakinkan stakeholder tentang pentingnya aksi perubahan. Presentasi saya dalam forum dinas mendapat respons positif dan mendorong terjadinya replikasi kegiatan di dua wilayah lain.

5. Kreativitas dan Adaptasi Teknologi

Saya belajar menyusun modul pelatihan digital sederhana dan menyampaikan materi secara visual agar lebih mudah dipahami oleh peserta. Ini termasuk pembuatan video pendek tentang cara kerja sistem bioflok dan pakan maggot yang terbukti efektif.

Pengembangan potensi diri selama aksi perubahan ini memberikan dampak signifikan terhadap efektivitas kepemimpinan saya. Kompetensi inti seperti komunikasi, integritas, inovasi, dan kerja sama tim telah meningkat melalui pembelajaran nyata di lapangan. Hal ini tidak hanya mendukung keberhasilan program, tetapi juga menjadi bekal penting dalam menjalankan tugas jabatan ke depan sebagai pemimpin pelayanan publik yang tangguh dan adaptif.

C. Perbandingan Rencana dan Realisasi

No	Komponen / Sub-Komponen	Kegiatan Pengembangan Potensi Diri untuk Mendukung Pelaksanaan Aksi Perubahan	Kegiatan / Tahapan Aksi Perubahan Terkait	Waktu Pelaksanaan		Hasil yang Diharapkan / Evidence	Hasil (Realisasi)
				Rencana	Realisasi		
1	Integritas a. Tanggung Jawab b. Kedisiplinan c. Kejujuran	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun dan melaksanakan rencana kerja sesuai target waktu. - Membuat laporan progres kegiatan secara berkala. - Menerapkan transparansi dalam penyampaian informasi kegiatan. 	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pelatihan serta monitoring	Mei – Juni 2025	Sesuai jadwal	Laporan mingguan, jurnal pribadi, laporan pertanggungjawaban kegiatan	Semua kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal. Laporan progres disampaikan lengkap dan tepat waktu.
2	Kerja Sama a. Fleksibilitas b. Komitmen dalam Tim	<ul style="list-style-type: none"> - Menyesuaikan gaya komunikasi dengan karakter tim. - Mendorong keterlibatan aktif seluruh anggota tim. - Menjaga semangat tim di tengah tekanan jadwal. 	Koordinasi tim pelaksana, evaluasi kegiatan, revisi jadwal aksi	Juni – Juli 2025	Juni – Agustus 2025	Notulen rapat, testimoni tim, hasil kerja tim berjalan sesuai target bersama	Dinamika tim berjalan baik, partisipasi aktif, hasil kerja tim sesuai target dan mendapat apresiasi mentor.
3	Mengelola Perubahan • Orientasi pada Hasil	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun indikator keberhasilan aksi secara spesifik. - Memastikan semua kegiatan mengarah pada hasil yang dapat diukur. - Melakukan evaluasi pasca kegiatan. 	Penyusunan laporan akhir, evaluasi pasca pelatihan, monitoring tindak lanjut kelompok percontohan	Juli – Des 2025	Juli 2025 – Jan 2026	Laporan evaluasi pelatihan, indikator capaian, hasil monitoring pasca kegiatan	Indikator hasil tercapai, evaluasi peserta menunjukkan kepuasan tinggi, kelompok percontohan aktif berjalan

BAB VIII.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Aksi perubahan yang diimplementasikan dengan judul *“Peningkatan Akuntabilitas Target Dan Capaian Kinerja Dengan Menggunakan Data Yang Valid Dan Aktual Pada Renstra Dinas Kelautan Dan Perikanan 2025-2029 Provinsi Sumatera Selatan”* menjadi tonggak penting dalam membenahan sistem perencanaan dan pelaporan kinerja organisasi. Permasalahan utama yang menjadi latar belakang adalah belum optimalnya penyusunan capaian kinerja yang selama ini cenderung administratif dan belum berbasis data yang tervalidasi.

Melalui tahapan aksi yang terstruktur, mulai dari perumusan masalah, pembentukan Tim Efektif, penyusunan SOP dan format pelaporan, sosialisasi, uji coba, hingga konsolidasi data dengan instansi seperti BPS dan Bappeda, diperoleh beberapa pencapaian strategis, antara lain:

- Terwujudnya sistem pelaporan capaian kinerja yang menggunakan data aktual dari sumber yang kredibel seperti penyuluh, PPTKP, dan BPS.
- Terintegrasinya indikator kesejahteraan nasional (NTN, NTPI, dan AKI) ke dalam format pelaporan kinerja dan rancangan Renstra DKP Tahun 2025–2029.
- Meningkatnya sinergi antarunit teknis dan Sub Bagian PEP dalam membangun pemahaman bersama terhadap pentingnya validitas data sebagai dasar pengambilan keputusan.
- Tumbuhnya kesadaran kolektif di internal DKP terhadap pentingnya menyusun indikator berbasis outcome, bukan hanya output.

Lebih dari sekadar penyelesaian administratif, aksi perubahan ini telah membentuk pondasi kuat menuju perencanaan pembangunan sektor kelautan

dan perikanan yang lebih terukur, berorientasi hasil, dan berdampak nyata bagi masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan. Dengan begitu, hasil dari aksi perubahan ini akan menjadi pijakan penting dalam transformasi kinerja organisasi ke depan.

B. Saran

Untuk memastikan keberlanjutan, perluasan manfaat, dan penguatan hasil dari pelaksanaan aksi perubahan, maka perlu dilakukan serangkaian upaya tindak lanjut yang bersifat strategis dan berkelanjutan. Saran-saran ini dirumuskan dengan mempertimbangkan tantangan yang dihadapi selama proses implementasi, kebutuhan organisasi dalam jangka panjang, serta peluang penguatan sistem kelembagaan dalam penyusunan perencanaan dan pelaporan kinerja. Dengan dasar pemikiran tersebut, berikut saran-saran yang dapat diimplementasikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan:

1. Dokumentasi dan Penetapan Kebijakan Internal

- Perlu diterbitkan regulasi internal berupa pedoman/SOP resmi yang tidak hanya mengatur teknis penyusunan capaian kinerja berbasis data, tetapi juga menetapkan mekanisme verifikasi, validasi, serta pelaporan berjenjang. Dokumen ini menjadi rujukan operasional yang bersifat mengikat bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan. Dengan adanya regulasi tersebut, sistem penyusunan capaian kinerja tidak lagi bergantung pada inisiatif individu atau proyek sesaat, tetapi menjadi bagian dari sistem kelembagaan yang berkelanjutan dan terintegrasi.

2. Peningkatan Kompetensi SDM

- Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor kunci dalam menjamin keberhasilan transformasi sistem perencanaan dan pelaporan kinerja yang akuntabel. Oleh karena itu, perlu dilakukan pelatihan dan pengembangan secara berkelanjutan yang difokuskan pada peningkatan kemampuan teknis dalam mengelola data, melakukan analisis kinerja berbasis indikator kesejahteraan, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk pelaporan.
- Selain pelatihan teknis, penting pula diberikan penguatan kapasitas manajerial kepada pejabat struktural agar memiliki kemampuan dalam menyusun perencanaan strategis, pengambilan keputusan berbasis data, serta kepemimpinan yang kolaboratif. Pengembangan ini dapat dilakukan melalui pelatihan tematik, studi banding, serta fasilitasi mentoring dan coaching di lingkungan kerja.
- Untuk mendukung keberlanjutan kompetensi, Dinas Kelautan dan Perikanan perlu menjalin kerja sama dengan lembaga pelatihan, perguruan tinggi, dan instansi lain yang memiliki spesialisasi dalam bidang perencanaan, statistik, dan pembangunan sektor kelautan dan perikanan.
- Perlu dilakukan pelatihan berkelanjutan dalam hal pengolahan data, pemanfaatan indikator kesejahteraan, dan pelaporan kinerja berbasis teknologi.

3. Digitalisasi Sistem Penginputan baseline data

- Pengembangan aplikasi sederhana berbasis Excel atau pemanfaatan platform berbasis Google Workspace seperti Google Form dan Google Spreadsheet perlu segera dilakukan untuk mempermudah proses input, penyimpanan, dan validasi data lintas

bidang. Google Form dapat digunakan sebagai alat input data lapangan oleh penyuluh atau UPTD, yang hasilnya langsung terhubung secara otomatis dengan Google Spreadsheet. Melalui sistem ini, data yang masuk dapat langsung dimonitor, diverifikasi, dan direkapitulasi secara real-time tanpa perlu proses manual. Selain meningkatkan efisiensi kerja, penggunaan tools ini juga mendukung transparansi dan integrasi data antar unit kerja serta memudahkan dalam evaluasi berkala oleh Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan (PEP).

4. Replikasi di Tingkat Kabupaten/Kota

- Praktik baik ini perlu direplikasi melalui pembinaan teknis secara terstruktur kepada perencana di DKP kabupaten/kota agar terbentuk keseragaman dalam metodologi pengumpulan dan pengolahan data capaian kinerja. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keselarasan indikator antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, sehingga pelaporan dan perencanaan program dapat disusun secara sinergis dan saling mendukung. Dengan sistem data yang terintegrasi dan berkualitas, target-target indikator dalam dokumen perencanaan, seperti Renstra dan RPJMD, akan lebih akurat, harmonis, dan mencerminkan kebutuhan riil di setiap wilayah. Selain itu, konsistensi data juga akan memperkuat posisi provinsi dalam menyusun kebijakan sektoral yang responsif dan berbasis bukti.

5. Penguatan Sinergi Lintas Lembaga

- Perlu ditingkatkan kemitraan antara DKP dengan BPS, Bappeda, dan lembaga riset untuk menjamin integrasi data dan konsistensi indikator sektoral. Sinergi ini akan menghasilkan keselarasan antar data dan akurasi yang lebih baik dengan kondisi nyata di lapangan, menghindari terjadinya perbedaan sajian data seperti produksi

perikanan tangkap dan budidaya yang selama ini sering menjadi kendala dalam proses evaluasi dan perencanaan. Dengan basis data yang telah selaras antar wilayah dan instansi, maka indikator capaian kinerja dapat dijadikan dasar yang kuat dalam perumusan program dan kegiatan yang tepat sasaran, berorientasi pada hasil, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat pelaku utama kelautan dan perikanan.

Dengan pelaksanaan saran-saran tersebut, diharapkan sistem perencanaan dan pelaporan kinerja di sektor kelautan dan perikanan Provinsi Sumatera Selatan akan semakin efektif, efisien, dan berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat.

LAMPIRAN

1. SK Tim Efektif



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jl. Pangeran Ratu, Jakabaring
Palembang (Telp. 0711-518757)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 158 / I / Dislutkan / 2025
800.1.5

TENTANG

AKUNTABILITAS TARGET DAN CAPAIAN KINERJA DENGAN MENGGUNAKAN DATA YANG VALID DAN AKTUAL PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan I Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025, masing-masing peserta akan membuat aksi perubahan.
- b. Bahwa untuk tercapainya kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim yang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan.
- c. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut dalam huruf a dan b perlu di atur dan di tetapkan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan Tentang Pembentukan Tim Efektif Aksi Perubahan Akuntabilitas Target dan Capaian Kinerja Dengan Menggunakan Data Yang Valid dan Aktual pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019);
3. Peraturan Lembaga Administrator Negara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Administrator (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1091);
4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
5. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
6. Surat dari Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 890/0723/PBSDMD/V/2025 tanggal 25 Februari 2025 tentang Pemanggilan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan I Prov Sumsel Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF AKSI PERUBAHAN AKUNTABILITAS TARGET DAN CAPAIAN KINERJA DENGAN MENGGUNAKAN DATA YANG VALID DAN AKTUAL PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

- KESATU** : Membentuk Tim Kerja Aksi Perubahan pembentukan tim efektif aksi perubahan akuntabilitas target dan capaian kinerja dengan menggunakan data yang valid dan actual pada dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan dengan Susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran di bawah ini :
- KEDUA** : Tim Kerja Aksi Perubahan ini sebagaimana dimaksud dari Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Membantu pelaksanaan aksi perubahan;
 2. Menyiapkan, melaksanakan serta mengkoordinasikan tentang pelaksanaan aksi perubahan;
 3. Bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA** : Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Kepala ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 16 Mei 2025

a.n. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Sumatera Selatan



Vivin Indira Sari, ST, MT.
Pembina Tingkat I
NIP. 197904182001122002

Tembusan Yth :

1. Gubernur Sumatera Selatan;

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumsel
Nomor : 158 /Dislutkan/1/2025
Tanggal : 16 Mei 2025
Tentang : Pembentukan Tim Efektif

**TIM EFEKTIF AKSI PERUBAHAN AKUNTABILITAS TARGET DAN CAPAIAN
KINERJA DENGAN MENGGUNAKAN DATA YANG VALID DAN AKTUAL PADA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN**

1. Penanggung Jawab : **Aries Irwan Wahyu, S.STPi.,M.Si** – Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan
2. Ketua : **Vivin Indira Sari, ST,MT** – Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan
3. Sekretariat Koordinator :
 1. Jailani SP : Koordinator Statistik
 2. Novariadi, S.Pi : Koordinator Perencanaan
 3. Richa Oktapuri A.Md : Koordinator Monitoring dan Evaluasi
5. Tim Teknis :
 - Ketua : Adlan Hawari Dewantara, S.Pi
 - Anggota : 1. Novani Azizah S.Tr.Pi
 - Anggota : 2. Gugus Stiawan Fatra, S.Kom
6. Tim Administrasi :
 - Ketua : Ayu Satya Damayanti, S.Pi
 - Anggota : 1. Nova Sari, A.Md
 - Anggota : 2. Yudha Eka Sanjaya, S.Tr.Pi

a.n. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Sumatera Selatan



Vivin Indira Sari, ST, MT.
Pembina Tingkat I
NIP. 197904182001122002

2. Rapat Tim Efektif



3. Perumusan Google Form dan Google Spreadsheet untuk Baseline Data Online



4. Baseline Data Online

PKP Umar - Google Drive x IKU dan IKK - Google Formulir x +

docs.google.com/forms/d/1wgVhckDvL... | Dapublikasikan

Pertanyaan Jawaban 13 Setelan

Bagian 1 dari 11

Target Capaian IKU dan IKK Dinas Kelautan dan Perikanan

Deskripsi formulir

Indikator

- Indikator Kinerja Utama (IKU)
- Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Setelah bagian 1 Lanjutkan ke bagian berikut

Bagian 2 dari 11

Program Dinas Kelautan dan Perikanan IKU

Deskripsi (opsional)

Program

- Pengelolaan Perikanan Tangkap
- Pengelolaan Perikanan Budidaya

Setelah bagian 2 Lanjutkan ke bagian berikut

Bagian 3 dari 11

Pengelolaan Perikanan Tangkap IKU

Deskripsi (opsional)

Baseline Produksi - Google Formulir

docs.google.com/spreadsheets/d/10brwiGp1kLgKi-JxP7ugh_iOzQVFI2se4mmAm6A8c/edit?gid=1913786344#gid=1913786344

File Edit Tampilan Sisipkan Format Data Alat Ekstensi Bantuan

100% Default... 10

Kab./Kota	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
PRODUKSI TANGKAP PUD (KG)						
BANYUASIN	22.246.412	10.665.104	11.146.857	10.683.337	13.535.312	12.002.875
EMPAT LAWANG	3.686.894	1.021.380	1.292.681	781.386	696.656	477.131
KOTA LUBUK LINGGAU	160.614	87.794	31.833	26.545	26.795	22.563
KOTA PAGAR ALAM	32.139	355.401	383.581	398.945	336.291	337.513
KOTA PALEMBANG	1.729.796	1.067.918	651.132	718.468	653.328	412.117
KOTA PRABUMULIH	44.089	130.124	202.819	161.768	142.314	142.383
LAHAT	349.178	611.849	66.527	59.861	45.526	32.469
MUARA ENIM	4.577.299	3.336.958	3.444.233	3.398.271	3.462.502	3.477.549
MUSI BANYUASIN	47.463.997	25.101.872	23.014.213	23.636.535	24.098.732	24.511.490
MUSI RAWAS	744.383	477.272	483.875	561.305	755.062	597.837
MUSI RAWAS UTARA	4.812.573	1.663.894	1.275.034	1.768.771	1.770.266	1.760.952
OGAN ILIR	8.503.114	8.509.056	8.509.910	8.509.914	8.546.945	8.613.596
OGAN KOMERING ILIR	5.885.706	5.327.285	9.081.758	15.534.286	17.387.748	16.563.037
OGAN KOMERING ULU	1.158.976	1.215.070	1.278.253	1.337.604	1.418.622	1.498.732
OGAN KOMERING ULU SELATAN	195.198	249.294	384.556	468.471	358.209	638.515
OGAN KOMERING ULU TIMUR	1.609.114	687.775	438.277	493.500	493.877	494.880
PENJALABAB LEHATANG ILIR	1.632.190	626.433	1.796.774	1.645.062	1.030.410	1.524.874
GRAND TOTAL	104.841.656	61.194.279	63.462.293	70.204.129	74.649.194	73.108.210

Kab./Kota	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
PRODUKSI TANGKAP LAUT (KG)						
BANYUASIN	64.587.261	42.878.611	44.227.359	48.580.352	48.889	48.889
OGAN KOMERING ILIR	28.105.073	21.475.484	10.050.431	32.456.893	38.55	38.55
GRAND TOTAL	92.692.334	64.354.095	54.277.790	81.037.245	87.45	87.45

Kab./Kota	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
PRODUKSI TANGKAP LAUT (TON)						
BANYUASIN	64.587	42.879	44.227	48.580	48.889	48.889
OGAN KOMERING ILIR	28.105	21.475	10.050	32.457	38.55	38.55
GRAND TOTAL	92.692	64.354	54.278	81.037	87.45	87.45

Produksi Tangkap

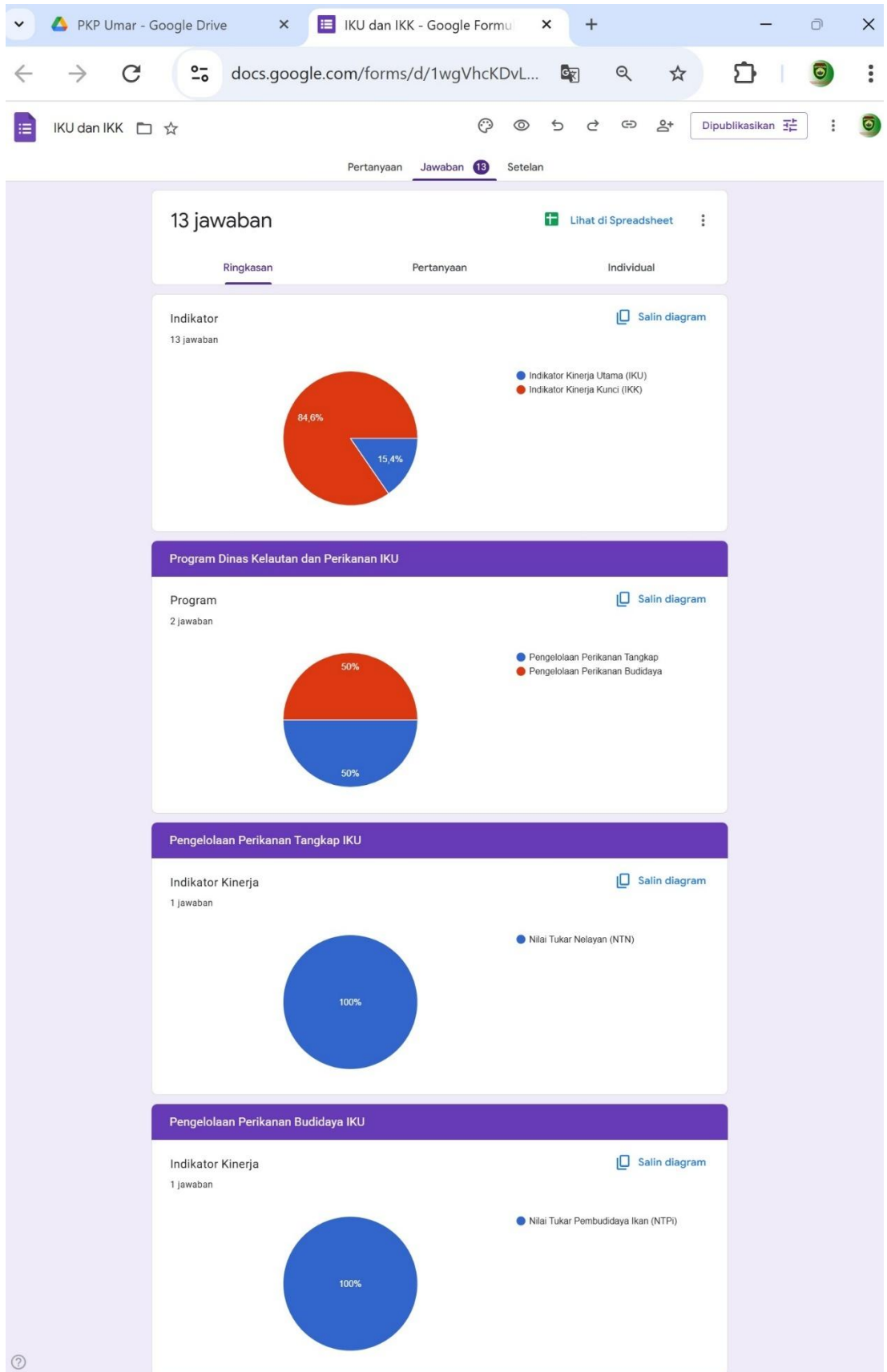
IKU dan IKK (Jawaban) - Google Formulir

docs.google.com/spreadsheets/d/1qjAeYsJtm1HWtXmldZ3ztUjE38O4zdDPHeKIQ2J-U/edit?resourcekey=&gid=166664348#gid=166664348

File Edit Tampilan Sisipkan Format Data Alat Ekstensi Bantuan

100% Default... 10

Timestamp	Program	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Indikator Kinerja
20/05/2025 15:25:02	Pengelolaan Perikanan Tangkap			1	1	1	1	1	Rekomendasi Perizinan Kapal
20/05/2025 15:31:28				10	10	10	10	10	
05/06/2025 14:22:46			118,41	120,55	122,12	123,71	125,32	126,95	
05/06/2025 14:26:26	Pengelolaan Perikanan		290000	295286	305000	315000	325000	335000	
05/06/2025 14:28:00	Pengelolaan Perikanan		15	17	34	51	68	85	
05/06/2025 14:28:10	Pengelolaan dan Pemas		30,76	31,45	32,13	32,83	33,51	34	
05/06/2025 14:30:54	Pengelolaan Perikanan		15	17	34	51	68	85	
05/06/2025 14:33:56	Pengelolaan Perikanan		84.729	89.282	91.068	82.890	94.747	96.642	Produksi Perikanan
05/06/2025 14:34:01	Pengelolaan Perikanan		500000	600000	610000	620000	630000	640000	
05/06/2025 14:35:48	Pengelolaan Perikanan		73.879	76.055	77.576	79.127	80.710	82.324	Produksi Perikanan
05/06/2025 14:36:02			94	94,35	94,4	94,45	94,5	94,55	
05/06/2025 14:36:48	Pengelolaan Perikanan		25	30	35	40	45	50	Rekomendasi Periz
05/06/2025 14:41:46	Pengelolaan dan Pemas		18	20	22	24	26	28	
05/06/2025 14:47:07	Pengelolaan dan Pemas		211.075,02	221.553,75	228.200,36	235.046,37	242.097,76	249.360,70	
05/06/2025 14:49:41	Pengelolaan dan Pemas		97	100	103	106	109	112	



5. Rapat Koordinasi Perubahan Renstra dengan Bidang Teknis dan Perumusan indikator IBEI







Misi	Tujuan	Indikator Tujuan / Deskripsi Variabel	Target Capaian Indikator Sasaran Sampai Tahun 2030										OPD Penanggung Jawab			
			2025	Satuan	2026	Satuan	2027	Satuan	2028	Satuan	2029	Satuan		2030	Satuan	
MISI II : Mewujudkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	2 Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah Belum Optimal	Indeks Ekonomi Biru Indonesia														
		Peran sektor perikanan dalam Produk Domestik Bruto (PDB)(%)	1,15	%	1,38	%	1,66	%	1,99	%	2,38	%	2,86	%		
		Volume produksi budidaya tambak (ribu ribu ton)	43.309	ton	45.474	ton	47.748	ton	50.136	ton	52.642	ton	55.274	ton		
		Volume produksi perikanan (ratias ribu ton)	454.312	ton	469.243	ton	484.708	ton	500.721	ton	517.309	ton	534.493	ton	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		Perikanan Budidaya	292.217	ton	303.906	ton	316.062	ton	328.704	ton	341.853	ton	355.527	ton		
		Perikanan Tangkap	162.095	ton	165.337	ton	168.644	ton	172.017	ton	175.457	ton	178.966	ton		
		Jumlah perahu/kapal penangkap ikan (ribu unit)	68.707	unit	69.051	unit	69.396	unit	69.743	unit	70.091	unit	70.442	unit		
		Volume ekspor perikanan (puluh ribu ton)													Dinas Kelautan dan Perikanan / Dinas Perdagangan	
			725	ton	740	ton	754	ton	769	ton	785	ton	800	ton		
		Jumlah pelabuhan perikanan dengan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (unit pelabuhan)	2	unit	3	unit	4	unit	4	unit	4	unit	4	unit		
		Kawasan terumbu karang berkualitas baik (%)	10	%	10	%	15	%	15	%	20	%	25	%		
		Jumlah nelayan dan pembudidaya ikan (puluh ribu orang)	198.032	orang	196.895	orang	187.140	orang	187.395	orang	187.652	orang	187.910	orang		
		nelayan	50.624		50.977		51.132		51.387		51.644		51.902			
		pembudidaya ikan	136.008		136.008		136.008		136.008		136.008		136.008		Dinas Kelautan dan Perikanan	
		Jumlah pekerja perempuan di sektor perikanan (ribu orang)	4.225	orang	4.225	orang	4.225	orang	4.225	orang	4.225	orang	4.225	orang		

6. Rapat Dengan Validator Data Sektoral dan Penyuluh PPTK sebagai Pengampu Statistik Sektor Kelautan dan Perikanan



7. Rapat Koordinasi dan Konsultasi Renstra 2025-2029 dengan Bappeda Prov Sumsel









8. Berita Acara dan Notulen Pembahasan Renstra DKP 2025-2029 dengan Bappeda

BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL PEMBAHASAN PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025-2029

Pada hari ini, *Jum'at* tanggal *Dua Puluh tiga* bulan *Mei* tahun *Dua Ribu Dua Lima*, telah diselenggarakan Pembahasan Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, yang dihadiri pihak terkait sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Berita Acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

1. Pemaparan materi dari Bappeda mengenai Substansi Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta rapat pembahasan Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang telah dirangkum menjadi hasil diskusi sebagaimana notulen pada Lampiran III.

MENYEPAKATI

- KESATU : Menyepakati program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja dan anggaran dalam Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II,
- KEDUA : Menyepakati berita acara ini beserta lampirannya (Lampiran I, II, dan III), yang merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara hasil kesepakatan ini;
- KETIGA : Berita acara hasil pembahasan ini beserta lampirannya menjadi bahan pemutakhiran Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Demikian berita acara ini dibuat sebagai bahan Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Palembang, 23 Mei 2025

Perangkat Daerah :
Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Sumatera Selatan



Vivin Indira Sari, ST., MT
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 197904182001122002

Pimpinan Rapat
Kepala Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan
Bappeda Provinsi Sumatera Selatan







Hari Wibawa, S.P., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP. 197303172007011021

Lampiran I**DAFTAR HADIR PESERTA PEMBAHASAN PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS DINAS
KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Provinsi : Sumatera Selatan

Tanggal : Mei 2025

Tempat : Ruang Rapat Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan

No	Nama	Lembaga/ Instansi	Jabatan	Tanda Tangan
1	Vin. Rana Sari	DKP SS	Sekretaris	
2	M. Umar Salmid	DKP PROV. SS	Kepribay PEP	
3	NOVRIODY	DKP PROV. SS	STAF PEP	
4	AOLAN	DKP PROV. SI	STAF PEP	



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Kapten A. Rivai No. 23 Palembang Telp. (0711) 356018 - 321181 Fax. (0711) 314586 - 356118
Website : www.bappeda.sumselprov.go.id E-mail : info@bappeda.sumselprov.go.id

NOTULEN

Acara	: Rapat Pembahasan Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan
Hari/Tanggal	: Kamis / 5 Juni 2025
Waktu	: 13.30 Wib s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Bidang PPP Lantai I Bappeda Provinsi Sumsel
Pimpinan Rapat	: Kepala Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan

Pimpinan rapat :

Point-point penting (skema/pola) Pembahasan Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 :

1. Draft Renstra PD **mempedomani sistematika pada Inmen 2 Tahun 2025** (Bab dan Sub Bab)
2. **Tujuan pada Renstra PD dirumuskan dari NSPK atau pada Pohon Kinerja Level 2, 3, dan 4 dan berjumlah maksimal 1 Tujuan** (Termasuk OPD yang **mengampu lebih dari 1 Urusan**).
3. **Sasaran pada Renstra** Perangkat Daerah dirumuskan dengan kalimat yang menjawab **Tujuan Perangkat Daerah (hubungan sebab akibat)**.
4. **Strategi pada Renstra PD disusun dengan mempertimbangkan isu strategis pada Ranwal RPJMD**.
5. **Arah Kebijakan pada Renstra PD dirumuskan dari arah kebijakan pada Ranwal RPJMD**.
6. **Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Renstra Perangkat Daerah** bersumber dari : Indikator Tujuan dan Sasaran/IKK per Urusan dan IKD per Aspek yang **terseleksi atau relevan dengan Tusi PD (Lampiran Form Bank Indikator)**.
7. Memastikan **keterisian target indikator pada Renstra PD dan Pagu Indikatif** sampai level sub Kegiatan dari tahun 2025-2030.
8. Agar **OPD Menyusun Pohon Kinerja Perangkat Daerah** dengan mempedomani Pohon Kinerja RPJMD (Format Pohon Kinerja OPD 2024-2026 dan Pohon Kinerja RPJMD 2025-2029 Terlampir).
9. Agar **OPD mengawal 12 Program Strategis pada Renstra PD** (Misal Tanjung Carat di Renstra Dishub, Revitalisasi Pasar di Renstra Disdag, Masjid Sriwijaya di Renstra Perkim, Pariwisata OKUS dan Pagaralam di Renstra Disbudpar, KSPP di Renstra Dinas Pertanian TPH, Sultan Muda dan Koperasi Merah Putih di Renstra Diskop)
10. **OPD agar Menyusun strategi dan arah kebijakan pada Renstra PD (Bahasa aksi)** dengan merujuk pada **12 Program Strategis beserta turunannya**.

11. Output/Keluaran Pembahasan Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 :
1. Lampiran 1 : Absen rapat
 2. Lampiran 2 : Tabel 4.2, 4.3. dan. 4.5 Inmendagri No. 2 Tahun 2025
 3. Lampiran 3 : Notulen Pembahasan Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Hasil Pembahasan :

1. Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumsel agar membuat cascading: tujuan, sasaran, outcome dan output yang harus dijawab oleh sub kegiatan.
2. Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumsel mendukung Misi 3 Gubernur dan Wakil Gubernur Bapak HDCU.
3. Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumsel mendukung Program Strategis Daerah yaitu :
 1. Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP),
 - a. **Program Perikanan Tangkap pada Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil** dengan Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp. 700.000.000,- dan **Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi** dengan Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Usahan Perikanan Tangkap
 - b. **Program Pengelolaan Perikanan Budidaya pada Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat** dengan Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - c. **Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan pada Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar** dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
 2. 100.000 Sultan Muda Sumsel
 - a. **Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan pada Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi** dengan Sub Kegiatan Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 3. Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak
 - a. **Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan pada Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi** dengan Sub Kegiatan Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

4. Revitalisasi Pasar Traditional
- a. **Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan pada Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar** dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
5. IKU Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan adalah Indeks Ketahanan Pangan mengacu **Inmen 2 Tahun 2025**, terkait Urusan Pangan dan Peternakan mengacu tabel berikut :

25) Urusan Kelautan dan Perikanan

TUJUAN	Meningkatnya kesejahteraan nelayan dan pembudidaya perikanan		
INDIKATOR	1. Nilai Tukar Nelayan (NTN) 2. Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan (NTP ₂)		
PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	KET.
Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil sebagai sumber nilai tambah ekonomi kelautan dan perikanan	Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB	
Pengelolaan Perikanan Tangkap	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	
Pengelolaan Perikanan Budidaya	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Meningkatnya kelestarian laut dan keanekaragaman hayati	Luasan Kawasan Konservasi	
Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan	

6. IKK Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumsel menampung indikator yang diamanatkan.
7. Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumsel harus menyusun Tabel 4.2, 4.3. dan 4.5 dan wajib selesai tanggal 25 Mei 2025

9. Konsultasi dan Koordinasi Aksi Perubahan ke Mentor





10. Koordinasi Data Indikator dengan BPS Prov Sumsel



11. Berita Acara Rapat Koordinasi dengan BPS Sumsel

NOTULEN RAPAT KOORDINASI

Hari/Tanggal : Jum'at / 20 Mei 2025
Tempat : Ruang Rapat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi

Agenda:

Koordinasi dan Sinkronisasi Data Sektor Kelautan dan Perikanan untuk Penyusunan Renstra DKP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029

Peserta Rapat:

- Kepala Sub. Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan beserta Tim Pengelola Statistik DKP
- Pejabat Fungsional Statistisi BPS Provinsi Sumatera Selatan beserta Tim Teknis

Hasil Pembahasan:

1. Telah dikoordinasikan dan disepakati bahwa baseline data sektor kelautan dan perikanan yang terkumpul pada *Google Spreadsheet* dan *Google form* serta digunakan dalam draft Renstra DKP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029 telah sinkron dan selaras dengan data resmi BPS Provinsi Sumatera Selatan.
2. Data indikator Angka Konsumsi Ikan (AKI) telah disesuaikan dengan metodologi perhitungan terbaru dari BPS sehingga angka yang tercantum dalam Renstra DKP 2025–2029 telah mengacu pada standar yang berlaku.
3. Nilai NTN (Nilai Tukar Nelayan) dan NTPi (Nilai Tukar Petani Ikan) telah dilakukan sinkronisasi baik untuk data historis 5 (lima) tahun terakhir maupun untuk target capaian 5 (lima) tahun mendatang. Tidak terdapat lagi perbedaan data antara DKP Provinsi Sumatera Selatan dengan BPS Provinsi Sumatera Selatan terkait dua indikator tersebut.
4. BPS Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan komitmen untuk melakukan pembaruan (*update*) data yang disajikan pada website resmi BPS Sumatera Selatan secara bertahap agar selaras dengan data yang terdapat dalam Buku Sumatera Selatan Dalam Angka, sehingga memudahkan Masyarakat dalam mendapatkan data dan menentukan kebijakan berusaha di sektor kelautan dan perikanan.

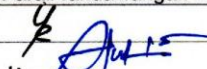
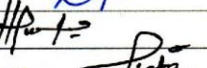
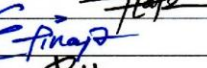
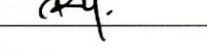


Penutup:

Rapat diakhiri dengan kesepakatan untuk terus menjaga komunikasi dan koordinasi antara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan dan BPS Provinsi Sumatera Selatan guna mendukung perencanaan dan evaluasi pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang akuntabel dan berbasis data yang valid.

Notulen oleh:

Nama : Jailani, S.Pi
Jabatan : Fungsional Muda APHP/Koordinator Statistik DKP

Peserta Rapat :

No	Nama	Jabatan	Paraf/Tanda Tangan
1	M Umar Sahid, S.St.Pi	Kasubbag P.E.P DKP Sumsel	
2	Iffah Atqa, S.ST., M.Si	Statistisi Ahli Madya BPS Sumsel	
3	Jailani, S.Pi	Koordinator Statistik	
4	fiar	Validator Bsd. Baudidaya	
5	Jura Istrech E. Sinaga	Validator Perik. tangkap	
6	NOVA RIADY	KOORDINATOR PERENCANA	
7			

12. Dukungan Interen DKP Sumsel



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jl. Pangeran Ratu, Jakabaring 15 Ulu Sebrang Ulu I Kode Pos 30257
Palembang Sumatera Selatan Telp. 0711-518757, website : dislutkan.sumselprov.go.id
Email : dkp@dislutkan.sumselprov.go.id

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Nomor : 500.5 / 349 / I/Dislutkan/2025

Sehubungan dengan pelaksanaan Pelatihan dan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan I Tahun 2025, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. Aries Irwan Wahyu, S.STPi., M.Si

NIP : 196811201989031006

Jabatan : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan

Dengan ini memberikan dukungan sepenuhnya terhadap Aksi Perubahan yang berjudul **“Peningkatan Akuntabilitas Target dan Capaian Kinerja dengan Menggunakan Data Yang Valid dan Aktual Pada Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan 2025-2029”** kepada :

Nama : Muhamad Umar Sahid, S.St.Pi

NIP : 198612162010011010

Pangkat : Penata Tingkat I

Golongan : III.d

Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Demikian Surat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

(Handwritten Signature)
H. ARIES IRWAN WAHYU, S.STPi., M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 196811201989031006



PEMERINTAHAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jl. Pangeran Ratu Jakabaring
Palembang 30257

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN
Nomor : 500.3 / 349 //Dislutkan/2025

Sehubungan dengan pelaksanaan Pelatihan dan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan I Tahun 2025, saya yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : Vivin Indira Sari, ST., MT.
Jabatan : Sekretaris Dinas

Dengan ini memberikan dukungan sepenuhnya terhadap Aksi Perubahan yang berjudul **“Peningkatan Akuntabilitas Target dan Capaian Kinerja dengan Menggunakan Data Yang Valid dan Aktual Pada Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan 2025-2029”** kepada :

Nama : Muhamad Umar Sahid, S.St.Pi
NIP : 198612162010011010
Pangkat : Penata Tingkat I
Golongan : III.d
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Demikian Surat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sekretaris Dinas

Vivin Indira Sari, ST., MT
Pembina Tk. I / IV.b
NIP. 197904182001122002



PEMERINTAHAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jl. PangeranRatu, Jakabaring 15 Ulu Sebrang Ulu I Kode Pos 30257
Palembang Sumatera Selatan Telp. 0711-518757, website : dislutkan.sumselprov.go.id

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN
NOMOR : 800/321/1/ DISLUTKAN /2025

Sehubungan dengan pelaksanaan Pelatihan dan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan I Tahun 2025, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Galamda Israk, S. Pi., M. Si

Jabatan : Kepala Bidang Perikanan Tangkap

Dengan ini memberikan dukungan sepenuhnya terhadap Aksi Perubahan yang berjudul "Peningkatan Akuntabilitas Target dan Capaian Kinerja dengan Menggunakan Data Yang Valid dan Aktual Pada Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan 2025-2029" kepada :

Nama : Muhamad Umar Sahid, S.St.Pi

NIP : 198612162010011010

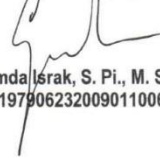
Pangkat : Penata Tingkat I

Golongan : III.d

Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Demikian Surat pernyataan dukungan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Bidang
Perikanan Tangkap


Galamda Israk, S. Pi., M. Si
NIP. 197906232009011006



PEMERINTAHAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jl. PangeranRatu, Jakabaring 15 Ulu Sebrang Ulu I Kode Pos 30257
Palembang Sumatera Selatan Telp. 0711-518757, website : dislutkan.sumselprov.go.id

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN
NOMOR 802.1/2021/1/ DISLUTKAN /2025

Sehubungan dengan pelaksanaan Pelatihan dan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan I Tahun 2025, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MOH. IMRON, SP., M. SI
Jabatan : Kepala Bidang PRL, PUD DAN PSDKP

Dengan ini memberikan dukungan sepenuhnya terhadap Aksi Perubahan yang berjudul **“Peningkatan Akuntabilitas Target dan Capaian Kinerja dengan Menggunakan Data Yang Valid dan Aktual Pada Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan 2025-2029”** kepada :

Nama : Muhamad Umar Sahid, S.St.Pi
NIP : 198612162010011010
Pangkat : Penata Tingkat I
Golongan : III.d
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Demikian Surat pernyataan dukungan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Bidang
PRL, PUD DAN PSDKP


Moh. Imron, SP., M. Si
NIP. 196903011993031011



**PEMERINTAHAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Jl. PangeranRatu, Jakabaring 15 Ulu Sebrang Ulu I Kode Pos 30257
Palembang Sumatera Selatan Telp. 0711-518757, website : dislutkan.sumselprov.go.id

**SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN
NOMOR 80.2/324/1/1/ DISLUTKAN /2025**

Sehubungan dengan pelaksanaan Pelatihan dan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan I Tahun 2025, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Pramita Martia R, S. St. Pi., MM
Jabatan : Kepala Bidang PUPMHKP

Dengan ini memberikan dukungan sepenuhnya terhadap Aksi Perubahan yang berjudul "Peningkatan Akuntabilitas Target dan Capaian Kinerja dengan Menggunakan Data Yang Valid dan Aktual Pada Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan 2025-2029" kepada :

Nama : Muhamad Umar Sahid, S.St.Pi
NIP : 198612162010011010
Pangkat : Penata Tingkat I
Golongan : III.d
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Demikian Surat pernyataan dukungan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Bidang
PUPMHKP

Pramita Martia Ressa, S. St. Pi., MM
NIP. 198703272009022004



PEMERINTAHAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jl. PangeranRatu, Jakabaring 15 Ulu Sebrang Ulu I Kode Pos 30257
Palembang Sumatera Selatan Telp. 0711-518757, website : dislutkan.sumselprov.go.id

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN
NOMOR : 800.2/323 /11/ DISLUTKAN /2025

Sehubungan dengan pelaksanaan Pelatihan dan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan I Tahun 2025, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Karna, S. Pi., M. Si
Jabatan : Kepala Bidang Perikanan Budidaya

Dengan ini memberikan dukungan sepenuhnya terhadap Aksi Perubahan yang berjudul **“Peningkatan Akuntabilitas Target dan Capaian Kinerja dengan Menggunakan Data Yang Valid dan Aktual Pada Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan 2025-2029”** kepada :

Nama : Muhamad Umar Sahid, S.St.Pi
NIP : 198612162010011010
Pangkat : Penata Tingkat I
Golongan : III.d
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Demikian Surat pernyataan dukungan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Bidang
Perikanan Budidaya


Karna, S. Pi., M. Si
NIP. 197211012007011016

13. Dukungan Bappeda Prov Sumsel



PEMERINTAHAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Kapten A. Rival No. 23 Palembang Telp. (0711) 356018 – 321181 Fax. (0711) 314586 - 356118
Website : www.bappeda.sumselprov.go.id E-mail : info@bappeda.sumselprov.go.id

PERNYATAAN DUKUNGAN

Sehubungan dengan pelaksanaan Pelatihan dan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan I Tahun 2025, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hari Wibawa, SP., MM

Jabatan : Kepala Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan

Dengan ini memberikan dukungan sepenuhnya terhadap Aksi Perubahan yang berjudul **“Peningkatan Akuntabilitas Target dan Capaian Kinerja dengan Menggunakan Data Yang Valid dan Aktual Pada Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan 2025-2029”** kepada :

Nama : Muhamad Umar Sahid, S.St.Pi

NIP : 198612162010011010

Pangkat : Penata Tingkat I

Golongan : III.d

Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Demikian Surat pernyataan dukungan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Bidang
Perekonomian dan Pendanaan
Pembangunan Bappeda



Hari Wibawa, SP., MM
NIP. 197303172007011021



14. Dukungan Kepala Dinas Kab/Kota



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN DINAS PERIKANAN

Komplek Perkantoran Jalan Lingkar Sekojo Pangkalan Balai, Provinsi Sumatera Selatan
No. 19 Telp. (0711) 7690006 Kode Pos 30753
SEKOJO PANGKALAN BALAI
Email : dinperikanan@banyuasinkab.go.id

PERNYATAAN DUKUNGAN

Sehubungan dengan pelaksanaan Pelatihan dan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan I Tahun 2025, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. Ir. Septifitri, MM

Jabatan : Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Banyuasin

Dengan ini memberikan dukungan sepenuhnya terhadap Aksi Perubahan yang berjudul **"Peningkatan Akuntabilitas Target dan Capaian Kinerja dengan Menggunakan Data Yang Valid dan Aktual Pada Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan 2025-2029"** kepada :

Nama : Muhamad Umar Sahid, S.St.Pi

NIP : 198612162010011010

Pangkat : Penata Tingkat I

Golongan : III.d

Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Demikian Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Banyuasin

Dr. Ir. SEPTIFITRI, MM
PEMBINA UTAMA MUDA / IV.c
NIP. 19650917 199003 1 005



PEMERINTAHAN KOTA PRABUMULIH DINAS PERIKANAN

Jl. Lingkar Timur Komplek Islamic Center lantai, Muara Dua, Prabumulih Timur
Email: dinasperikananpbm@gmail.com Prabumulih Sumatera Selatan Kode Pos 31113

PERNYATAAN DUKUNGAN

Sehubungan dengan pelaksanaan Pelatihan dan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan I Tahun 2025, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Titing, SP

Jabatan : Kepala Dinas Perikanan Kota Prabumulih

Dengan ini memberikan dukungan sepenuhnya terhadap Aksi Perubahan yang berjudul **"Peningkatan Akuntabilitas Target dan Capaian Kinerja dengan Menggunakan Data Yang Valid dan Aktual Pada Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan 2025-2029"** kepada :

Nama : Muhamad Umar Sahid, S.St.Pi

NIP : 198612162010011010

Pangkat : Penata Tingkat I

Colongan : III.d

Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Demikian Surat pernyataan dukungan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Perikanan
Kota Prabumulih

Titing, SP
NIP. 197212311994032024



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
Jalan H.Djazuli Kuris Nomor 1 Komplek Perkantoran Gunung Gare Pagar Alam
Telepon 0730 623 545 Faximili 0730 623545
Email : dkp2pagaralamm@gmail.com

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN
Nomor : 526/1/C/DKP2/2025

Sehubungan dengan pelaksanaan Pelatihan dan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan I Tahun 2025, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Jepri Zulfikar, S.P., M.Si
NIP : 197904042006041005
Pangkat/Gol : Pembina/ IV.a
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Dengan ini memberikan dukungan sepenuhnya terhadap Aksi Perubahan yang berjudul "**Peningkatan Akuntabilitas Target dan Capaian Kinerja dengan Menggunakan Data Yang Valid dan Aktual Pada Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan 2025-2029**" kepada :

Nama : Muhamad Umar Sahid, S.St.Pj
NIP : 198612162010011010
Pangkat/Gol : Penata Tingkat I/III.d
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Demikian Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Plt. Kepala Dinas,

Jepri Zulfikar, S.P., M.Si
Pembina/ IV.a
NIP. 197904042006041005



PEMERINTAHAN KABUPATEN LAHAT
DINAS PERIKANAN

JIN. H. Kaprawi rahim no.63.TR. Kemambang Bandar Jaya
Email:dinasperikanankablahat@gmail.com

PERNYATAAN DUKUNGAN

Sehubungan dengan pelaksanaan Pelatihan dan Kepemimpinan Pengawas (PKP)

Angkatan I Tahun 2025, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Marully, S. St. Pi

Jabatan : Kepala Dinas Perikanan Kabupaten LAHAT

Dengan ini memberikan dukungan sepenuhnya terhadap Aksi Perubahan yang berjudul
"Peningkatan Akuntabilitas Target dan Capaian Kinerja dengan Menggunakan Data Yang Valid dan Aktual Pada Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan 2025-2029" kepada :

Nama : Muhamad Umar Sahid, S.St.Pi

NIP : 198612162010011010

Pangkat : Penata Tingkat I

Colongan : III.d

Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Demikian Surat pernyataan dukungan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Lahat

Marully, S. St. Pi
NIP. 197707012000031004





**PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
DINAS PERIKANAN**

Jln. Mayor Tji Agus Kiemas, SH Lintas Kepur - Muara Lawai
Muara Enim- Sumatera Selatan Kode Pos 31351 Telp/Fax 0734-7420099
email: dinasperikananmuaraenim@gmail.com

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Nomor : 800.2/285/Disperkan-1/2025

Sehubungan dengan pelaksanaan Pelatihan dan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan I Tahun 2025, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muflih, S.STP, MH

Jabatan : Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Muara Enim

Dengan ini memberikan dukungan sepenuhnya terhadap Aksi Perubahan yang berjudul "Peningkatan Akuntabilitas Target dan Capaian Kinerja dengan Menggunakan Data Yang Valid dan Aktual Pada Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan 2025-2029" kepada :

Nama : Muhamad Umar Sahid, S.St.Pi

NIP : 198612162010011010

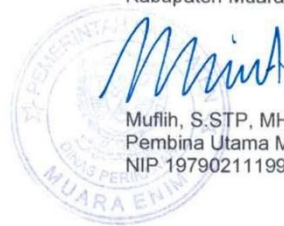
Pangkat : Penata Tingkat I

Golongan : III.d

Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Demikian Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Muara Enim,



Muflih, S.STP, MH
Pembina Utama Muda
NIP 197902111998101001

15. Sosialisasi Aksi Perubahan Melalui media sosial dan Grup Whats App

The screenshot shows a YouTube video player with a presentation slide. The slide title is "PENINGKATAN AKUNTABILITAS TARGET DAN CAPAIAN KINERJA DENGAN MENGGUNAKAN DATA YANG VALID DAN AKTUAL PADA RENSTRA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN 2025-2029". It features two speakers: H. SENTOT SUPRIYADI, S.Sos., M.Si (Coach) and M. UMAR SAHID, S.STPI (Participant of PKP 2025). The video is from the channel "perencanaan kelpriksumsel" and has 272 likes and 711 views.

PENINGKATAN AKUNTABILITAS TARGET DAN CAPAIAN KINERJA DENGAN MENGGUNAKAN DATA YANG VALID DAN AKTUAL PADA RENSTRA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN 2025-2029

H. SENTOT SUPRIYADI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
(COACH)

M. UMAR SAHID, S.STPI
PESEERTA PKP ANGGKATAN I 2025, NDH 26
Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Dinas Kelautan dan Perikanan, Provinsi Sumatera Selatan

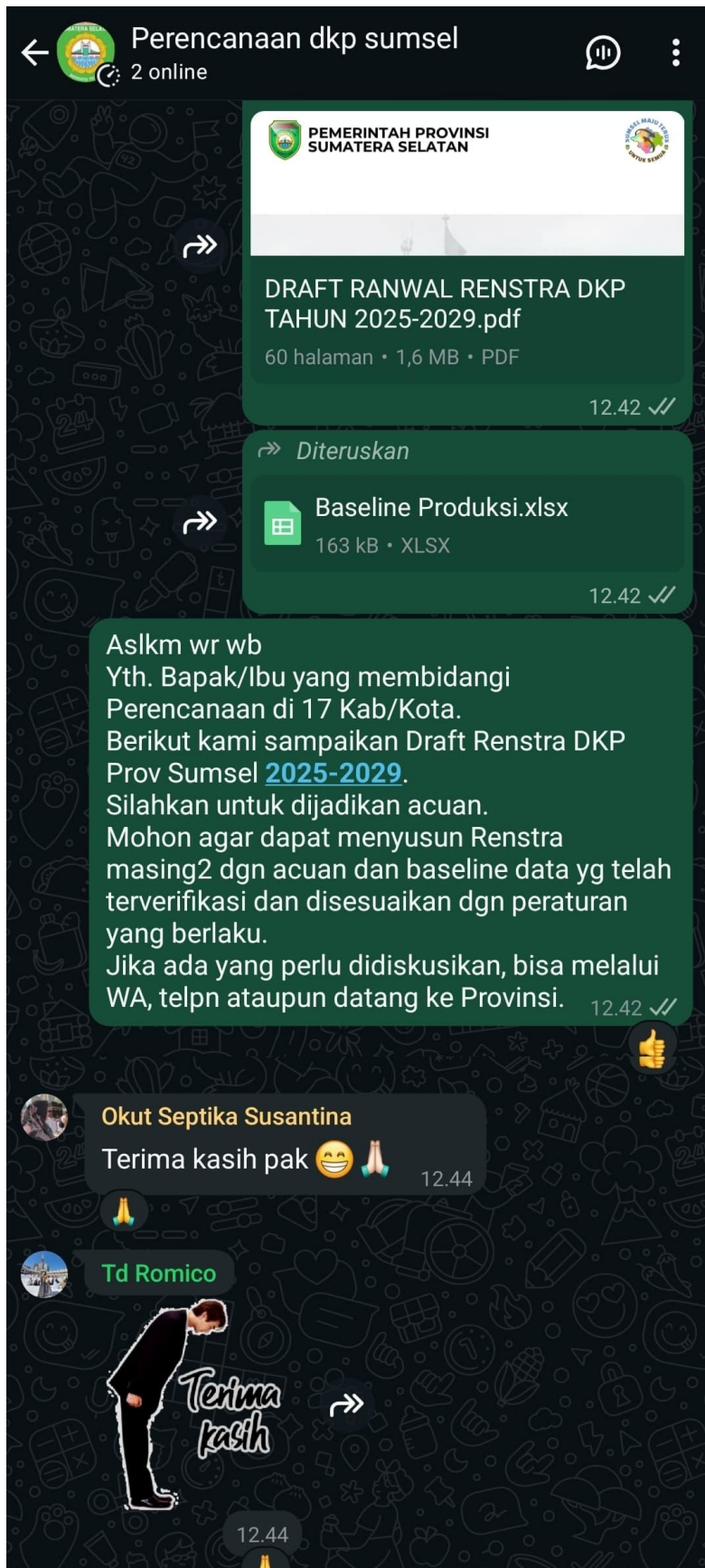
perencanaan kelpriksumsel
88 subscriber

Analytics Edit video

272

Bagikan Promosikan Download

711 x ditonton 8 hari yang lalu



16. Potensi Replikasi dan Diseminasi Resntra DKP Oleh Kab/Kota

